

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut salah satu perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, BPKAD Kabupaten Tanah Laut berwenang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP menyebutkan bahwa Kepala SKPD menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang dialokasikan dan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pelaksanaannya juga telah diatur dengan Keputusan Kepala LAN No.589/IX/6/4/1999 tentang LAKIP, yang diubah dengan Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2019, disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun

2019serta dalam mencapai misi tujuan organisasi. Dalam menyusun LAKIPBPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2019antara lain didasarkan atas :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor55 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Dalam LAKIP hal-hal yang dimuat tentunya meliputi Penilaian kinerja yang menyangkut baik segi-segi kuantitas dan kualitas dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, motivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian budget, mendorong SKPD agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani, dan menuntun perbaikan dalam memberikan pelayanan publik. Dari pemahaman seperti itu dapat dirinci dalam butir-butir penting untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah antara lain yaitu :

- Seberapa jauh efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- Seberapa jauh kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain apakah terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Seberapa banyak (kuantitas) dan bagaimana mutu (kualitas) penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat.
- Bagaimana dengan ketepatan lokasi serta waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah dan pembangunan.

B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

Dasar hukum pembentukan SKPD BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat DaerahKabupaten Tanah Laut mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain menyelenggarakan fungsi-fungsi di atas, sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 5 ayat (1) Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya pada ayat (3) kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :

1. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD.
2. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Atas dasar ketentuan itu, maka BPKAD selain menjalankan tugas-tugas dan fungsinya selaku SKPD, juga melaksanakan tugas dan fungsi selaku SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Adapun tugas Kepala SKPKD selaku PPKD sesuai Pasal 7 Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
3. Melaksanakan fungsi BUD.
4. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
5. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SOPD.
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.

5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah.
6. Menetapkan SPD.
7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
9. Menyajikan informasi keuangan daerah.
10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku Kuasa BUD. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Pasal 8 Permendagri no. 13 Tahun 2006, Kuasa BUD mempunyai tugas :

1. Menyiapkan anggaran kas.
2. Menyiapkan SPD.
3. Menerbitkan SP2D.
4. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
5. Memantau pelaksanaan pengeluaran APBD oleh Bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
6. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
7. Menyimpan uang daerah.
8. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah.
9. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
10. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
11. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
12. Melakukan penagihan piutang daerah.

Selanjutnya sesuai Pasal 9 Permendagri No.13 Tahun 2006, PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas :

1. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
3. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah.
4. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
5. Menyajikan informasi keuangan daerah.
6. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Belanja dan Pembiayaan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Anggaran;
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
 - 3) Sub Bidang Pembiayaan.
- d. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Piutang;
 - 2) Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban; dan
 - 3) Sub Bidang Akuntansi Pengelolaan Kas.

e. Bidang Penatausahaan Aset, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Inventarisasi;
- 2) Sub Bidang Pemindah tanganan Pemusnahan dan Penghapusan.

f. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan;
- 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Penggunaan; dan
- 3) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan.

g. UPT; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut terdapat tingkat eselonering sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Eselon II B
- b. Sekretaris Eselon III A
- c. Kepala Bidang (ada 4 Bidang) Eselon III B
- d. Para Kepala Sub Bagian (di bawah Sekretaris ada 3) Eselon IVA
- e. Para Kepala Sub Bidang(di bawah Kepala Bidang ada 11) Eselon IVA.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi,BPKAD Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2019 memiliki PNS berjumlah 51 orang yang dapat dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan,golongan, jabatan struktural dan staf yang terdiri dari:

a) Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri dari :

- S-2 : 3 orang
- S-1 : 23 orang
- D-III : 17 orang
- D- II : 0 orang
- SLTA : 8 orang
- SLTP : 0 orang

- SD : 0 orang
- b) Berdasarkan Golongan, terdiri dari :
- IV/c : 1 orang
 - IV/b : 1 orang
 - IV/a : 2 orang
 - III/d : 7 orang
 - III/c : 5 orang
 - III/b : 8 orang
 - III/a : 12 orang
 - II/d : 11 orang
 - II/c : 4 orang
 - II/b : 0 orang
 - II/a : 0 orang
 - I/d : 0 orang
- c) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Staf, terdiri dari :
- Eselon II : 1 orang
 - Eselon III : 5 orang
 - Eselon IV : 14 orang
 - Staf : 27 orang
 - Staf Fungsional : 4 orang

C. Produk dan Layanan

Secara umum pencapaian kinerja pelayanan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut selama 1 tahun terakhir cukup berhasil, tetapi bukan berarti sempurna, tentunya masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi, sehubungan dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanah Laut selain tugas dan fungsi selaku SKPD juga sebagai SKPKD (PPKD) dan BUD. Tidak mudah memang untuk mencapai apa-apa yang telah ditetapkan, karena dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renja SKPD adalah juga merupakan implementasi dalam

rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD. maka yang diharapkan adalah BPKAD Kabupaten Tanah Laut telah mewujudkan Tujuan dan Sasaran SKPD yang telah ditetapkan, dengan telah dicapainya target-target yang telah ditetapkan seperti yang akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya.

Sedangkan kondisi sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung produk dan pelayanan pada BPKAD untuk saat ini cukup memadai baik dari jumlah SDM aparatur dengan sarana dan prasarana lainnya yang dapat menunjang kelancaran tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.

Adapun sumber daya yang ada pada BPKAD Kab. Tanah Laut adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini :

**Daftar Sarana dan Prasarana
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019**

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	buah
2	Kendaraan Roda 4	7	buah
3	Kendaraan Roda 2	21	buah
4	AC Split	26	buah
5	Alat Penghancur Kertas	2	buah
6	Bangku Tunggu	4	buah
7	Brand Kas	5	buah
8	Camera Electronic	4	buah
9	CCTV	12	buah
10	Digital multi Tester	1	buah
11	Dongkrak Hidrolik	1	buah
12	DVD-Rom Drive	3	buah
13	Filling Besi/Metal	27	buah
14	Genset	2	buah
15	Gordyn	6	buah
16	GPS	2	buah

17	Handycam	3	buah
18	Harddisk Eksternal	15	buah
19	Hub	1	buah
20	Karpet	7	buah
21	Kipas Angin	8	buah
22	Kursi Besi/Metal	44	buah
23	Kursi Kerja	1	buah
24	Kursi Putar	37	buah
25	Kursi Rapat	65	buah
26	Kursi Tamu	2	buah
27	Laptop	26	buah
28	Lemari Besi	7	buah
29	Lemari kayu	8	buah
30	Meja Besi	1	buah
31	Meja Kayu	81	buah
32	Meja Komputer	2	buah
33	Meja Rapat	17	buah
34	Mesin Jilid	2	buah
35	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	3	buah
36	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	buah
37	Mesin Pompa Air	2	buah
38	Mesin Potong Rumput	1	buah
39	Meteran Laser	1	buah
40	Microphone	1	buah
41	Microphone/Wireless Mic	2	buah
42	Monitor	1	buah
43	Note Book	15	buah
44	P.C Unit/ Komputer PC	52	buah
45	Peralatan Jaringan Lain-lain	2	buah
46	Printer	87	buah
47	Proyektor + Attachment	5	buah
48	Rak Besi/Metal	78	buah
49	Router	1	buah
50	Scanner	3	buah
51	Server	4	buah
52	Sofa	3	buah
53	Stabilizer/Stavolt	4	buah
54	Switch Hub	2	buah
55	Tangga	1	buah
56	Telephone (PABX)	1	buah

57	Televisi	1	buah
58	Tong Sampah	2	buah
59	UPS	43	buah
60	White Board	2	buah
61	Wireless Access Point	10	buah
62	Wireless Lan (USB)	3	buah
63	Wireless Portable (Sound System)	1	buah
64	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	buah
65	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	buah
66	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	buah
67	Bangunan Menara/Tower Air	1	buah
68	Bangunan Nama Instansi/Unit Kerja	1	buah
69	Bangunan Sarana/Prasarana Lainnya	1	buah
70	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	2	buah
71	Halaman Gedung	2	buah
72	Instalasi Listrik Gedung Kantor	1	buah
73	Kanopi	1	buah
74	Konstruksi Pagar	1	buah
75	Bangunan Pembuangan Air Kotor Lain-lain	1	buah
76	Jaringan Distribusi Tegangan Di atas 20 KVA	1	buah
77	Buku Hukum	1	buah
TOTAL		803	buah

Terdapat keterkaitan antara jumlah SDM aparatur dengan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga dapat menunjang dan mendukung dalam rangka pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut khususnya dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah di Kabupaten Tanah Laut.

Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan

kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak melaksanakan tugas tugas yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang sebagian besar telah ditetapkan dalam SPM oleh masing-masing Kementerian, namun demikian, dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Produk dan Layanan
- D. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Tujuan
- B. Sasaran Strategis
- C. Indikator Kinerja Utama
- D. Program dan Kegiatan
- E. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. IKU
 - 2. Target IKU
 - 3. Uraian Capaian IKU
 - 4. Sasaran strategis sesuai Renstra dan Target
 - 5. Uraian Capaian Sasaran Strategis

6. Tabel Realisasi Capaian Sasaran Strategis
7. Analisa Capaian Sasaran Strategis
8. Tabel perbandingan realisasi capaian sasaran strategis Tahun 2018 dengan tahun 2019

B. Realisasi Anggaran

1. Ringkasan realisasi APBD Tahun 2018 terhadap 2019
 - Belanja tidak langsung
 - Belanja langsung
2. Ringkasan Anggaran dan Realisasi APBD BPKAD 2019 berdasarkan Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

B. Strategi Peningkatan Kinerja

- Lampiran
1. Pernyataan Hasil Reviu
 2. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2019
 3. Cascading (Pohon Kinerja)
 4. Matrik Keselarasan 2019
 5. Capaian Per Triwulan Tahun 2019
 6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2019
 7. IKU
 8. SOP LAKIP
 9. SK. Tim Penyusun LAKIP SKPD Tahun 2019
 10. Berita Acara Monev Triwulan III dan Triwulan IV

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut, telah disusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2018–2023 dengan memperhitungkan potensi (kekuatan), peluang dan kelemahan serta ancaman (kendala) yang ada atau mungkin timbul.

Sesuai dengan Visi Pembangunan Tanah Laut 2018-2023 yaitu : **Terwujudnya Tanah Laut yang “BERINTERAKSI”** dimana dari visi itu diartikan sebagai berikut :

- a. **Berkarya;** Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- b. **Inovatif;** Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
- c. **Tertata;** Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- d. **Religius;** Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
- e. **Aktual;**
- f. **Sinergis;** Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Visi tersebut di atas, kemudian dijabarkan ke dalam **5 Misi** sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut yaitu mendukung Visidan Misi Kepala Daerah danmendukung Misi ke- 2 dan Misi ke- 3 Kepala Daerah, dengan menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategi BPKAD Kabupaten Tanah Laut serta cara pencapaian tujuan dan Sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini, kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2019 yaitu bertepatan dengan tahun ke satu tahun Renstra akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2019 sebagaimana terlampir.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dan melihat latar belakang serta mencermati fenomena – fenomena yang berkembang, maka Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara tertib,
3. Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien.

Pernyataan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sepenuhnya mengacu pada Pernyataan Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Hal ini dapat dipahami mengingat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian integral atau unsur dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sudah selayaknya tujuan yang dikemukakan sepenuhnya mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pernyataan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut di atas, mengandung makna adanya tekad yang kuat untuk menjadikan BPKAD Kabupaten Tanah Laut handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena bukan pekerjaan mudah untuk mencapai akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melalui tujuan tersebut diharapkan BPKAD Kabupaten Tanah Laut menjadi motor penggerak bagi SKPD-SKPD lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan apa yang menjadi visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Sesuai kerangka konsep akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Berdasarkan uraian itu maka pernyataan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut di atas dapat diartikan bahwa Pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan yang telah ditetapkan BPKAD Kabupaten Tanah Laut merupakan implementasi dari pernyataan organisasi yang akan dicapai dan dilaksanakan dari kurun waktu 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun sehingga memudahkan

bagi Kepala Badan beserta jajarannya untuk mencapai kinerja yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan organisasi. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan lebih lanjut ke dalam sasaran. Oleh karena itu sasaran haruslah terinci dan dapat diukur. Uraian dari tujuan dan sasaran jangka panjang yang akan di capai oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut sehubungan dengan visi dan misi yang ditetapkan. Konsep dasar strategi adalah memberdayakan kekuatan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan, jadi merupakan cara atau langkah mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan progam/kegiatan. Berdasarkan tujuan dan sasaran BPKAD Kabupaten Tanah Laut, maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan periode 2018-2023.

Adapun sasaran startegi yang yang telah ditetapkan dan yang akan dicapai BPKAD Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah
3. Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan
4. Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan
5. Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan
6. Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan
7. Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan
8. Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan
9. Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan
10. Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan
11. Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran
12. Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD

13. Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD
14. Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD
15. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Setelah ditetapkan Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan adalah disusunnya program dan kegiatan sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi. Program dan kegiatan yang disusun tentulah harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut, dalam rangka menjawab tantangan/permasalahan dan isu-isu strategis sebagaimana telah dirumuskan.

Renstra yang disusun oleh SKPD tentulah harus bersinergi dengan RPJMD nya, karena hal ini terkait dengan pencapaian visi, misi yang ada dalam RPJMD. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja oleh SKPD dalam Renstra untuk lima tahun ke depan harus mendukung bagi pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD

No.	Kinerja Utama/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual	Bidang Akuntansi, Bidang Belanja dan Pembiayaan, Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset, dan Bidang Penatausahaan Aset BPKAD Kabupaten Tanah Laut
2	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil Survey penilaian masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan asset daerah	Bagian Sekretariat BPKAD Kabupaten Tanah Laut

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Tanah Laut seperti tersaji pada tabel diatas merupakan dasar untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyajikan laporan kinerja pada SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya.

D. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mencapai sasaran strategis dan target yang ditetapkan dalam Perjanjian/Penetapan kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

A. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dengan kegiatan:

- 1). Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Perubahan APBD.
- 2). Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

- 3). Pengelolaan akuntansi pendapatan dan piutang.
- 4). Pengelolaan akuntansi belanja dan beban.
- 5). Peningkatan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah.
- 6). Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah
- 7). Peningkatan Administari Pembiayaan Daerah.
- 8). Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
- 9). Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Laporan keuangan semesteran & Prognosis realisasi anggaran, serta lap keuangan akhir tahun
- 10). Penyusunan Standar Satuan Harga

B. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah dengan kegiatan:

- 1). Penyusunan tabulasi data asset tetap.
- 2). Pemindahtanganan, pemusnaha dan penghapusan asset daera
- 3). Perencanaan dan pengadaan asset daerah.
- 4). Pengelolaan pemanfaatan asset daerah

C. ProgramPerencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan:

- ❖ Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan:

- ❖ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan:

- (1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- (2) Penyusunan LKPJ dan LPPD serta LAKIP

F. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan:

- 1). Penyediaan jasa surat menyurat
- 2). Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3). Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 4). Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 5). Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 6). Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- 7). Penyediaan alat tulis kantor
- 8). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 9). Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 10). Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 11). Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 12). Penyediaan makanan dan minuman
- 13). Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 14). Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
- 15). Peningkatan manajemen asset/barang daerah pada SKPD
- 16). Peningkatan administrasi pengelolaan kepegawaian
- 17). Penyediaan Jasa Penunjang kinerja SKPD

G. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1). Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 2). Pengadaan Meubeleur
- 3). Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

E. Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2019

Perjanjian kinerja SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 didasarkan atas program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang APBD Tahun Anggaran 2019, dimana berdasarkan Dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD BPKAD Tahun Anggaran 2019 telah tergambar tolak ukur dan target kinerja yang akan dicapai untuk satu tahun anggaran.

Kinerja yang akan dicapai untuk satu tahun anggaran 2019 yang telah tergambar dalam DPA-SKPD BPKAD Tahun Anggaran 2019 adalah ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja SKPD BPKAD Tahun 2019. Untuk menggambarkan Tujuan, Sasaran Strategis (IKU/bukan IKU), Program dan Kegiatan beserta target-target dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat disajikan sebagaimana tabel berikut dibawah ini:

TABEL 2.2
FORMULIR PERJANJIAN KENERJA TAHUN 2019
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.

NO	SARGIS	IK SARGIS	TARGET	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN Y/T	NO	KEGIATAN			KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN Y/T)	ANGGARAN (RP.)	
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM			URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.Opini BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah	WTP											
2	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	2.Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	BAIK											
3.	Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan	3.Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	100%	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Ya	1	Penyusunan raperda dan raperbup tentang APBD dan Perubahan APBD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Terlaksananya penyusunan dokumen APBD dan Perubahan APBD	Ya	464.394.600.00	Terkait
4.	Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	4.Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	100%					2	Peningkatan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Pengelola administrasi penatausahaan keuangan daerah	Terlaksananya proses tindak lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan, Terasiliasinya penertiban SP2D, Tersusunnya perbup, SK, Dan SE, Bupati, Lap. TPG, TP, DAU Gaji, BPJS, Taperum Terlaksananya pembinaan terhadap bendahara pengeluaran, pengelolaan gaji SKPD	Ya	188.777.100.00	Terkait
								3	Peningkatan Administrasi Pembiayaan Daerah	Pengelola Dana Hibah, Dana Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, BTL dan Penyertaan Modal Pemda Kab. Tala	Terlaksananya administrasi Dana Hibah, Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Penyertaan Modal pemerintah kabupaten tanah laut secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Ya	514.379.400.00	Terkait
5.	Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan	5.Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%					4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Perda & Perbup ttg Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dgn SAP	Terlaksananya penyusunnya Lap. Keu Pemda Kab. Tala yg accountable & dpt diterima oleh publik	Ya	215.812.750.00	Terkait

								5	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, laporan keuangan semesteran & prognosis realisasi anggaran serta laporan keuangan akhir tahun	Pemerintah Kabupaten Tanah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Prognosis	Ya	18.870.300.00	Terkait
								6	Pengelolaan akuntansi pendapatan dan piutang	Pemerintah Kabupaten Tanah	Terlaksananya Pengelolaan Akuntansi Pendapatan dan Piutang	Ya	193.680.050.00	Terkait
								7	Pengelolaan akuntansi belanja dan beban	Pemerintah Kabupaten Tanah	Terlaksananya Pengelolaan Akuntansi Belanja dan Beban	Ya	216.758.500.00	Terkait
								8	Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	SKPD yg menjadi entitas akuntansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terlaksananya penanaman dan dapat mengimplementasikan sistem pengelolaan keuangan berbasis Akrual berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah di Seluruh SKPD sebagai Entitas Akuntansi Pemerintah daerah melalui SIMDA Versi 2.7	Ya	219.721.800.00	Terkait
								9	Penyusunan Standar Satuan Harga	40 SKPD se Kabupaten Tanah laut	Terlaksananya Penyusunan Buku SSH Brg/Jasa Keperluan Pemerintah Kab. Tala	Ya	117.061.800.00	Terkait
6.	Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	6.Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	87%					10	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	BMD Kab. Tanah Laut	Terlaksananya pengamanan thd BMD, Terlaksananya monitoring pemanfaatan & pemeliharaan BMD, Terlaksananya penelusuran tanah milik Daerah yang belum tercatat di KIB dan yang belum jelas status kepemilikannya, terlaksananya pembangunan pondasi/pagar, terlaksananya rekonsiliasi realisasi pemeliharaan BMD	Ya	511.889.400.00	Terkait

		7.Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	100%											
		8.Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	100%											
7.	Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	9.Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	100%											
8.	Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	10.Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	100%											
9.	Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan	11.Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	100%	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan aset Daerah	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	Ya	11	Penyusunan tabulasi data aset tetap	Pengelola Barang Pemerintah Kab. Tanah Laut	Terlaksananya Penyusunan Tabulasi Data Aset Tetap, Penghapusan BMD, Penjualan BMD, dan Pelaksanaan Movev BMD	Ya	446.852.050.00	Terkait
10.	Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	12.Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	100%					12	Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset daerah	Pengelola Barang Pemerintah Kab. Tanah Laut	Terlaksananya Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset daerah	Ya	76.495.500.00	Terkait
								13	Perencanaan dan Pengadaan aset daerah	Pengurus Barang se Kabupaten Tanah Laut	Terlaksananya penyusunan RKBMD/RKPBMD TA 2018 , Terlaksananya penyusunan DKBMD/DKPBMD dan DKBMD/DKPBMD Perubahan TA. 2018, Terlaksananya penyusunan Laporan Stock Opname Tahun 2017	Ya	109.482.700.00	Terkait
								14	Pengelolaan pemanfaatan aset daerah	SKPD se Kabupaten Tanah Laut	Terlaksananya rekonsiliasi pemanfaatan & penggunaan BMD, dan terlaksananya monitoring pemanfaatan & penggunaan BMD	Ya	148.423.450.00	Terkait

11	Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran	13.Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Ya	15	Penyediaan jasa surat menyurat	Administrasi Kantor BPKAD	Terlaksananya penyediaan paket pengiriman	Ya	450.000.00	Terkait
12	Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	14.Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	100%					16	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor BPKAD	Terlaksananya penyediaan Biaya Rekening Telepon, Internet, air dan listrik	Ya	318.000.000.00	Terkait
								17	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas / Operasional Kantor BPKAD	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional	Ya	145.800.000.00	Terkait
								18	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan BPKAD	Terlaksananya penyediaan biaya administrasi keuangan SKPD, survei kepuasan dan tertanganinya pengaduan masyarakat	Ya	101.289.100.00	Terkait
								19	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor BPKAD	Terlaksananya penyediaan Bahan/Peralatan kantor dan Biaya Honor PTT kebersihan kantor	Ya	31.280.200.00	Terkait
								20	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor BPKAD	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Ya	54.000.000.00	Terkait
								21	Penyediaan alat tulis kantor	Kantor BPKAD	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	Ya	51.263.700.00	Terkait
								22	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor BPKAD	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Ya	52.189.700.00	Terkait
								23	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor BPKAD	Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Ya	13.500.000.00	Terkait
								24	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor BPKAD	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Ya	80.263.364.00	Terkait

								25	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor BPKAD	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan Per-UU	Ya	6.480.000.00	Terkait
								26	Penyediaan makanan dan minuman	Kantor BPKAD	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk tamu kantor	Ya	80.994.000.00	Terkait
								27	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor BPKAD	Terlaksananya keperluan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Ya	854.852.000.00	Terkait
								28	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Kantor BPKAD	Terlaksananya keperluan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Ya	60.950.000.00	Terkait
								29	Peningkatan manajemen aset/barang daerah pada SKPD	Kantor BPKAD	Terlaksananya penyusunan Administrasi Pengelolaan Aset SKPD	Ya	6.750.000.00	Terkait
								30	Penyusunan administrasi pengelolaan kepegawaian	Karyawan/Karyawati Kantor BPKAD	Terlaksananya penyusunan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian SKPD	Ya	13.074.800.00	Terkait
								31	Penyediaan Jasa Penunjang kinerja SKPD	Karyawan/Karyawati Kantor BPKAD	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Ya	430.920.000.00	Terkait
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Ya	32	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor BPKAD	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Ya	90.000.000.00	Terkait
								33	Pengadaan Mebeleur	Kantor BPKAD	Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor	Ya	42.053.581.00	Terkait
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Ya	34	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Karyawan/Karyawati Kantor BPKAD	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi peraturan peundang-undangan	Ya	75.000.000.00	Terkait
13	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	15.Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	100%	Program perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan Tahunan SKPD	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Tahunan SKPD	Ya	35	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Tersusnya Laporan Perencanaan SKPD	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Ya	7.453.800.00	Terkait

14	Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD	16.Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Ya	36	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan SKPD - Lap. Keu (Bulanan & Tahunan), LKPJ dan LAKIP	Ya	5.200.000.00	Terkait
15	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	17.Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	66 (BAIK)					37	Penyusunan LKPJ dan LPPD serta LAKIP	Tersusunnya laporan kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan LKPJ/LPPD dan LAKIP SKPD	Ya	3.520.200.00	Terkait
Jumlah total Anggaran													5.967.883.845.00	

Matrik perjanjian kinerja tahun 2019 seperti tergambar diatas telah sesuai dan telah tersaji pada dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Pejabat Struktural dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada awal tahun sebelum pelaksanaan DPA dan setelah PERDA APBD Tahun 2019 ditetapkan. Sehingga terdapat kesesuaian antara matrik perjanjian kinerja secara keseluruhan dengan dokumen perjanjian kinerja seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 dengan disesuaikan dengan target sasaran strategis yang telah disajikan pada dokumen Renstra SKPD.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2019 yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 3.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPKAD 2019

No.	Kinerja Utama/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual	Bidang Akuntansi, Bidang Belanja dan Pembiayaan, Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset, dan Bidang Penatausahaan Aset BPKAD Kabupaten Tanah Laut
2	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	Hasil Survey penilaian masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Bagian Sekretariat BPKAD Kabupaten Tanah Laut

Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategi BPKAD Nomor 1 yaitu meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah meliputi pengukuran peningkatan kinerja keuangan dan aset daerah dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Tanah Laut yaitu Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah oleh Auditor kegiatannya berupa Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual dengan penanggungjawab Bidang Akuntansi, Bidang Belanja dan Pembiayaan, Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset, dan Bidang Penatausahaan Aset BPKAD Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategi BPKAD Nomor 2 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah adalah meliputi pengukuran Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah oleh masyarakat kegiatannya berupa Hasil Survey penilaian masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan penanggungjawab Bagian Sekretariat.

2. TARGET IKU

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2019 yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 3.2
TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPKAD 2019

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2019		PENJELASAN RUMUS	PENANGGUNGJAWAB / SUMBER DATA
			SATUAN	TARGET		
1	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual	Bidang Akuntansi, Bidang Belanja dan Pembiayaan, Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset, dan Bidang Penatausahaan Aset BPKAD Kabupaten Tanah Laut
2	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Indeks	82	Hasil survey penilaian masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Bagian Sekretariat BPKAD Kabupaten Tanah Laut

Target indikator IKU pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut disajikan disesuaikan dengan target indikator yang telah disajikan pada dokumen Renstra SKPD, dan pada Pohon Kinerja dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dan target ini sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan dilaksanakan oleh Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut sebagai Pimpinan SKPD.

3. URAIAN CAPAIAN IKU

Uraian capaian/ realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 3.3
URAIAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPKAD 2019

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2019			PENJELASAN RUMUS	PENANGGUNGJAWAB / SUMBER DATA
			SATUAN	TARGET	REALISASI		
1	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual	Bidang Akuntansi, Bidang Belanja dan Pembiayaan, Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset, dan Bidang Penatausahaan Aset BPKAD Kabupaten Tanah Laut
2	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Indeks	82	90	Hasil survey penilaian masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Bagian Sekretariat BPKAD Kabupaten Tanah Laut

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kedua target yang ditetapkan pada tahun 2019 telah terealisasi 100%, sehingga dengan demikian apa yang menjadi Visi,Misi Kepala Daerah dan tujuan organisasi BPKAD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan dokumen Renstra SKPD telah tercapai.

Untuk lebih jelas dan terinci mengenai capaian IKU dan bukan IKU SKPD yang menjadi Sasaran Strategis untuk mendukung tujuan SKPD dapat dijelaskan pada bab setelah ini.

4. Sasaran Strategis sesuai Renstra dan Target

Misi yang telah ditetapkan Kepala Daerah untuk BPKAD yaitu Misi ke 2 dan Misi ke 3 agar bisa di capai, harus dituangkan dan dijabarkan lagi ke dalam tujuan SKPD. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan organisasi, merupakan hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu, melalui tujuan akan dilaksanakan dari kurun waktu 1 (satu) tahun di tahun pertama tahun Renstra. Adanya tujuan yang ditetapkan pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut akan memudahkan bagi Kepala Badan beserta jajarannya untuk mencapai kinerja yang diinginkan karena telah ditetapkan tujuan apa yang akan di capai.

Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan organisasi. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan lebih lanjut ke dalam sasaran. Oleh karena itu sasaran haruslah terinci dan dapat diukur. Uraian dari Tujuan dan Sasaran jangka panjang yang akan di capai oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut sehubungan dengan visi dan misi yang ditetapkan.

5. Uraian Capaian Sasaran Strategis

Visi Kepala Daerah sebagaimana tersebut diatas agar bisa diwujudkan harus dituangkan dan dirinci ke dalam misi Kepala Daerah yang ditetapkan untuk BPKAD Kabupaten Tanah Laut harus menetapkan tujuandan sasaran strategis sebagai gambaran aktivitas yang akan dilaksanakan. Untuk menggambarkan Visi, Misi, Kepala Daerah dan Tujuan, Sasaran Strategi dan indikator-indikator beserta target-targetnya pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut sesuai Renstra BPKAD Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

NO	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN					SASARAN	INDIKATOR SASARAN/IKU	TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					Ket
					2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI	Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.	Persentase ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Kepala Badan
										2. Meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	BAIK(82)	BAIK(83)	BAIK(84)	BAIK(85)	BAIK(86)	
										3. Meningkatkan kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan	Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan
										4. Meningkatkan kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	

										5. Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan	Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Bidang Akuntansi	
2	-	-	Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara tertib.	Persentase peningkatan kualitas tertib penatausahaan dan pengelolaan aset daerah	100%	100%	100%	100%	100%	6. Meningkatkan kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	87%	89%	90%	92%	95%	Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	
										Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%			
										Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%			
										7. Meningkatkan kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%		
										8. Meningkatkan kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%		
										9. Meningkatkan kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan	Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Bidang Penatausahaan Aset	

										10. Meningkatkan kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	
3		Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif	Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian, perencanaan dan keuangan yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%	11. Meningkatkan kualitas pemenuhan sarpras perkantoran	Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretaris
									12. Meningkatkan pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	100%	100%	100%	100%	100%		
									13. Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%		
									14. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan & Kinerja Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%		
									15. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	66	67	68	69	70		

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Visi, Misi Kepala Daerah , tujuan, indikator tujuan,sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya telah sesuai dengan dokumen Renstra SKPD yang telah ditetapkan, yang menjadi acuan pedoman yang dilaksanakan BPKAD Kabupaten Tanah Laut selama 5 (lima) tahun atau masa Renstra 2018-2023.

Untuk menggambarkan bahwa penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun dalam RPJMD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel matrik keselarasan berikut ini :

TABEL 3.5
MATRIK KESELARASAN RENSTRA SKPD TAHUN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	IKU/BUKAN IKU	NO	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN Y/T	NO	KEGIATAN			KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN Y/T)	ANGGARAN (RP.)	
							URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM			URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ya	1.Opini BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah	Ya	IKU												
2	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	Ya	2.Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Ya	IKU												
3.	Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan	Ya	3.Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU	1.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Ya	1	Penyusunan raperda dan raperbup tentang APBD dan Perubahan APBD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Terlaksananya penyusunan dokumen APBD dan Perubahan APBD	Ya	464,394,600.00	Terkait
4.	Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	Ya	4.Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU						2	Peningkatan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Pengelola administrasi penatausahaan keuangan daerah	Terlaksananya proses tindaklanjut penyelesaian temuan pemeriksaan, Terfasilitasinya penertiban SP2D, Tersusunnya perbup, SK. Dan SE. Bupati, Lap. TPG, TP, DAU Gaji, BPJS, Taperum Terlaksananya pembinaan terhadap bendahara pengeluaran, pengelolaan gaji SKPD	Ya	188,777,100.00	Terkait

											3	Peningkatan Administrasi Pembiayaan Daerah	Pengelola Dana Hibah, Dana Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, BTL dan Penyertaan Modal Pemda Kab. Tala	Terlaksananya administrasi Dana Hibah, Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Penyertaan Modal pemerintah kabupaten tanah laut secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Ya	514,379,400.00	Terkait
5.	Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan	Ya	5.Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU						4	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Laporan keuangan semesteran & Prognosis realisasi anggaran, serta lap keuangan akhir tahun	40 SKPD yg menjadi Entitas akuntansi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Prognosis	Ya	18,870,300.00	Terkait
											5	Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	SKPD yg menjadi entitas akuntansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terlaksananya penanaman dan dapat mengimplementasikan sistem pengelolaan keuangan berbasis Akrual berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah di Seluruh SKPD sebagai Entitas Akuntansi Pemerintah daerah melalui SIMDA Versi 2.7	Ya	219,721,800.00	Terkait
											6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Perda & Perbup ttg Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dgn SAP	Terlaksananya penyusunnya Lap. Keu Pemda Kab. Tala yg accountable & dpt diterima oleh publik	Ya	215,812,750.00	Terkait
											7	Pengelolaan akuntansi pendapatan dan piutang	Pemerintah Kabupaten Tanah	Terlaksananya Pengelolaan Akuntansi Pendapatan dan Piutang	Ya	193,680,050.00	Terkait

										8	Pengelolaan akuntansi belanja dan beban	Pemerintah Kabupaten Tanah	Terlaksananya Pengelolaan Akuntansi Belanja dan Beban	Ya	216,758,500.00	Terkait
6.	Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	Ya	6.Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU					9	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	BMD Kab. Tanah Laut	Terlaksananya pengamanan thd BMD, Terlaksananya monitoring pemanfaatan & pemeliharaan BMD, Terlaksananya penelusuran tanah milik Daerah yang belum tercatat di KIB dan yang belum jelas status kepemilikannya, terlaksananya pembangunan pondasi/pagar, terlaksananya rekonsiliasi realisasi pemeliharaan BMD	Ya	511,889,400.00	Terkait
			7.Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU											
			8.Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU											
7.	Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	Ya	9.Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU					10	Penyusunan Standar Satuan Harga	40 SKPD se Kabupaten Tanah laut	Terlaksananya Penyusunan Buku SSH Brg/Jasa keperluan Pemerintah Kab. Tala	Ya	117,061,800.00	Terkait

						2.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan aset Daerah	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah		11	Perencanaan dan Pengadaan aset daerah	Pengurus Barang se Kabupaten Tanah Laut	Terlaksananya penyusunan RKBM/RKPBMD TA 2018, Terlaksananya penyusunan DKBMD/DKPBMD dan DKBMD/DKPBMD Perubahan TA. 2018, Terlaksananya penyusunan Laporan Stock Opname Tahun 2017	Ya	109,482,700.00	Terkait
8.	Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	Ya	10.Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU						12	Pengelolaan pemanfaatan aset daerah	SKPD se Kabupaten Tanah Laut	Terlaksananya rekonsiliasi pemanfaatan & penggunaan BMD, dan terlaksananya monitoring pemanfaatan & penggunaan BMD	Ya	148,423,450.00	Terkait
9.	Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan	Ya	11.Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	Ya	BUKAN IKU						13	Penyusunan tabulasi data aset tetap	Pengelola Barang Pemerintah Kab. Tanah Laut	Terlaksananya Penyusunan Tabulasi Data Aset Tetap, Penghapusan BMD, Penjualan BMD, dan Pelaksanaan Monev BMD	Ya	446,852,050.00	Terkait
10.	Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	Ya	12.Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU						14	Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset daerah	Pengelola Barang Pemerintah Kab. Tanah Laut	Terlaksananya Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset daerah	Ya	76,495,500.00	Terkait
11.	Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran	Ya	13.Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	Ya	BUKAN IKU	3.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Ya	15	Penyediaan jasa surat menyurat	Administrasi Kantor BPKAD	Terlaksananya penyediaan paket pengiriman	Ya	450,000.00	Terkait
12	Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	Ya	14.Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	Ya	BUKAN IKU						16	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor BPKAD	Terlaksananya penyediaan Biaya Rekening Telepon, Internet, air dan listrik	Ya	318,000,000.00	Terkait

											17	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas / Operasional Kantor BPKAD	Tertaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas / Operasional	Ya	145,800,000.00	Terkait
											18	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan BPKAD	Tertaksananya penyediaan biaya administrasi keuangan SKPD, survei kepuasan dan tertanganinya pengaduan masyarakat	Ya	101,289,100.00	Terkait
											19	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor BPKAD	Tertaksananya penyediaan Bahan/Peralatan kantor dan Biaya Honor PTT kebersihan kantor	Ya	31,280,200.00	Terkait
											20	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor BPKAD	Tertaksananya perbaikan peralatan kerja	Ya	54,000,000.00	Terkait
											21	Penyediaan alat tulis kantor	Kantor BPKAD	Tertaksananya penyediaan alat tulis kantor	Ya	51,263,700.00	Terkait
											22	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor BPKAD	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Ya	52,189,700.00	Terkait
											23	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor BPKAD	Tertaksananya pengadaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Ya	13,500,000.00	Terkait
											24	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor BPKAD	Tertaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Ya	80,263,364.00	Terkait

											25	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor BPKAD	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan Per-UU	Ya	6,480,000.00	Terkait
											26	Penyediaan makanan dan minuman	Kantor BPKAD	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk tamu kantor	Ya	80,994,000.00	Terkait
											27	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor BPKAD	Terlaksananya keperluan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Ya	854,852,000.00	Terkait
											28	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Kantor BPKAD	Terlaksananya keperluan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Ya	60,950,000.00	Terkait
											29	Peningkatan manajemen aset/barang daerah pada SKPD	Kantor BPKAD	Terlaksananya penyusunan Administrasi Pengelolaan Aset SKPD	Ya	6,750,000.00	Terkait
											30	Penyusunan administrasi pengelolaan kepegawaian	Karyawan/Karyawati Kantor BPKAD	Terlaksananya penyusunan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian SKPD	Ya	13,074,800.00	Terkait
											31	Penyediaan Jasa Penunjang kinerja SKPD	Karyawan/Karyawati Kantor BPKAD	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Ya	430,920,000.00	Terkait
						4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Ya	32	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor BPKAD	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Ya	90,000,000.00	Terkait
											33	Pengadaan Mebeleur	Kantor BPKAD	Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor	Ya	42,053,581.00	Terkait

						5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Ya	34	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Karyawan/Karyawati Kantor BPKAD	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Ya	75,000,000.00	Terkait
13	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	Ya	15.Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU	6.	Program perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya Perencanaan Tahunan SKPD	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Tahunan SKPD	Ya	35	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Tersusunnya Laporan Perencanaan SKPD	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Ya	7,453,800.00	Terkait
14	Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD	Ya	16.Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU	7.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan SKPD	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan SKPD	Ya	36	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan SKPD : Lap. Keu (Bulanan & Tahunan), LKJP dan LAKIP	Ya	5,200,000.00	Terkait
15	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Ya	17.Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Ya	BUKAN IKU						37	Penyusunan LKPJ dan LPPD serta LAKIP	Tersusunnya laporan kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan LKPJ/LPPD dan LAKIP SKPD	Ya	3,520,200.00	Terkait
Jumlah total Anggaran															5,967,883,845.00		

Tabel matrik keselarasan dibuat untuk memudahkan bagi BPKAD Kabupaten Tanah Laut dalam menetapkan kinerja serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2019, sehingga terdapat keselarasan antara Renstra SKPD dengan Rencana Kerja Tahunan SKPD atau Perjanjian Kinerja SKPD, sehingga perencanaan dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut selaras dan berkesinambungan.

6. Tabel Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Berikut ini disajikan realisasi pencapaian sasaran strategis BPKAD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 pada tabel di bawah ini.

TABEL PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2019
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN %	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN %
1	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.	1. Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	2 Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Nilai Indeks	82	87	106,10%	82	90	109,76%
		3. Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan	3 Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%
		4. Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	4 Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%
		5. Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan	5 Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%
		6. Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	6 Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	%	100	100	100%	87	100	114,95%
2	Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara tertib.		7 Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%
			8 Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%
		7. Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	9 Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%
		8. Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	10 Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%
		9. Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan	11 Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	%	100	100	100%	100	100	100%
		10. Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	12 Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	108,80	108,80%

3	Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien	11. Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran	13	Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	%	100	100	100%	100	100	100%
		12. Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	14	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	%	100	100	100%	100	100	100%
		13. Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	15	Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%
		14. Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan & Kinerja Keuangan SKPD	16	Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%
		15. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	17	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai	64.15	64.74	100,92%	66	74,98	113,61%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 15 Sasaran Strategis dan 17 indikator sasaran yang telah ditargetkan pada tahun 2019, rata-rata telah tercapai seluruhnya 100% dan terdapat 3 indikator sasaran yang realisasinya melebihi target.

Selain itu juga disajikan rincian 15 sasaran strategis dan 17 Indikator sasaran sesuai target dan realisasi pencapaian per sasaran strategis serta perbandingan tersebut dapat dilihat baik peningkatan maupun penurunan dalam realisasi pencapaian per sasaran BPKAD tahun 2018 dan 2019.

Untuk menggambarkan analisa pencapaian per sasaran strategis pada pada tabel yang disajikan diatas dapat diuraikan pada sub bab berikutnya, agar dapat memberikan informasi pencapaian selama 1 (satu) tahun dan bagaimana trend yang terjadi pada setiap tahun selama Tahun Renstra 2018-2023.

7. Analisa Capaian Sasaran Strategis

Untuk menggambarkan tabel realisasi capaian sasaran strategis beserta analisa capaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut dibawah ini.

Analisa capaian 15 sasaran strategis dapat dijelaskan per indikator sasaran strategis dengan target dan realisasinya serta dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga tergambar capaian kinerja per sasaran secara terinci dengan penjelasan sebagai berikut :

7.1. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1

Sasaran strategis nomor 1 ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian tergambar pada tabel sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
			Rata-rata capaian kinerja				100.00			100.00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan indikator sasaran Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100%, dan pada tahun 2018 juga mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 100%.

Dalam rangka untuk mendukung indikator sasaran nomor 1 sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang juga merupakan IKU BPKAD nomor 1 ini dilaksanakan seluruh Kepala Bidang (Bidang Belanja & Pembiayaan, Bidang Akuntansi, Bidang Penatausahaan Aset dan Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset) beserta seluruh Kasubbid dibawahnya dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, nilai realisasi capaian dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP oleh BPK RI atas LKPD tahun 2013 untuk yang pertama

kali dengan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) mengungkapkan sebanyak 14 temuan dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 7 temuan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013 Laporan Keuangan SKPD Akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual), sehingga masih berbasis Cash menuju akrual yang belum sepenuhnya berbasis Akrual.

- Kemudian pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Tahun 2014 untuk yang kedua kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan mengungkapkan sebanyak 4 temuan dengan bukti surat Nomor 8B/LHP/XIX.BJM/05/2015 tanggal 25 Mei 2015
- Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP dari BPK RI atas LKPD tahun 2015 untuk yang ketiga kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 9 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 3 temuan, dengan bukti surat Nomor 07.A/LHP/XIX.BJM/05/2016 dan Nomor 07.B/LHP/XIX.BJM/05/2016 serta Nomor 07.C/LHP/XIX.BJM/05/2016 tanggal 27 Mei 2016
- Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini dari BPK RI atas LKPD tahun 2016 untuk yang keempat kalinya dengan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 7 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 4 temuan, dengan bukti surat Nomor 12.A/LHP/XIX.BJM/05/2017 dan Nomor 12.B/LHP/XIX.BJM/05/2017 tanggal 26 Mei 2017.
- Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017 untuk yang kelima kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan

Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 3 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 5 temuan, bukti surat Nomor : 11.B/LHP/XIX.BJM/05/2018 tanggal 25 Mei 2018. sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

- Sedangkan pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018 untuk yang keenam kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 8 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 5 temuan, bukti surat Nomor : 12.B/LHP/XIX.BJM/05/2019 tanggal 20 Mei 2018 dan Nomor : 12.C/LHP/XIX.BJM/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Opini WTP yang didapatkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dengan hasil pemeriksaan dengan trend temuan setiap tahunnya cenderung menurun atau terdapat peningkatan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tercantum dalam Renstra BPKAD Tahun 2018-2023, bahwa cita-cita BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Renstra BPKAD Tahun 2018-2023 dalam mewujudkan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel pada tahun 2019 telah berhasil dilaksanakan 100%.

Untuk mencapai target tersebut tercapai dikarenakan adanya :

1. Komitmen Aparatur dan Pemangku Kepentingan
 - a. Penguatan Komitmen Bebas Temuan dan Rekomendasi Pemeriksa pada Tahun 2015 dengan penandatanganan pakta integritas

- b. Peningkatan Intensitas Koordinasi Internal dan Eksternal
- 2. Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
 - a. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)/Aparatur Pemda
 - b. Sistem Reward and Punishment
 - c. Penataan Organisasi dan Kelembagaan
- 3. Sistem Informasi Keuangan Daerah
 - a. SIMDA-Keuangan
 - b. SIMDA-BMD
 - c. SIMDA Pendapatan
- 4. Kelengkapan Regulasi Daerah
- 5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Melalui upaya-upaya tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut optimis bisa mempertahankan Opini WTP selama semua dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Untuk kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut akan menuangkan action plan mempertahankan Opini WTP dalam sebuah Peraturan Bupati Tanah Laut dan mencanangkan slogan “Sekali WTP tetap WTP atau Forever WTP”. Progres Action Plan / Rencana Aksi pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan Daerah telah mensosialisasikan tentang adanya regulasi terbaru berkaitan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada setiap pelaksanaan coffee morning untuk seluruh pimpinan SKPD.
2. Melakukan rapat koordinasi/penyamaan persepsi dengan Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan pengurus barang untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas.
3. Dalam meningkatkan kualitas SDM di bidang pengelolaan keuangan dan aset, Pemerintah Daerah (BPKAD) telah mengadakan pembinaan terhadap entitas akuntansi, sosialisasi regulasi, melaksanakan rekonsiliasi dan monitoring, melaksanakan FGD untuk mewujudkan

pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada Pemerintah Daerah.

4. Dalam menyamakan persepsi tentang pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi serta BPK dan BPKP.
5. Bupati Tanah Laut telah menetapkan revisi Kebijakan Akuntansi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 125 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
6. Pemerintah Daerah sudah menggunakan SIMDA versi 2.7.13 yang mengakomodir full basis akrual.
7. Pemerintah Daerah sudah membuat jaringan online berbasis website dengan menggunakan SIM-Cloude, sehingga SIMDA Keuangan telah terintegrasi antara SKPD dengan SKPKD
8. Pemerintah Daerah akan melakukan penyesuaian kode rekening secara bertahap berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
9. Pemerintah Daerah akan memberikan penghargaan setiap tahunnya bagi SPKD terbaik, Bendahara Pengeluaran terbaik, Bendahara Penerimaan terbaik dan Pengurus Barang terbaik sesuai tupoksi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Para Pimpinan SKPD belum sepenuhnya memahami pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas.
2. Kurangnya koordinasi antara PA/KPA ,PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
3. Kurangnya tenaga Akuntansi pada setiap SKPD terutama di SKPKD.

4. Kurangnya tenaga IT yang bisa mengoperasikan aplikasi Keuangan dan Aset.
5. Pelaksana Pengelola Keuangan dan Aset belum sepenuhnya memahami tentang Akuntansi Berbasis AkruaI dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas.
6. Sering terjadi mutasi tenaga teknis pengelola keuangan dan aset, sehingga harus ada pembenahan ulang bagi SKPD terkait.
7. Belum terintegrasi antara Simda Keuangan dengan SIMDA BMD.

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan setiap adanya regulasi pengelolaan keuangan daerah yang terbaru untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada pelaksanaan coffe morning.
2. Melakukan rapat-rapat koordinasi antara PA/KPA ,PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
3. Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan BKD dalam pemerataan tenaga IT.
4. Melakukan Pembinaan entitas akuntansi,melakanakan rekonsiliasi,monitoring, sosialisasi regulasi, FGD tentang pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
5. Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap tenaga ahli/tenaga teknis pengelola keuangan dan Aset dalam hal mutasi unit kerja.
6. Memberikan penghargaan bagi Bendahara Pengeluaran terbaik, Bendahara Penerimaan terbaik dan Pengurus Barang terbaik sesuai tupoksi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset

Dalam rangka untuk mendukung indikator sasaran nomor 1 ini yaitu meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab 4 (empat) Bidang dilingkungan BPKAD

Kabupaten Tanah Laut yaitu Bidang Akuntansi, Bidang Belanja dan Pembiayaan, Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset, dan Bidang Penatausahaan Aset BPKAD Kabupaten Tanah Laut dan dapat dijelaskan melalui Sasaran Strategis masing-masing jabatan pada pembahasan selanjutnya.

7.2. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 2

Sasaran strategis nomor 2 ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian tergambar pada tabel sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	2	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Nilai	82	87	106.1	82	90	109,76
			Rata-rata capaian kinerja				106.10			109,76

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama BPKAD nomor 2 ini maka sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 selama 6 (enam) tahun dilaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SKPD khususnya terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset daerah terhadap 4 bidang pelayanan yaitu pelayanan penerbitan SP2D, pelayanan Bansos, hibah dan bantuan keuangan lainnya, pelayanan pengelolaan asset daerah dan pelayanan pada bidang Akuntansi. Jumlah responden sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang dari Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survei kepada masyarakat yang menjadi konsumen dari 4 bidang pelayanan tersebut, dengan jumlah

responden adalah 150 (seratus lima puluh) orang. Kegiatan pengumpulan data telah dilaksanakan dalam periode minggu terakhir bulan Mei sampai dengan minggu keempat bulan Juli. Dari hasil survey tersebut didapat nilai indeks dengan hasil 87 dari target 82 pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 didapat nilai indeks dengan hasil 90 dari target 82, sehingga dengan demikian terdapat peningkatan trend kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pencapaian nilai hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut berada dalam mutu pelayanan SANGAT BAIK, sehingga dengan demikian realisasi telah melampaui target yang ditetapkan. atau terdapat peningkatan sebesar 3,66 % dari tahun 2018. Dengan demikian bahwa dengan adanya hasil survey kepuasan masyarakat yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut berada dalam mutu pelayanan sangat baik.

Dalam rangka untuk mendukung indikator sasaran nomor 2 ini dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Bagian Sekretariat BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

7.3. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 3

Sasaran strategis nomor 3 adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan dengan tabel pencapaian sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3
Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi	
3	Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan	3	Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100
			Rata-rata capaian kinerja				100.00			100.00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan adalah perjanjian kinerja Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan dengan realisasi capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung indikator sasaran nomor 3 ini dilaksanakan oleh Kasubbid Anggaran dengan pencapaian Program dan Kegiatan serta pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Penyampaian penetapan APBD dan APBD Perubahan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa batas waktu penyampaian penetapan APBD dan APBD Perubahan yaitu paling lambat pada tanggal 31 Desember.

Pada tahun 2018 penetapan APBD Tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018 Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017, dan untuk penetapan APBD Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2018 Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2018 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

Sedangkan pada tahun 2019 penetapan APBD Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2019 Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018, dan untuk penetapan APBD

Perubahan tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2019 Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2019 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

Program dan kegiatan Kasubbid Anggaran Tahun 2019 yang telah dilaksanakan dengan capaian sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	
1	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan raperda dan raperbup tentang APBD dan Perubahan APBD	Rp517.934.600	Rp282.571.560	54,56%	
			Penyusunan dokumen Perda APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Cetak dokumen Perda APBD	3 Dokumen	2 Dokumen	66,67%
			Penyusunan dokumen Perbup APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Cetak dokumen Perbup APBD	3 Dokumen	2 Dokumen	66,67%
			Penyusunan dokumen KUA/KUPA	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Cetak dokumen KUA/KUPA	3 Dokumen	2 Dokumen	66,67%
			Penyusunan dokumen PPAS/PPAS Perubahan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Cetak dokumen PPAS/PPAS Perubahan	3 Dokumen	2 Dokumen	66,67%
			Penyusunan dokumen Nota Keuangan APBD /Nota Keuangan P-APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

			Cetak dokumen Nota Keuangan APBD /Nota Keuangan P-APBD	3 Dokumen	2 Dokumen	66,67%
			Penyusunan dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/RKA-PPKD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Cetak dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/RKA-PPKD	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%

Perjanjian Kinerja Sub Bidang Anggaran Tahun 2019 beserta target sebagai berikut :

Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target
1	2		3
1. Menyusun KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan sesuai ketentuan	1	Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan	4
2. Melaksanakan Sosialisasi Pedoman Penyusunan RKA sesuai ketentuan	2	Jumlah SKPD yang mengikuti sosialisasi dan memahami penyusunan RKA sesuai ketentuan	40
3. Melaksanakan Pembahasan RKA-SKPD sesuai ketentuan	3	Jumlah SKPD yang mengikuti pembahasan RKA-SKPD sesuai ketentuan	40
4. Menyusun Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai ketentuan	4	Jumlah dokumen Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai ketentuan	2
5. Memfasilitasi evaluasi atas Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD ke pemprov sesuai ketentuan	5	Jumlah Naskah Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan DPRD Kabupaten Tanah Laut sesuai ketentuan	2
6. Memfasilitasi Penetapan Perda APBD dan Perda Perubahan APBD sesuai ketentuan	6	Jumlah Dokumen Penetapan Perda APBD dan Perubahan APBD	2
7. Menerbitkan Surat Penyediaan Dana untuk SKPD sesuai ketentuan	7	Jumlah Surat Penyediaan Dana untuk SKPD dan SKPKD yang diterbitkan sesuai ketentuan	280
8. Melaksanakan Pembinaan Penganggaran kepada SKPD sesuai ketentuan	8	Jumlah SKPD yang dibina dalam penganggaran sesuai ketentuan	40

Pencapaian Perjanjian Kinerja Sub Bidang Anggaran Tahun 2019 yang telah dilaksanakan dengan capaian sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan	4	4	100%

2	Jumlah SKPD yang mengikuti sosialisasi dan memahami penyusunan RKA sesuai ketentuan	40	40	100%
3	Jumlah SKPD yang mengikuti pembahasan RKA-SKPD sesuai ketentuan	40	40	100%
4	Jumlah dokumen Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai ketentuan	2	2	100%
5	Jumlah Naskah Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan DPRD Kabupaten Tanah Laut sesuai ketentuan	2	2	100%
6	Jumlah Dokumen Penetapan Perda APBD dan Perubahan APBD	2	2	100%
7	Jumlah Surat Penyediaan Dana untuk SKPD dan SKPKD yang diterbitkan sesuai ketentuan	280	280	100%
8	Jumlah SKPD yang dibina dalam penganggaran sesuai ketentuan	40	40	100%

1. Analisa capaian kinerja sesuai Program dan Kegiatan sesuai DPA Kasubbid Anggaran
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan Kegiatan Penyusunan raperda dan raperbup tentang APBD dan Perubahan APBD dengan pagu anggaran sebesar Rp 517.934.600 dengan realisasi sebesar Rp 282.571.560 atau sebesar 54,56%, walaupun secara keuangan hanya terealisasi sebesar 54,56% dikarenakan tidak dapat merealisasi belanja cetak dokumen namun secara target kinerja sesuai dengan DPA tercapai 100%.
2. Analisa capaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Kasubbid Anggaran
 - A. Dalam menyusun APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 diperlukan Peraturan yang telah menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berupa :
 1. Peraturan Daerah sebanyak 2 dokumen
 2. Peraturan Bupati sebanyak 4 dokumen
 3. Keputusan Bupati sebanyak 1 dokumen
 4. Surat Edaran Bupati sebanyak 2 dokumen

Dari keempat jenis dokumen tersebut, telah diterbitkan :

1. Peraturan Daerah, sebanyak 2 dokumen yaitu :

- a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019.
 - b. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020
2. Peraturan Bupati, sebanyak 4 dokumen yaitu :
- a. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
 - b. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
 - c. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
 - d. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
3. Keputusan Bupati, sebanyak 1 dokumen yaitu :
- a. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/181-KUM/2019 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019.

4. Surat Edaran Bupati Tanah Laut, sebanyak 2 dokumen yaitu :
 - a. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor : 910/2678/BPKAD tanggal 27 Agustus 2019 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/ RKA-PPKD APBD Tahun Anggaran 2019.
 - b. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor : 910/2505/BPKAD tanggal 10 Agustus 2019 tentang Pedoman Penyusunan RKAP-SKPD/ RKAP-PPKD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
- B. Untuk pemenuhan data pembuatan dokumen APBD TA. 2020 dan Perubahan APBD TA. 2019 diperlukan pula data, dokumen ataupun alat bantu yaitu berupa :
1. Berita Acara Kesepakatan Antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Tanah Laut terhadap KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2020.
 2. Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Tanah Laut terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020.
 3. Berita Acara Kesepakatan Antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Tanah Laut terhadap KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
 4. Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Tanah Laut terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
 5. RKA yang telah dientry melalui Aplikasi SIMDA Keuangan.
- C. Dasar Pelaksanaan APBD :
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2020
 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2019

3. Permasalahan dan upaya pemecahan masalah :

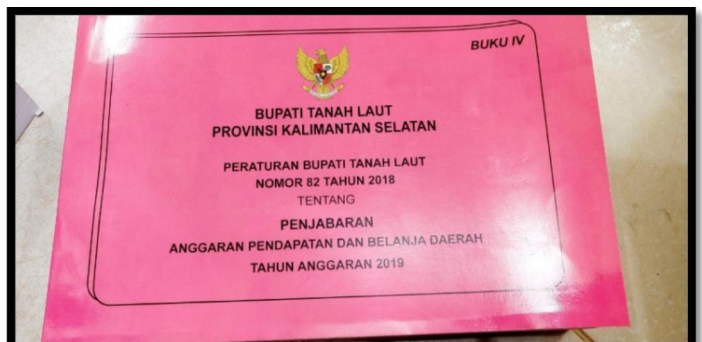
A. Permasalahan

Pelaksanaan kegiatan Pembahasan KUA-PPAS maupun Rancangan APBD antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD biasanya diselesaikan pada akhir waktu yang ditetapkan oleh ketentuan perundangan, sehingga kemungkinan untuk terjadi kekeliruan pada tahapan selanjutnya menjadi lebih besar.

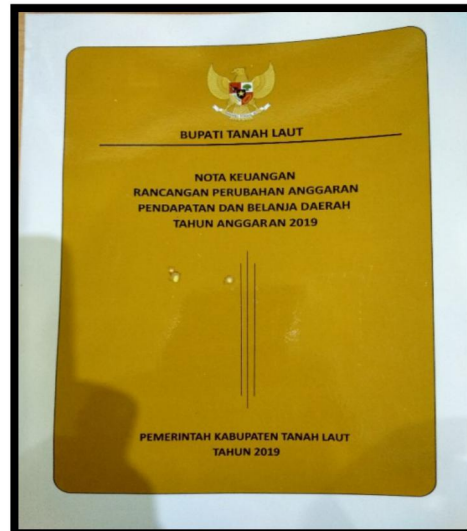
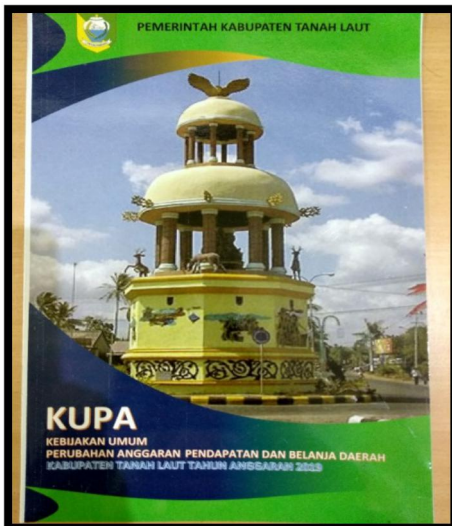
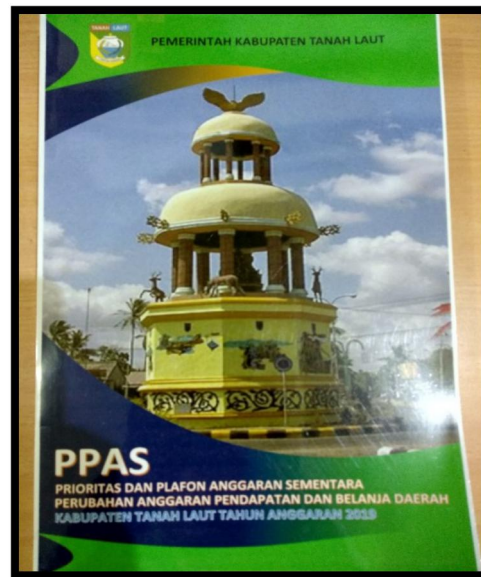
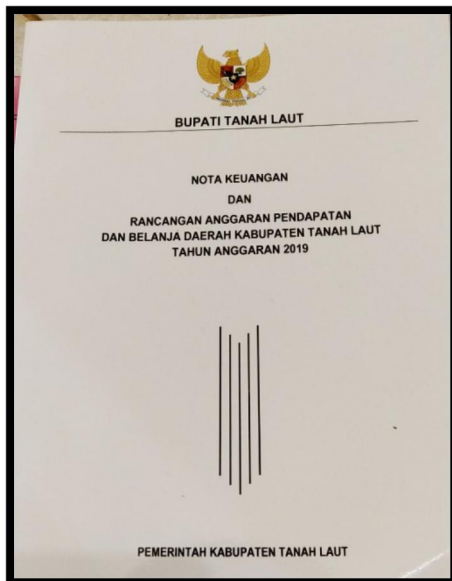
B. Upaya Pemecahan Masalah

Karena pelaksanaan tahapan/proses penyusunan APBD melibatkan banyak pihak diantaranya Badan Anggaran DPRD, TAPD, Inspektorat dan SKPD sehingga kekeliruan berupa kurang lengkapnya data maupun informasi sulit untuk dihindari, hal ini bisa diminimalkan dengan koordinasi yang lebih baik diantara pihak-pihak yang terkait.

Foto-foto kegiatan Subbid Anggaran Dokumen APBD Tahun Anggaran 2019



Dokumen P-APBD Tahun Anggaran 2019



Sosialisasi Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2020



Rapat-Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah



Pembahasan RKA SKPD dan RKA PPKD Tahun Anggaran 2020



7.4. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 4

Sasaran strategis nomor 4 adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan dengan tabel pencapaian sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4
Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi	
4	Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	4	Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100
			Rata-rata capaian kinerja				100.00			100.00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100 %. Untuk mendukung sasaran strategis Kepala Bidang Pembiayaan nomor 4 ini Indikator sasaran dilaksanakan oleh 2 (dua) Kasubbid yaitu Kasubbid Perbendaharaan dan Verifikasi dan Kasubbid Pembiayaan dengan pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2019 dan pencapaian Program dan Kegiatan sesuai DPA Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut dibawah ini.

Kasubbid Perbendaharaan dan Verifikasi BPKAD Kabupaten Tanah Laut

1. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2019

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi Tahun 2019 sebagai berikut :

Program/Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi			
				Fisik		Keuangan	
				Kinerja	%	Rp	%
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan Peningkatan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah.	Terlaksana dan terfasilitasinya penerbitan SP2D, tersusunnya Peraturan Bupati, SK. Bupati, SE. Bupati, Laporan DAU Gaji, Taperum, IWP BPJS Kesehatan dan Laporan IWP Taspen, JKK, JKM Taspen serta terlaksananya pembinaan terhadap penatausahaan keuangan SKPD	9 Dokumen (4000 SP2D, 1 Perbup, 20 SK Bupati, 2 SE Bupati	188.777.100	9 Dokumen (6000 SP2D, 1 Perbup, 20 SK Bupati, 2 SE Bupati	100	Rp.152.507.750	80,79

2. Capaian Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Pencapaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi Tahun 2019 yang telah dilaksanakan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

	Kinerja utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penerbitan SP2D, penatausahaan keuangan daerah yang tertib sesuai dengan Per UU-an dan sebagai bahan dokumen pertanggungjawaban	Jumlah SP2D, SP2B, SPB, Daftar Penguji dan SKPP yang diterbitkan sesuai ketentuan.	<ul style="list-style-type: none"> • 4.000 SP2D • 798 SP2B • 558 SPB • 400 daftar penguji 	<ul style="list-style-type: none"> • 6.000 SP2D • 240 SP2B • 636 SPB • 728 Daftar Penguji 	<ul style="list-style-type: none"> • 150% • 30,08% • 113,98% • 182%
2	Melaksanakan perhitungan pembayaran JKK-JKM dan IWP 3% sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Perhitungan Pembayaran JKK-JKM dan IWP 3% sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> • 24 Laporan JKK • 24 Laporan JKM • 24 Laporan IWP 3% 	<ul style="list-style-type: none"> • 24 Laporan JKK • 24 Laporan JKM • 24 Laporan IWP 3% 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • 100% • 100%
3	Melaksanakan sosialisasi penatausahaan keuangan untuk Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Bendahara Pengeluaran SKPD yang disosialisasikan tentang penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	55 Bendahara Pengeluaran	55 Bendahara Pengeluaran	100%
4	Melaksanakan monitoring penatausahaan keuangan SKPD sesuai ketentuan	Jumlah SKPD yang termonitoring dalam penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%
5	Melaksanakan koordinasi/konsolidasi/evaluasi dengan stakeholder mengenai penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Stakeholder yang melakukan koordinasi/konsolidasi/evaluasi dengan stakeholder mengenai penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	43 Stakeholder	43 Stakeholder	100%

3. Analisa capaian kinerja sesuai Program dan Kegiatan serta Perjanjian Kinerja

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan Kegiatan Peningkatan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah pagu anggaran sebesar Rp 188.777.100 dengan realisasi sebesar Rp 152.507.750 atau sebesar 80,79% namun realisasi kinerja 9 dokumen tercapai 100%

Sedangkan analisa capaian kinerja lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah telah dikeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu tentang :

1. Peraturan Bupati, sebanyak 4 dokumen
2. Surat Keputusan Bupati, sebanyak 12 dokumen
3. Surat Edaran Bupati, sebanyak 1 dokumen

Dari ketiga peraturan tersebut telah diterbitkan :

1. Peraturan Bupati, sebanyak 4 dokumen yaitu tentang :

- a. Peraturan Bupati Tanah Laut tentang ketentuan biaya perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak tetap dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- b. Peraturan Bupati Tanah Laut tentang ketentuan biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- c. Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pengelolaan Rekening Bendahara SKPD/SKPKD.
- d. Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di lingkungan Kabupaten Tanah Laut.

2. Keputusan Bupati, sebanyak 12 dokumen yaitu tentang :

- a. Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Selaku Pengguna Anggaran.

- b. Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- c. Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Tanah Laut
- d. Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Kabupaten Tanah Laut.
- e. Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- f. Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penunjukan Bank Kalsel Cabang Pelaihari sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut
- g. Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penunjukan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pelaihari sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut
- h. Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Tanah Laut.
- i. Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan (UP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanah Laut.
- j. Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Tanah Laut.
- k. Keputusan Bupati Tanah Laut tentang penggantian Kuasa Pengguna Anggaran.

I. Keputusan Bupati Tanah Laut tentang penggantian Bendahara Pengeluaran.

3. Surat Edaran Bupati :

a. Surat Edaran Bupati Tanah Laut tentang Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

B. Untuk penyajian laporan dan bahan rekonsiliasi diperlukan data dari :

1. Realisasi data gaji yang dihimpun dari 40 SKPD melalui aplikasi Simgaji Taspen.
2. Realisasi SP2D dari aplikasi Simda Keuangan.

Dari data tersebut menghasilkan dokumen berupa :

1. Realisasi pembayaran iuran Wajib Pegawai 2 % BPJS Kesehatan.
2. Realisasi pembayaran iuran Wajib Pegawai 8 % Taspen.
3. Realisasi pembayaran iuran Wajib Pegawai 3 % kewajiban Pemerintah Daerah selaku Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan.
4. Realisasi pembayaran Taperum.
5. Realisasi data gaji untuk perhitungan DAU.

C. Penerbitan SP2D terdiri dari :

1. SP2D-UP (Uang Persediaan).
2. SP2D-GU (Ganti Uang Persediaan)
3. SP2D-BTL-GJ (Belanja Tidak Langsung) untuk pembayaran Gaji
4. SP2D-BTL-LS (Belanja Tidak Langsung) untuk pembayaran tunjangan kinerja, dana desa, hibah dll.
5. SP2D-LS (Belanja Langsung) untuk pembayaran belanja barang jasa kepada pihak ketiga.

4. Permasalahan dan upaya pemecahan permasalahan :

a. Permasalahan :

1. Gangguan pada aplikasi karena lampu mati, sehingga penyelesaian pekerjaan tertunda.
 2. Sambungan internet yang tidak stabil sehingga pengentrian aplikasi terganggu dan pengiriman data tertunda.
 3. Pada aplikasi simda keuangan terakhir/terbaru, dalam hal melaksanakan print data dari aplikasi sangat lambat, sehingga perlu waktu lama dalam mencetak SP2D.
- b. Upaya Pemecahan Masalah.
1. Tersedia mesin genset untuk mendukung dan kelancaran tugas.
 2. Perlu dukungan sambungan internet yang lancar.
 3. Perlu dukungan aplikasi yang simpel dalam hal mencetak SP2D untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan.
5. Rencana aksi dalam rangka peningkatan penatausahaan keuangan daerah :
- a. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Gaji ASN sehingga pelaporan gaji dapat disampaikan tepat waktu. Hal ini dalam rangka persyaratan penyaluran Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.
 - b. Melaksanakan Bimbingan Teknis SIMDA Keuangan mengingat banyak Bendahara Pengeluaran yang berganti sehingga dapat mengimplementasi Aplikasi SIMDA Keuangan secara professional.
 - c. Mengikuti Diklat bagi Aparatur pada Kuasa BUD khususnya terkait penerapan aturan pengadaan barang/jasa maupun Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah.
 - d. Sedangkan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada Subbid Perbendaharaan dan Verifikasi yaitu dalam hal penyerapan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.746.912.704.093,00,- dengan realisasi belanja sebesar Rp 1.498.174.259.705,95 ,- atau 85,76%,, sedangkan pada tahun 2018 pagu anggaran sebesar Rp 1.588.171.203.597,00,- dengan realisasi sebesar Rp 1.350.553.289.307,60 ,- atau 85,04%, sehingga pada tahun 2019 penyerapan anggaran belanja mengalami kenaikan sebesar 0,72%, hal ini

disebabkan adanya kebijakan rasionalisasi/efisiensi keuangan daerah namun secara kinerja rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini setiap tahunnya melebihi target yang telah ditetapkan.

Foto-foto kegiatan pada Subbid Perbendaharaan



Kasubbid Pembiayaan BPKAD Kabupaten Tanah Laut

Pencapaian kinerja Program dan Kegiatan Kasubbid Pembiayaan Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Administrasi Pembiayaan Daerah	Rp. 437.755.000,00	Rp. 235.628.280,00	53,83 %
			1 kumpulan dokumen bansos/hibah, dana bagi hasil, bantuan keuangan, penyertaan modal dan kegiatan sosialisasi serta dokumen-dokumen laporan belanja tidak langsung PPKD	1 kumpulan dokumen bansos/hibah, dana bagi hasil, bantuan keuangan, penyertaan modal dan kegiatan sosialisasi serta dokumen-dokumen laporan belanja tidak langsung PPKD	100%

Pencapaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Kasubbid Pembiayaan Tahun 2019

No	Kinerja Utama	Indikator Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Melaksanakan penyediaan bahan penganggaran BTL-PPKD dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	Jumlah dokumen penganggaran BTL-PPKD dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	100%

2	Melaksanakan pelayanan penyaluran dana BTL-PPKD sesuai ketentuan	Jumlah pemohon yang menerima dana BTL-PPKD sesuai ketentuan	821 orang	2.238 orang	278,68%
3	Melaksanakan sosialisasi penatausahaan pembiayaan daerah bagi Aparatur Desa sesuai ketentuan	Jumlah aparatur desa yang mengikuti dan memahami sosialisasi penatausahaan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	130 orang	119 orang	91,53%
4	Melaksanakan penerbitan SPP-SPM dana BTL-PPKD sesuai ketentuan	Jumlah SPP-SPM dana BTL-PPKD yang diterbitkan sesuai ketentuan	1.341 dokumen	1.547 dokumen	115,36%
5	Melaksanakan pembinaan bagi penerima hibah dan bansos serta SKPD sesuai ketentuan	Jumlah penerima hibah dan bansos serta SKPD yang mengikuti dan memahami sosialisasi sesuai ketentuan	15 orang	15 orang	100%
6	Melaksanakan koordinasi dengan SKPD yang melakukan monitoring terkait penyaluran dana hibah dan bansos sesuai ketentuan	Jumlah SKPD yang menerima dana hibah dan bansos yang terkoordinasi sesuai dengan ketentuan	6 SKPD	6 SKPD	100%
7	Melaksanakan monitoring terkait penyaluran dana BTL-PPKD sesuai ketentuan	Jumlah penerima dana BTL-PPKD yang termonitor sesuai ketentuan	821 orang	2.238 orang	278,68%
8	Melaksanakan penyusunan Laporan Pembiayaan Daerah sesuai ketentuan	Jumlah dokumen Laporan Pembiayaan Daerah yang dilaporkan sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	100%

1. Analisa capaian kinerja Program dan Kegiatan serta Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Untuk realisasi program dan kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 437.755.000,00 dengan realisasi sebesar Rp . 235.628.280,00 atau capaian 53,83%, kemudian target kinerja 1 Dokumen terealisasi 100% dan serapan keuangan hanya terealisasi 53,83%, sedangkan yang tidak terealisasi sebesar 46,17% yaitu belanja cetak tidak direalisasikan semua dikarenakan pembuatan SPP dan SPM yang mana menggunakan belanja cetak disesuaikan dgn usulan pencairan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan dana bagi hasil. Untuk bantuan sosial kepada siswa SD dan siswa SMP dengan target sebanyak 4.103 orang yang terealisasi hanya 445 orang. Hal ini dikarenakan sesuai dengan

LAKIP BPKAD TAHUN 2019

usulan dari SKPD bersangkutan, dan dilihat dari kelengkapan berkas bantuan sosial tersebut dan belanja perjalanan dinas dalam daerah tidak terealisasi semua karena menyesuaikan dengan acara manunggal tuntung pandang serta undangan dari desa bersangkutan,

2. Sedangkan analisa pencapaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2019 Kasubbid Pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Organisasi kemasyarakatan biasanya menyampaikan proposal tidak tepat waktu, proposal disampaikan pada saat Rancangan KUA dan PPAS sudah disampaikan ke DPRD, atau saat penyusunan APBD telah selesai dilaksanakan.
- 2) Proposal disampaikan tidak pada SKPD yang tepat, sehingga terabaikan.
- 3) Proposal tidak dilengkapi dengan berkas administrasi pendukung.
- 4) Organisasi tidak memenuhi syarat sebagai penerima hibah dan bantuan sosial.
- 5) Penggunaan dana hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan RAB yang telah di usulkan.
- 6) Penyampaian usulan pencairan dana bantuan sosial dilakukan pada minggu ke-2 bulan Desember, sehingga masih terdapat penyaluran di akhir Desember yang seharusnya pada akhir Desember tidak ada lagi penyaluran dana bantuan sosial.
- 7) Kurangnya kemampuan SKPD dalam mengelola waktu penyampaian usulan pencairan dana bantuan sosial sehingga dana bantuan sosial tidak tersalur 100%.
- 8) Kurangnya kemampuan SKPD dalam mengelola waktu penyampaian usulan pencairan dana bantuan sosial sehingga dana bantuan sosial tidak tersalur 100%.

Permasalahan dan upaya Pemecahan masalah

a. Permasalahan

- a) Hibah dan Bantuan Sosial

Dalam pelaksanaannya sebagian besar telah sesuai dengan Peraturan Bupati dan Standar Operasional Prosedur, namun terkadang masih ada kendala pada organisasi kemasyarakatan maupun SKPD terkait, di antaranya yaitu :

- 1) Organisasi kemasyarakatan biasanya menyampaikan proposal tidak tepat waktu, proposal disampaikan pada saat Rancangan KUA dan PPAS sudah disampaikan ke DPRD, atau saat penyusunan APBD telah selesai dilaksanakan.
- 2) Proposal disampaikan tidak pada SKPD yang tepat, sehingga terabaikan.
- 3) Proposal tidak dilengkapi dengan berkas administrasi pendukung.
- 4) Organisasi tidak memenuhi syarat sebagai penerima hibah dan bantuan sosial.
- 5) Penggunaan dana hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan RAB yang telah di usulkan.
- 6) Penyampaian usulan pencairan dana bantuan sosial dilakukan pada minggu ke-2 bulan Desember, sehingga masih terdapat penyaluran di akhir Desember yang seharusnya pada akhir Desember tidak ada lagi penyaluran dana bantuan sosial.
- 7) Kurangnya kemampuan SKPD dalam mengelola waktu penyampaian usulan pencairan dana bantuan sosial sehingga dana bantuan sosial tidak tersalur 100%.

b) Hibah kepada BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.

Hibah kepada BOP PAUD dan BOP Kesetaraan adalah hibah yang bersumber dari DAK Khusus Non Fisik yang dilakukan secara 2 (dua) tahap, penerima hibah masih ada yang belum mempedomani Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Khusus Non Fisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan Tahun 2019 terutama pada komponen pembiayaan dan ketidaksesuaian antara *listing* Kemdikbud dengan jumlah peserta didik yang tercatat pada Apo PAUD-Dikmas.

c) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan

Dalam pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan kepada Desa maupun Partai Politik juga sudah berpedoman pada peraturan perundangan-undangan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tanah Laut, kendala yang sering dihadapi adalah kurang pemahamnya aparat desa tentang siskeudes dan laporan pertanggung jawaban.

b. Upaya Pemecahan Masalah

- 1) Telah dilaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati dan SOP tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, kepada SKPD yang langsung berkaitan dengan masyarakat pemohon hibah dan bantuan sosial agar di informasikan kepada masyarakat.
- 2) Melayani SKPD dan masyarakat yang konsultasi tentang hibah dan bantuan sosial
- 3) Menyampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut agar mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada calon penerima hibah
- 4) Melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan dana desa khususnya terkait penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan serta memberikan arahan pada kegiatan Manunggal Tuntung Pandang.

Foto-foto Kegiatan pada Subbid Pembiayaan





7.5. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 5

Sasaran strategis nomor 5 adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Akuntansi dengan tabel pencapaian sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5
Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi	
5	Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan	5	Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100
			Rata-rata capaian kinerja				100.00			100.00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100 % baik pada tahun 2018 maupun pada tahun 2019.. Untuk mendukung sasaran strategis Kepala Bidang Akuntansi nomor 5 Indikator sasaran ini dilaksanakan oleh Kasubbid Pengelolaan Kas, Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban dan Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Piutang dengan pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2019 dan pencapaian Program dan Kegiatan sesuai DPA Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut dibawah ini.

Kasubbid Pengelolaan Kas

Pada tahun 2014 Laporan Keuangan SKPD berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual), sehingga capaian kinerja hanya mencapai 50%, karena Laporan Keuangan SKPD belum sepenuhnya berbasis akrual.

Mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos Ekuitas Dana pada Neraca

per 31 Desember 2014 yang berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual) dan pada tahun 2015 direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai akuntansi berbasis akrual. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 dibuat berdasarkan Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, adapun yang membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 ini adalah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yaitu BPKAD Kabupaten Tanah Laut. Demikian juga pada tahun 2016,tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 Laporan Keuangan SKPD berbasis akrual telah disampaikan oleh seluruh SKPD dan telah di Audit oleh BPK – RI dan telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 (enam) tahun berturut-turut terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis akrual..Dengan demikian bahwa pelaporan keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berbasis Akrual dapat dijamin terpenuhi 100%.

Pencapaian kinerja Program dan Kegiatan Kasubbid Pengelolaan Kas Tahun 2019

NO	PROGRAM KEGIATAN	OUTPUT DALAM DPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2019	REALISASI			
					FISIK		KEUANGAN	
					KINERJA	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Kegiatan Penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	8 Dokumen berupa : Raperda Pertanggungjawaban Unaudited,Raperbup pertanggungjawaban UnAudited,Raperda dan Raperbup pertannngunjawaban Audited,LKPD Un Audited, LKPD Audited,Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Audited.	100%	215,812,750,-	8 dok	100%	185,803,900,-	86%
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	2 Dokumen : Laporan SIKD dan Kebijakan Akuntansi revisi 3	100%	219,921,800,-	2 Dok	100%	212,647,100,-	97%

Pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Kasubbid Pengelolaan Kas Tahun 2019

	KINERJA UTAMA	INDIKATOR UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Melaksanakan Rekonsultasi kasda SKPKD	Jumlah kas SKPKD yg telah direkonsiliasi	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	Melaksanakan Pembinaan Perda Pertanggungjawaban Keuangan SKPD sesuai Ketentuan	Jumlah SKPD yang terbina dan memahami mekanisme Pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan	42 SKPD	42 SKPD	100%
3	Melaksanakan fasilitasi terhadap pelayanan laporan keuangan sesuai ketentuan	Jumlah SKPD yang terfasilitasi dalam penyusunan Laporan keuangan sesuai ketentuan	42 SKPD	42 SKPD	100%
4	Melaksanakan Monitoring kas SKPD sesuai ketentuan	Jumlah kas SKPD yg termonitor sesuai ketentuan	42 SKPD	42 SKPD	100%
5	Melaksanakan Konsolidasi laporan Keuangan Akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun LKPD,Lap Jkn,BOS,Lap SIKD dan lap simolek	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
6	Melaksanakan penyusunan LKPD, Raperda , Raperbup, Perda dan Perbup pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen LKPD UN Audited,Audited, Raperda dan RaperbupPerda dan perbup pertanggungjawaban APBD	6 Dokumen	6 Dokumen	100%

Analisa pencapaian kinerja program dan kegiatan Kasubbid Pengelolaan Kas Tahun 2019.

Dalam kegiatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD dokumen yang dihasilkan berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Tanah Laut (LKPD), Un Audited dan Audited, Laporan Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Un Audited dan Audited.

Capaian kinerja keuangan pada kegiatan ini mencapai 87,9 % dimana seluruh Output Kinerja telah tercapai 100% dimana capaian terendah pada kegiatan penggandaan hanya terserap 59,16% hal ini menjadi perhatian penting dalam evaluasi kinerja Subbidang Akuntansi Pengelolaan Kas dikarenakan ada beberapa hal sebab diantaranya penambahan pada kegiatan dimaksud pada APBD- perubahan yang bersamaan dengan kegiatan- kegiatan lain disaat bersamaan, sehingga angka serapannya menjadi rendah, Namun ditahun depan akan dilaksanakan lebih cepat diawal tahun untuk kegiatan dimaksud sehingga tidak menumpuk diakhir tahun.

Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana telah diubah dengan PP No 56 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan daerah diatur bahwa LPP APBD Tahun 2015 dan Tahun 2016 yang memuat laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat 31 Agustus 2018 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa batas waktu penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya yaitu paling lambat pada tanggal 31 Agustus.

Pada tahun 2014 penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2013 disampaikan kepada BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan dengan bukti surat pengantar nomor : 900/403/IV-DPPKA.TL/2014 pada tanggal 10 April 2014. Kemudian pada tahun 2015 penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2014 disampaikan kepada BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan dengan bukti surat pengantar nomor : 900/282/DPPKA/III/2015 tanggal 30 Maret 2015. Pada tahun 2016 penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun

2015 disampaikan kepada BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan dengan bukti surat pengantar nomor : 900/297/DPPKA/2016 tanggal 24 Maret 2016.

Pada tahun 2017 Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 dan telah disampaikan ke Kementerian Keuangan dengan surat pengantar nomor 900/811/BPKAD-VIII/2017 pada tanggal 25 Agustus 2017.

Sedangkan pada tahun 2018 Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 dan telah disampaikan ke Kementerian Keuangan dengan surat pengantar nomor 900/811/BPKAD-VIII/2018 pada tanggal 31 Agustus 2018, sehingga dengan demikian penyampaian tepat waktu 100%.

Pada tahun 2019 Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 dan telah disampaikan ke Kementerian Keuangan, sehingga dengan demikian penyampaian tepat waktu 100%.

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah dilaksanakan oleh Subbid Akuntansi Pengelolaan Kas dengan hasil telah terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang accountable dan dapat diterima oleh publik Tahun 2019 dengan hasil audit BPK RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Data yang dibutuhkan dalam penyusunan tersebut berasal dari data 45 SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

1. Permasalahan/ kendala dan upaya pemecahan masalah
 - a. Permasalahan/ kendala :

1. Data dukung untuk realisasi anggaran pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) lamban masuk ke BPKAD dan data yang masuk masih mengalami penyesuaian-penyesuaian sehingga perlu waktu untuk memproses data tersebut agar siap masuk ke Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 2. Data untuk piutang BLUD RS. H. Boejasin datanya masih sering berubah-ubah
 3. Data Belanja Modal yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah masih terdapat salah klasifikasi, sehingga masih diperlukan koreksi ulang dari bidang Aset untuk data tersebut sebelum bisa di Proses untuk masuk ke Neraca.
- b. Upaya Pemecahan
1. Meningkatkan koordinasi dengan bidang terkait dan SKPD terkait yang menangani data tersebut.
 2. Merencanakan FGD mencari pemecahan masalah yang dihadapi baik di SKPD maupun PPKD.
 3. Menjalin komunikasi yang intensif dengan BPKP sebagai pendamping dalam penyusunan LKPD.
2. Rencana Aksi
1. Pemantauan pelaksanaan pencatatan transaksi realisasi penggunaan dana Bos termasuk pengklasifikasian Belanja Modalnya (Rekon Dana Bos) per triwulan dengan koordinator BOS di Disdik
 2. Rekon untuk data kas di Dana Kapitasi JKN, BLUD untuk tahun berjalan setiap triwulan.
 3. Melaksanakan FGD sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi

Foto-foto kegiatan dibawah ini :





Pada kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Realisasi Kinerja Keuangan Mencapai 96,78% sementara untuk realisasi fisik dalam bentuk dokumen yaitu Laporan Sinergi dan Simpati yang disampaikan kepada Kementrian Keuangan 100 % tercapai, Namun untuk serapan yang masih kurang yaitu realisasi perjalanan dinas dikarenakan adanya penambahan anggaran, namun pelaksanaan diakhir tahun terkendala waktu persiapan penyusunan Laporan Akhir Tahun.

Telah terlaksananya penanaman dan dapat mengimplementasikan sistem pengelolaan keuangan berbasis akrual berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang standar SAP diseluruh SKPD sebagai entitas akuntansi Pemerintah Daerah melalui SIMDA Versi 2.7, realisasi untuk pelaksanaan simcloud sudah terlaksana 100%, dimana setiap bulan laporan Sinergi dan Simpatik dalam Komponen SIKD telah terlaksana seluruhnya.

Permasalahan/ kendala dan upaya pemecahan masalah

1. Seringnya gangguan terhadap jaringan internet yang mengganggu kegiatan dan pelaksanaan Aplikasi keuangan seluruh SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia pengelola jaringan Teknik jaringan Komputer sebagai pengelola Sistem ITUpaya Pemecahan

Mengikutsertakan pegawai yang menangani masalah jaringan untuk mengikuti workshop peningkatan pengetahuan, keterampilan dan keahlian dalam bidang system aplikasi jaringan.

Rencana Aksi

- a. Pelaksanaan workshop dalam rangka Peningkatan Keahlian Jaringan Komputer bekerjasama dengan pihak Lawang Sewu sebagai provider jasa layanan aplikasi keuangan pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- b. Study Banding kedaerah lain yang sudah lebih dahulu menjalankan aplikasi serupa.

Foto-foto kegiatan dibawah ini :



Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Piutang

1. Pencapaian Program dan Kegiatan Kasubbid Pendapatan dan Piutang

PROGRAM KEGIATAN	OUTPUT DALAM DPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2019	REALISASI			
				FISIK		KEUANGAN	
				KINERJA	%	Rp	%
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
Kegiatan Pengelolaan akuntansi pendapatan dan piutang	3 Dok	100%	193,680,050.00	3 Dok	100%	177,643,085.00	91.72

2. Pencapaian Perjanjian Kinerja Kasubbid Pendapatan dan Piutang

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR UTAMA	URAIAN	TARGET	REALISASI FISIK	CAPAIAN %
1	Melaksanakan Rekonsiliasi pendapatan dan piutang sesuai ketentuan	Jumlah SKPD pengelola Pendapatan dan Piutang yang telah melakukan rekonsiliasi sesuai ketentuan	Rekonsiliasi Pendapatan dan Piutang telah dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu Rekon TW IV Tahun 2018, TW I Tahun 2019 dan TW 2 Tahun 2019 yang diikuti oleh 26 SKPD yang mengelola	26 SKPD (4 kali)	26 SKPD (4 kali)	100%
2	Melaksanakan Pembinaan Bendahara Penerimaan SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Bendahara Penerimaan yang terbina dan memahami mekanisme pelaporan keuangan sesuai ketentuan	- FGD Bendahara Penerimaan sudah dilaksanakan pada awal tahun 2019 dan	1 Kali	100% (1 kali)	100%
3	Melaksanakan fasilitasi terhadap stakeholder dalam penyelesaian kerugian daerah sesuai ketentuan	Jumlah stakeholder yang difasilitasi dalam penyelesaian kerugian daerah sesuai ketentuan	- Rapat Penyelesaian Kerugian Daerah sudah dilakukan 100%	6 kali	10 kali	166%
			- Surat Tagihan kepada Pihak Ketiga sudah disampaikan setiap bulan	50 surat	96 Surat	192%
			- Besarnya kerugian daerah yang tertagih	7,919,170,220.52	1,691,628,523.65	21,37%
			- Laporan TPKD telah disampaikan kepada Bupati per 19 Agustus 2019	2 laporan	1 laporan	50%
			- Laporan Bulanan TPKD kepada BPK telah terrealisasi	6 laporan	5 laporan	83%
- Sosialisasi Permendagri Nomor 133 Tahun 2018	1 kali	1 kali	100%			
4	Melaksanakan monitoring SKPD yang mengelola pendapatan PPKD dan piutang sesuai ketentuan	Jumlah SKPD yang termonitoring pendapatan PPKD dan piutang sesuai ketentuan	pembinaan monitoring laporan bendahara penerimaan sudah dilaksanakan setiap bulan	26 SKPD/12 bulan	26 SKPD/12 bulan	100%
5	Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pendapatan dan Piutang Pemkab sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pendapatan dan Piutang Pemkab hasil konsolidasi sesuai ketentuan	telah tersusunnya Laporan Keuangan Pendapatan dan Piutang menghasilkan 3 dokumen yaitu : Laporan Keuangan Pendapatan dan Piutang TA 2018 Unaudit , Laporan Keuangan Pendapatan dan Piutang TA 2018 Audited dan Daftar Piutang Daerah TA 2018	3 dokumen	3 dokumen	100%
			- telah tervalidasi inputan pendapatan dan piutang SKPD pengelola pendapatan dan piutang	26 SKPD	26 SKPD	100%

3. Analisa Capaian Kinerja

- a. Jumlah SKPD pengelola Pendapatan dan Piutang yang telah melakukan rekonsiliasi sesuai ketentuan
Rekonsiliasi pendapatan dan piutang yang dilaksanakan dengan mengundang Bendahara Penerimaan se-Kabupaten Tanah Laut berjumlah 26 (dua puluh enam) SKPD sebanyak 4 kali (per-triwulan) yaitu Triwulan IV TA.2018, Triwulan I TA.2019, Triwulan II TA.2019, dan Triwulan III TA.2019. Realisasi Hasil rekonsiliasi pendapatan dan piutang sebanyak 4 (empat) dokumen, sesuai target.
- b. Jumlah Bendahara Penerimaan yang terbina dan memahami mekanisme pelaporan keuangan sesuai ketentuan.
Pembinaan terhadap Bendahara Penerimaan dari 26 (dua puluh enam) SKPD dilaksanakan dengan diselenggarakannya *Forum Group Discussion* (FGD) pada awal tahun anggaran 2019. Pembinaan dilakukan dengan mengundang narasumber dari BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Materi yang disampaikan adalah mengenai Pendapatan dan cara penginputan pendapatan di Aplikasi SIMDA Keuangan.
- c. Jumlah stakeholder yang difasilitasi dalam penyelesaian kerugian daerah sesuai ketentuan
Fasilitasi dalam penyelesaian kerugian daerah dengan diselenggarakannya Rapat-rapat Penyelesaian Kerugian Daerah.
- d. Jumlah SKPD yang termonitoring pendapatan PPKD dan piutang sesuai ketentuan
Monitoring pendapatan dilakukan dengan melakukan pembinaan dan monitoring ke 26 (dua puluh enam) SKPD
- e. Terlaksananya pemilihan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang Terbaik berdasarkan Peraturan Bupati

Tanah Laut Nomor 191 Tahun 2019 tentang Penghargaan Kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut .

4. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

a. Permasalahan

Masih ada beberapa Bendahara Penerimaan SKPD yang belum memahami Simda Keuangan, yang melakukan entry data penerimaan pembantu bendahara penerimaan atau pegawai PTT, sehingga bila ada kesalahan entry data yang ditemukan oleh Bidang Akuntansi BPKAD akan kesulitan menjelaskan perbedaan data/kesalahan entry data Antara Simda Keuangan dengan Rekening Koran Kas Daerah. Di samping itu kendala yang dihadapi oleh Bendahara Penerimaan dalam penginputan pendapatan adalah pada waktu menginput pendapatan untuk pengurangan piutang.

b. Upaya Pemecahan Masalah

- Memberikan pembinaan kepada Bendahara Penerimaan tersebut agar bisa memahami entry data penerimaan pada Simda Keuangan.
- Pemberian rewards kepada bendahara penerimaan terbaik yang mengelola pendapatan berdasarkan kriteria penilaian antara lain kepatuhan, ketepatan waktu, tidak mendapat sanksi disiplin, tingkat kehadiran, beban kerja, responsive dan komunikatif.

5. Rencana Aksi

- Mendata Bendahara Penerimaan yang belum memahami Simda Keuangan;
- Mengadakan diskusi permasalahan entry data penerimaan pada Simda Keuangan;

- Memberikan bantuan pembelajaran pemahaman Simda Keuangan kepada Bendahara Penerimaan.

6. Foto Capaian/Hasil Kegiatan 3 (tiga) Dokumen

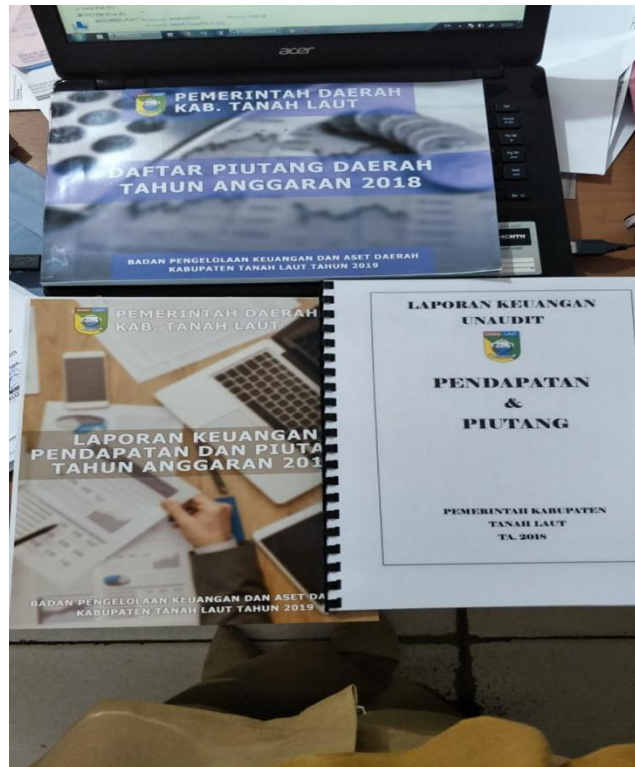
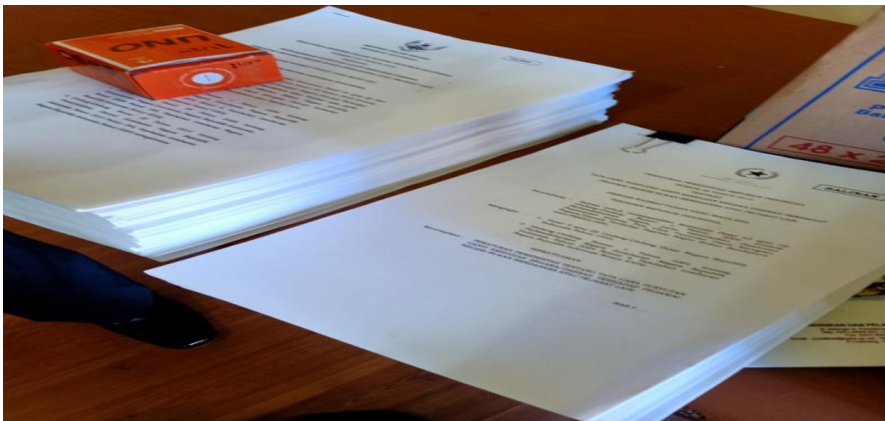


FOTO – FOTO KEGIATAN

RAPAT PEMBAHASAN RAPERBUP KERUGIAN DAERAH



BAHAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERBUP KERUGIAN DAERAH



RAPAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TANGGAL 19 SEPTEMBER 2019



**RAPAT PEMBAHASAN RAPERBUP KEBIJAKAN AKUNTANSI TANGGAL 17 DESEMBER
2019**



RAPAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TANGGAL 9 SEPTEMBER 2019



**REKONSILIASI TP TGR DENGAN BPK RI PERWAKILAN KALIMANTAN SELATAN
TANGGAL 11 SEPTEMBER 2019 SAMPAI DENGAN 12 SEPTEMBER 2019**



**REKONSILIASI DENGAN BENDAHARA PENERIMAAN TRIWULAN II TAHUN 2019
TANGGAL 16 JULI 2019 SAMPAI DENGAN 18 JULI 2019**



SOSIALISASI PERMENDAGRI 133 TAHUN 2018 TANGGAL 16 OKTOBER 2019



NARASUMBER DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI



**RAPAT PENILAIAN BENDAHARA PENERIMAAN TERBAIK TANGGAL 19 NOVEMBER
2019**



**RAPAT PENILAIAN BENDAHARA PENERIMAAN TERBAIK TANGGAL 27 NOVEMBER
2019**



**REKONSILIASI BENDAHARA PENERIMAAN TRIWULAN III TAHUN 2019 TANGGAL 5
NOVEMBER 2019 SAMPAI DENGAN 7 NOVEMBER 2019**



**PENYERAHAN HADIAH BENDAHARA PENERIMAAN TERBAIK
TANGGAL 2 DESEMBER 2019**



Laporan Kinerja Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban

1. Pencapaian Program dan Kegiatan Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban

Program/Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi			
				Fisik		Keuangan	
				Kinerja	%	Rp	%
<p>Pogram peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD, Laporan Keuangan semesteran dan Prognosis realisasi anggaran, serta laporan keuangan akhir tahun.</p>	<p>Tersedianya Laporan Pertanggungjawa ban Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Prognosis dan siklus laporan Keuangan Akhir Tahun anggaran</p>	4 Dok	Rp. 18.870.300	4 Dok	100	Rp. 17.942.700	95

	berkenaan					
--	-----------	--	--	--	--	--

Program/Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi			
				Fisik		Keuangan	
				Kinerja	%	Rp	%
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan akuntansi belanja dan beban.	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi Triwulanan, Laporan Keuangan Belanja dan Beban, Laporan DAK Fisik dan Laporan DAK Non Fisik	5 Dok	Rp. 216.758.500	5 Dok	100	Rp. 207.022.400	96

3. Capaian Perjanjian Kinerja Target dan Realisasi Tahun Anggaran 2019

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1. Menyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Prognosis serta Laporan Hasil Kegiatan	1. Jumlah laporan yang disusun berupa Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Prognosis serta Laporan Hasil Kegiatan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
2. Menyusun Laporan Rekonsiliasi Triwulanan, Laporan Keuangan Belanja dan Beban, Laporan DAK Fisik dan Laporan DAK Non Fisik serta Laporan Hasil Kegiatan	2. Jumlah laporan yang disusun berupa Laporan Rekonsiliasi Triwulanan, Laporan Keuangan Belanja dan Beban, Laporan DAK Fisik dan Laporan DAK Non Fisik serta Laporan Hasil Kegiatan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%

4. Analisa Pencapaian kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan :

- 1) Tersusunnya laporan keuangan berupa :
 - a. Bulanan dari bulan Januari sampai dengan Desember
 - b. Laporan triwulanan dari triwulan IV TA. 2018 sampai dengan triwulan III TA 2019
 - c. Laporan semesteran
 - d. Laporan Hasil Kegiatan
 - e. Laporan Penyusunan Keuangan Belanja dan Beban
 - f. Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
 - g. Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
- 2) Terlaksananya rekonsiliasi keuangan dari triwulan IV TA. 2018 sampai dengan triwulan III TA 2019 sebanyak 4 kegiatan dan rekonsiliasi belanja modal 2 kegiatan.
- 3) Terlaksananya rapat tim serta rapat terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik.
- 4) Terlaksananya kegiatan Foccus Group Discussion tentang Dana Alokasi Khusus dan tentang cloud aplikasi SIMDA.
- 5) Terlaksananya pembinaan, monitoring, koordinasi dan konsultasi terkait permintaan data maupun tentang penyusunan laporan keuangan rutin SKPD serta kendalanya.
- 6) Terlaksananya pemilihan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang Terbaik berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 191 Tahun 2019 tentang Penghargaan Kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Kendala/Permasalahan yang dihadapi

1. Laporan disusun setelah mendapatkan tanda tangan pimpinan, mengakibatkan proses penjilidan tidak tetap waktu,
2. Masih ada bendahara pengeluaran ketika rekonsiliasi, jadwalnya tidak sesuai waktu yang telah ditentukan,

3. Masih banyak bendahara yang belum paham tentang cara penjurnalan asset,
4. Kurangnya kerjasama antara PPTK, bendahara pengeluaran dan pengurus barang sehingga menghambat penyusunan LKPD.

A. Rencana Aksi yang akan dilakukan dalam rangka upaya perbaikan

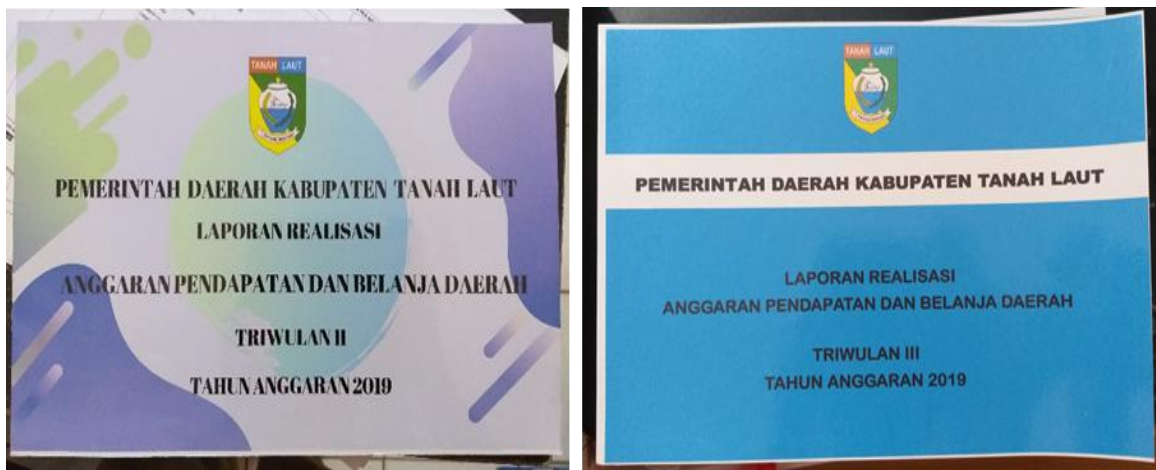
- 1) Melakukan koordiansi dengan pimpinan terkait penandatanganan laporan,
- 2) Mengingatkan kembali bendahara pengeluaran yang dianggap selalu lalai dalam pelaksanaan rekon,
- 3) Dilakukan pembinaan terhadap SKPD terkait langkah-langkah penjurnalan asset,
- 4) Melaksanakan pendekatan kepada PPTK, bendahara pengeluaran dan pengurus barang agar laporan disampaikan tepat waktu agar tidak menghambat penyusunan LKPD.

1. Foto-Foto Kegiatan

- 1) Laporan Bulanan



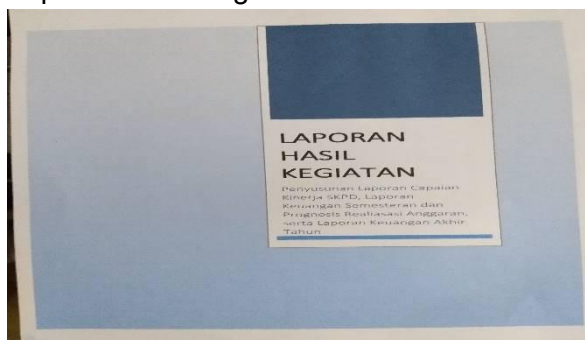
2) Laporan Triwulanan



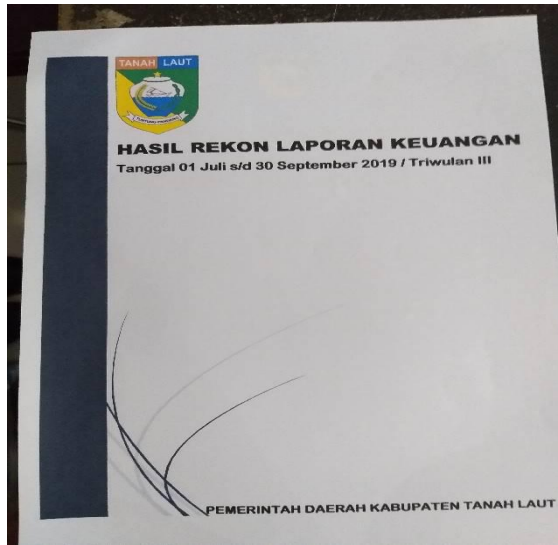
3) Laporan Semesteran



4) Laporan Hasil Kegiatan



5) Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan



6) Pelaksanaan Rekonsiliasi Keuangan Triwulan



7) Pelaksanaan Rekonsiliasi Belanja Modal



8) Pelaksanaan Focus Group Discussion



9) Pelaksanaan Rapat



7. 6. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 6

Sasaran strategis nomor 6 adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset dengan tabel pencapaian sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6
Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi	
6	Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	6	Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	%	100	100	100	87	100	114,95
		7	Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100
		8	Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100
			Rata-rata capaian kinerja				100.00			104,99

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan, Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan dan Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan pada tahun 2019 ini capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 104,99% dari tahun 2018 terdapat peningkatan kinerja sebesar 4,99%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 6 Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2019 dengan penjelasan dibawah ini.

Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan Aset

Pencapaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

Program/Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi			
				Fisik		Keuangan	
				Kinerja	%	Rp	%
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.	Tersedianya Permohonan sertifikat	45 permohonan	Rp. 661.489.400	45 permohonan	100	Rp. 542.614.689	82,03
Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah.	Tersedianya Permohonan Pembuatan BPKB duplikat	3 permohonan pembuatan BPKB duplikat		3 permohonan pembuatan BPKB duplikat			
	Tersedianya Papan Nama Kepemilikan	10 buah papan nama kepemilikan		10 buah papan nama kepemilikan			

	Tersedianya Patok Tanda Batas Tanah	36 buah patok tanda batas tanah		36 buah patok tanda batas tanah			
	Tersedianya buku rekapitulasi realisasi pemeliharaan	3 buku		3 buku			

Pencapaian Perjanjian Kinerja Target dan Realisasi Tahun Anggaran 2019

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1. Melaksanakan pengajuan permohonan penyertifikatan BMD (tanah) sesuai ketentuan	1. Jumlah BMD (Tanah) yang telah memenuhi persyaratan penyertifikatan sesuai ketentuan	45 persil BMD	45 persil BMD	100%
2. Melaksanakan pengajuan permohonan BPKB duplikat sesuai ketentuan	2. Jumlah BMD (Kendaraan Bermotor) yang telah memenuhi persyaratan Duplikasi BPKB sesuai ketentuan	3 buah BMD	3 buah BMD	100%
3. Melaksanakan Rekonsiliasi/Verifikasi Pemeliharaan BMD sesuai ketentuan	3. Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi/verifikasi pemeliharaan BMD sesuai ketentuan	41 SKPD	41 SKPD	100%
4. Melaksanakan Penelusuran BMD yang Belum Jelas Lokasinya sesuai ketentuan	4. Jumlah BMD yang ditelusuri sesuai ketentuan	50 lokasi penelusuran	40 lokasi penelusuran	80%
5. Melaksanakan Pemeliharaan BMD-PPKD sesuai ketentuan	5. Jumlah BMD-PPKD yang dipelihara sesuai ketentuan	10 buah BMD	16 buah BMD	160%
6. Melaksanakan	Jumlah BMD-PPKD yang	10 buah BMD	10 buah BMD	100%

Penguasaan Fisik BMD-PPKD sesuai ketentuan	dikuasai fisiknya sesuai ketentuan			
7. Melaksanakan monitoring BMD yang dikuasai sesuai ketentuan	Jumlah BMD yang dikuasai dimonitoring sesuai ketentuan	60 kali BMD	73 kali	121,67%

Analisa Pencapaian kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan :

1. Terlaksananya pengamanan hukum tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berupa penyertifikatan Tanah Milik Daerah dari target sebesar 45 permohonan sertifikat pada tahun anggaran 2019, realisasi sebanyak 45 permohonan yang sudah dimasukkan ke Kantor Pertanahan Kab. Tanah Laut. Permohonan penyertifikatan tersebut meliputi tanah yang berlokasi di Kecamatan Pelaihari sebanyak 13 persil, Kecamatan Kurau sebanyak 4 persil, Kecamatan Takisung sebanyak 7 persil, Kecamatan Batu Ampar sebanyak 5 persil, Kecamatan Bumi Makmur sebanyak 3 persil, Kecamatan Kintap sebanyak 4 persil, Kecamatan Tambang Ulang sebanyak 2 persil, Kecamatan Bati-Bati sebanyak 1 persil dan Kecamatan Panyipatan sebanyak 6 persil.
2. Terlaksananya pengamanan Hukum Kendaraan Dinas Bermotor berupa pembuatan BPKB duplikat dari target 3 permohonan BPKB duplikat, realisasi sebanyak 3 permohonan dan BPKB duplikat tersebut sudah terbit pada tanggal 23 Juli 2019. Dan pembuatan BPKB duplikat akan kembali dilanjutkan di Tahun Anggaran 2020.
3. Terlaksananya rekonsiliasi pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilakukan terhadap 41 SKPD dan dilaksanakan sebanyak 5 kali di Tahun Anggaran 2019.
4. Terlaksananya Pengamanan Tanah Milik Daerah berupa penelusuran tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tercatat dineraca aset namun belum jelas lokasinya, dari target 50 persil tanah yang belum dijelas lokasinya 40 persil tanah sudah ditemukan lokasinya. Hasil penelusuran tersebut akan dilaporkan dalam bentuk dokumen.

5. Terlaksananya pemeliharaan atas bangunan dan gedung PPKD berupa rumah dinas milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebanyak 6 unit rumah dinas.
6. Terlaksananya pemeliharaan atas peralatan dan mesin PPKD berupa kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebanyak 10 buah kendaraan dinas.
7. Terlaksananya Penguasaan Fisik BMD-PPKD / Pengamanan Fisik atas Tanah Milik Daerah berupa :
 - Pemasangan Papan Nama Kepemilikan sebanyak 10 buah dengan rincian sebagai berikut : 1 buah di tanah peruntukkan Objek Wisata Air Terjun Bajuin, 1 buah di tanah peruntukkan Objek Wisata Pantai Takisung, 1 buah di tanah peruntukkan SDN Batakan 3 Filial, 1 buah di tanah peruntukkan rencana SMPN 6 Kintap, 1 buah di tanah peruntukkan SDN Sungai Jelai, 1 buah di tanah peruntukkan RSUD Sarang Halang, 1 buah di tanah peruntukkan Poskesdes Ranggung Dalam, 1 buah di tanah peruntukkan Polindes Kuala Tambangan, 1 buah di tanah peruntukkan Poskesdes Ranggung, 1 buah di tanah peruntukkan TK Negeri Pembina Kec Kurau.
 - Pemasangan Patok Tanda Batas Tanah sebanyak 36 buah dengan rincian sebagai berikut : 4 buah patok di tanah peruntukkan Objek Wisata Air Terjun Bajuin, 4 buah patok di tanah peruntukkan Objek Wisata Pantai Takisung, 5 buah patok di tanah peruntukkan SDN Batakan 3 Filial, 4 buah patok di tanah peruntukkan rencana SMPN 6 Kintap, 2 buah patok di tanah peruntukkan SDN Sungai Jelai, 8 buah patok di tanah peruntukkan RSUD Sarang Halang, 2 buah patok di tanah peruntukkan Poskesdes Ranggung Dalam, 2 buah patok di tanah peruntukkan Polindes Kuala Tambangan dan 4 buah patok di tanah peruntukkan Poskesdes Ranggung.
8. Terlaksananya monitoring pengamanan BMD yang tersebar di 11 kecamatan dari target 60 kali realisasi sebanyak 73 kali.

Kendala/Permasalahan yang dihadapi

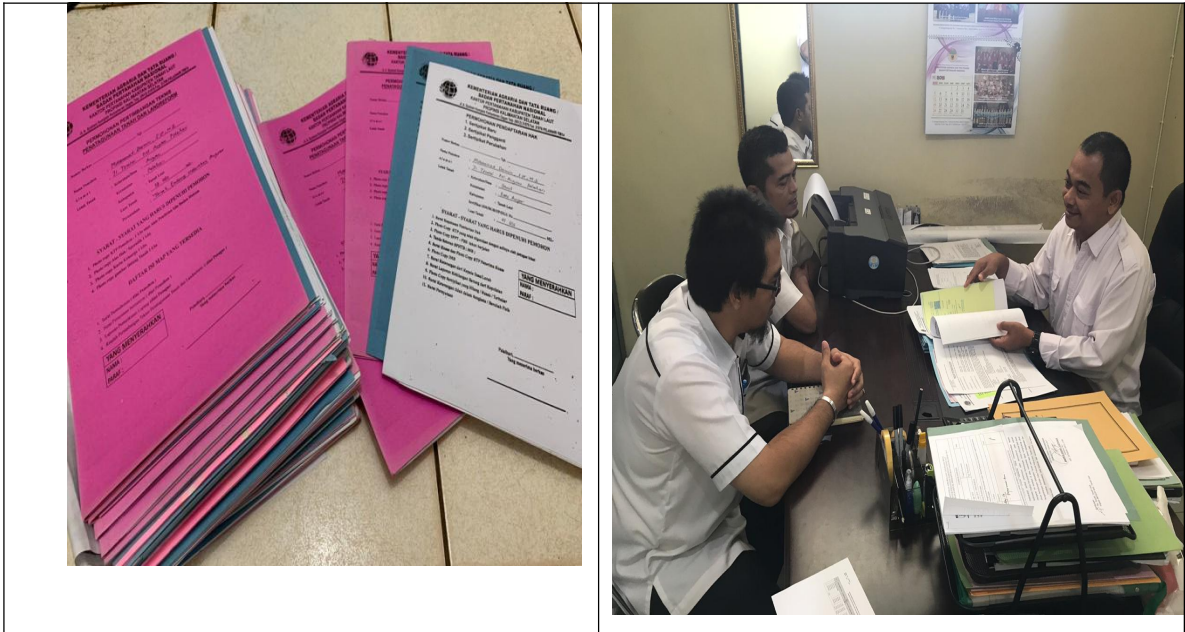
1. Banyaknya jumlah aset yang besar dan lokasi yang menyebar di 11 kecamatan dan kurangnya SDM.
2. Adanya ancaman/tekanan dari pihak ketiga/masyarakat dalam penertiban maupun pengamanan aset.
3. Lambatnya penyelesaian proses penyertifikatan dari instansi terkait.
4. Kurangnya kerjasama SKPD terkait maupun pihak ketiga dalam melengkapi berkas administrasi pengamanan.

Rencana Aksi yang akan dilakukan dalam rangka upaya perbaikan

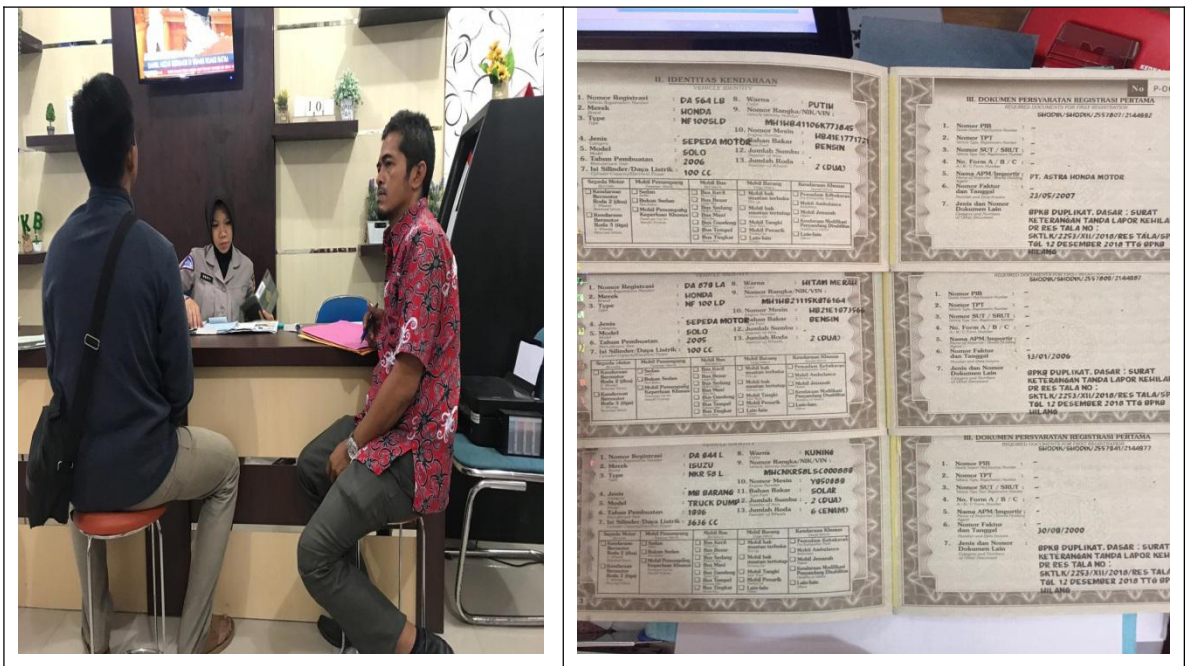
1. Membuat permohonan penambahan SDM serta meningkatkan kinerja SDM yang sudah ada.
2. Membuat permohonan petugas keamanan ke instansi terkait dalam melaksanakan pengamanan aset.
3. Lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian proses penyertifikatan maupun pembuatan BPKB duplikat.
4. Melaksanakan pendekatan/sosialisasi kepada pihak ketiga/masyarakat dalam tertib administrasi kelengkapan berkas pengamanan BMD

2. Foto-Foto Kegiatan

1). Melaksanakan pengajuan permohonan penyertifikatan tanah



2). Melaksanakan pengajuan permohonan BPKB duplikat sesuai ketentuan



3). Melaksanakan Rekonsiliasi/Verifikasi Pemeliharaan BMD sesuai ketentuan



4). Melaksanakan Penelusuran BMD yang Belum Jelas Lokasinya sesuai ketentuan



5). Melaksanakan Pemeliharaan BMD-PPKD sesuai ketentuan





6). Melaksanakan Penguasaan Fisik BMD-PPKD sesuai ketentuan





7). Melaksanakan monitoring BMD yang dikuasai sesuai ketentuan





7. 7. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 7

Sasaran strategis nomor 7 adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset dengan tabel pencapaian sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7
Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi	
7	Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	9	Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100
			Rata-rata capaian kinerja				100.00			100.00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan yang telah dipelihara sesuai ketentuan capaian kerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 7 Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Perencanaan Kebutuhan

dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2019 dengan penjelasan dibawah ini.

Kasubbid Perencanaan Kebutuhan

Laporan Capaian Kinerja Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan

I. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019

No	Program/ Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi			
					Fisik		Keuangan	
					Kinerja	%	Rp	%
1	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah							
	Penyusunan standar satuan harga	Terlaksananya penyusunan buku standar harga barang/ jasa keperluan Pemerintah Kab. Tanah Laut	1 Dokumen (standar satuan harga barang dan jasa)	87,061,800	1 Dokumen (standar satuan harga barang dan jasa)	100%	77,810,900	89.37%
2	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah							
	Perencanaan dan pengadaan aset daerah	Terlaksananya penyusunan RKBMD dan RKPBMMD TA.2019	1 Dokumen (RKBMD dan RKPBMMD)	129,482,700	1 Dokumen (RKBMD dan RKPBMMD)	100%	117,923,418	91.07%
		Terlaksananya penyusunan Laporan Triwulan Barang Persediaan	1 Dokumen (Laporan Triwulan)		1 Dokumen (Laporan Triwulan I s/d IV)	100%		
		Terlaksananya penyusunan Laporan Stock Opname Tahun 2018	1 Dokumen (Stock Opname)		1 Dokumen (Stock Opname)	100%		
		Terlaksananya pembuatan Peraturan Bupati	2 Dokumen (Perbup)		2 Dokumen (Raperbup)	100%		

Analisis Capaian Program dan Kegiatan Kasubbid Perencanaan Kebutuhan adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan Kegiatan Penyusunan standar satuan harga.

Mempunyai Target Kinerja 1 Dokumen standar satuan harga barang dan jasa, Terealisasi 1 Dokumen standar satuan harga barang dan jasa atau terealisasi 100%, SSH tersebut berisi Dokumen Satuan Harga Perubahan 2019 dan Dokumen Standar satuan harga Tahun 2020.

Pagu murni Tahun 2019 Rp117.061.800,- dan pada Perubahan APBD berkurang Rp30.000.000,- menjadi Rp87.061.800,- dengan Realisasi Keuangan Rp77.810.900 atau sebesar 89,37%

2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah, dengan Kegiatan Perencanaan dan pengadaan aset daerah mempunyai pagu murni Rp109.482.700,- dan pada Perubahan APBD bertambah Rp20.000.000,- menjadi Rp129.482.700,-. Realisasi keuangan sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp117.923.418,- atau 91,07%

Mempunyai 4 (empat) Target Kinerja, yaitu 1 Dokumen RKBMD dan RKPBMMD, 1 Dokumen Laporan Triwulan, 1 Dokumen Stock Opname, dan 2 Dokumen (Perbup), antara lain:

- a. Target Kinerja 1 Dokumen (RKBMD dan RKPBMMD) dengan Realisasi 1 Dokumen atau 100%
- b. Target Kinerja 1 Dokumen (Laporan Triwulan) dengan Realisasi 1 Dokumen berupa Laporan Barang Pakai Habis Triwulan I sampai dengan IV.
- c. Target Kinerja 1 Dokumen (Stock Opname) dengan Realisasi 1 Dokumen Laporan Stock Opname Tahun 2018 yang dicetak di Tahun 2019.
- d. Target Kinerja 2 Dokumen (Perbup) dengan Realisasi 2 Draf Perbup yaitu Draf Peraturan Bupati Tanah Laut Tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Tanah Laut, dan Draf Peraturan Bupati Tanah Laut Tentang Rumah Negara Kabupaten Tanah Laut.

II. Pencapaian Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Kinerja Utama	Indikator Utama	Satuan	Target	Realisasi 2019	Capaian 2019
1.	Melaksanakan penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	Jumlah SKPD yang melakukan penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	SKPD	40	40	100%
2.	Melaksanakan penyusunan Standar Satuan Harga sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Buku SSH sesuai ketentuan	Dok	1	1	100%
3.	Melaksanakan Pembuatan Standar Kebutuhan Barang sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Buku Standar Kebutuhan Barang sesuai ketentuan	Dok	1	1	100%
4.	Melaksanakan Rekonsiliasi/Verifikasi Barang Pakai Habis sesuai ketentuan	Jumlah SKPD yang direkonsiliasi/ verifikasi Barang Pakai Habis sesuai ketentuan	SKPD	40	40	100%
5.	Melaksanakan Penyusunan Beban Persediaan sesuai ketentuan	Jumlah dokumen Beban Persediaan sesuai ketentuan	Dok	40	40	100%
6	Melaksanakan Sosialisasi Penyusunan RKBMD, Penyusunan Beban Persediaan dan Standar Satuan Harga sesuai ketentuan	Jumlah SKPD yang mengikuti Sosialisasi Penyusunan RKBMD, Penyusunan Beban Persediaan dan Standar Satuan Harga sesuai ketentuan	SKPD	40	40	100%
7	Melaksanakan Monitoring Barang Pakai Habis sesuai ketentuan	Jumlah Barang Pakai Habis SKPD yang telah termonitoring sesuai ketentuan	SKPD	40	40	100%

Analisis Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Subbid Perencanaan Kebutuhan adalah sebagai berikut :

1. Kinerja Utama Melaksanakan penyusunan RKBMD sesuai ketentuan, dengan Indikator Jumlah SKPD yang melakukan penyusunan RKBMD sesuai ketentuan. Indikator tersebut mempunyai Target 40 SKPD dan Tercapai 40 SKPD atau 100%. Penyusunan RKBMD terdiri dari RKBMD Perubahan Tahun Anggaran 2019 dan RKBMD Tahun Anggaran 2020.
2. Kinerja Utama Melaksanakan penyusunan Standar Satuan Harga sesuai ketentuan, dengan Indikator Jumlah Dokumen Buku Standar Satuan Harga sesuai ketentuan. Indikator mempunyai Target 1 Dokumen dan Tercapai 1 Dokumen atau 100%, SSH tersebut berisi Satuan Harga Perubahan 2019 dan Standar satuan harga untuk Tahun 2020.

3. Kinerja Utama Melaksanakan Pembuatan Standar Kebutuhan Barang sesuai ketentuan, dengan Indikator Jumlah Dokumen Buku Standar Kebutuhan Barang sesuai ketentuan. Indikator ini mempunyai Target 40 Dokumen dan Tercapai 40 Dokumen atau 100%, dokumen tersebut didapat dari hasil analisa atas Kartu Inventaris Barang di tiap SKPD, dokumen tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Anggaran dalam pengadaan barang dan jasa di SKPD.
4. Kinerja Utama Melaksanakan Rekonsiliasi/ Verifikasi Barang Pakai Habis sesuai ketentuan, dengan Indikator Jumlah SKPD yang direkonsiliasi/ verifikasi Barang Pakai Habis sesuai ketentuan. Indikator tersebut mempunyai Target 40 SKPD dengan capaian 40 SKPD atau 100%. Rekonsiliasi dilaksanakan setiap Triwulan sehingga dalam Tahun 2019 telah dilaksanakan 4 kali rekonsiliasi dengan SKPD.
5. Kinerja Utama Melaksanakan Penyusunan Beban Persediaan sesuai ketentuan, dengan Indikator Jumlah dokumen Beban Persediaan sesuai ketentuan. Indikator tersebut mempunyai Target 40 Dokumen dengan Capaian 40 Dokumen atau 100%.
6. Kinerja Utama Jumlah SKPD yang mengikuti Sosialisasi Penyusunan RKBMD, Penyusunan Beban Persediaan dan Standar Satuan Harga sesuai ketentuan, dengan Indikator Jumlah SKPD yang mengikuti Sosialisasi Penyusunan RKBMD, Penyusunan Beban Persediaan dan Standar Satuan Harga sesuai ketentuan. Indikator tersebut mempunyai Target 40 SKPD dengan capaian 40 SKPD atau 100%.
7. Kinerja Utama Melaksanakan Monitoring Barang Pakai Habis sesuai ketentuan, dengan Indikator Jumlah Barang Pakai Habis SKPD yang telah termonitoring sesuai ketentuan. Indikator tersebut mempunyai Target 40 SKPD dengan capaian 40 SKPD atau 100%. Monitoring tersebut berupa melakukan monitoring ke Kecamatan dan melakukan monitoring triwulanan dari aplikasi Simda.

Permasalahan

1. Lambatnya Bendahara Pengeluaran dalam menyiapkan kelengkapan SPJ, sehingga pengurus barang terlambat dalam pencatatan barang.
2. Kurangnya keterlibatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian dalam percepatan penyusunan laporan.
3. Jumlah SDM yang terbatas

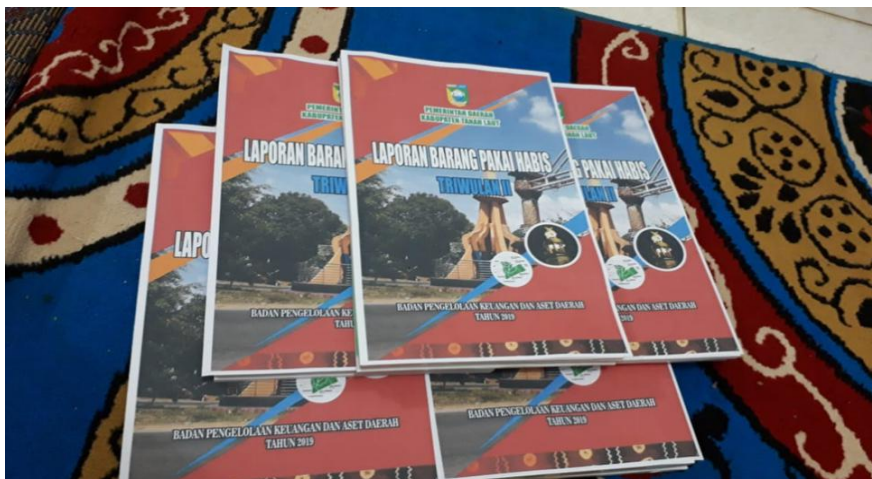
Upaya Pemecahan Masalah :

1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian serta Kasubbag Keuangan lebih meningkatkan pengawasan kepada Pengurus Barang dan Bendahara Pengeluaran serta koordinasi antar Kasubbag.
2. Mendorong bendahara pengeluaran agar lebih cepat dalam melengkapi kelengkapan SPJ.
3. Mengajukan permohonan penambahan SDM.

DOKUMEN STANDAR SATUAN HARGA PERUBAHAN TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020



LAPORAN BARANG PAKAI HABIS TRIWULAN I S/D IV



DOKUMEN RKBMD PERUBAHAN TAHUN 2019



DOKUMEN RKBMD TAHUN 2020



LAPORAN STOCK OPNAME



DOKUMEN ANALISA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020



DRAF PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TAHUN 2019 TENTANG RUMAH NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT



DRAF PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TAHUN 2019 TENTANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT



7. 8. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 8

Sasaran strategis nomor 8 adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset dengan tabel pencapaian sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8

Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi	
8	Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	10	Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100
			Rata-rata capaian kinerja				100.00			100.00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Meningkatkan kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan sesuai ketentuan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 8 Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Pemanfaatan dan Penggunaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2019 dengan penjelasan dibawah ini.

Kasubbid Pemanfaatan dan Penggunaan

1. Target Program dan Kegiatan sesuai DPA target dan Realisasi Tahun 2019

No.	Program/Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2019 (Rp.)	Realisasi		Keuangan	
					Fisik	%	Fisik	%
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah							
	Kegiatan : Pengelolaan Pemanfaatan Aset Daerah	1. Terlaksananya rekonsiliasi pemanfaatan dan penggunaan BMD.	1 Dok.	148.423.450	1 Dok.	100	115.524.200	77,83
		2. Terlaksananya monitoring pemanfaatan dan monitoring penggunaan BMD.	1 Dok		1 Dok			
		3. Terlaksananya penilaian BMD.	1 Dok		1 Dok			
		4. Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan BMD.	1 Dok		1 Dok			
		5. Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan BMD Tk. Kecamatan	2 Kec.		2 Kec. (Tambang Ulang dan Bati-Bati)			

2. Capaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Kinerja Utama	Indikator Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Melaksanakan penilaian dalam rangka pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	1. Jumlah BMD yang dilakukan penilaian untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan	15 BMD	21 BMD	140
2.	Melaksanakan rekonsiliasi/verifikasi pemanfaatan dan penggunaan BMD sesuai ketentuan	2. Jumlah SKPD yang dilakukan rekonsiliasi/verifikasi pemanfaatan dan penggunaan BMD sesuai ketentuan	41 SKPD	41 SKPD	100
3.	Melaksanakan monitoring BMD yang dimanfaatkan dan digunakan sesuai ketentuan	3. Jumlah BMD yang dimanfaatkan dan digunakan dimonitoring sesuai ketentuan	60 BMD	60 BMD	100
4.	Melaksanakan	4. Jumlah Kecamatan	2	2	100

LAKIP BPKAD TAHUN 2019

	sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan BMD sesuai ketentuan	yang dilakukan sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan BMD sesuai ketentuan	Kecamatan	Kecamatan	
--	---	--	-----------	-----------	--

3. Analisa Capaian Program dan Kegiatan sesuai DPA dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

1. **Terlaksananya Rekonsiliasi pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah sebanyak 5 (lima) kali.**
2. **Monitoring Pemanfaatan dan Penggunaan Barang Milik Daerah.**

Hasil Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Terbentuknya Tim Monitoring Pemanfaatan dan Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/125-KUM/2019 tanggal 7 Januari 2019, dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah selama 12 bulan.

Tugas Tim adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana monitoring pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah.
- b. melaksanakan monitoring pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah.
- c. membuat laporan monitoring pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah.
- d. menyampaikan laporan hasil kegiatan pada Bupati Tanah Laut.

3. **Terlaksananya monitoring pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah di 11 (sebelas) Kecamatan.**
4. **Terlaksananya Penilaian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2019.**

Untuk tahun anggaran 2019 terdapat beberapa permohonan dari pihak ketiga untuk memanfaatkan barang milik daerah, baik berupa tanah maupun bangunan milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan telah dilaksanakan penilaian oleh Tim Penilai Pemerintah dari Kantor Pelayanan

Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin pada tanggal 06 s/d 09 Pebruari 2019.

Hasil Penilaian adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Rumah Negara Golongan II Type A Permanen yang berlokasi di Jalan Pesantren Al Mubarak Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Bangunan tersebut berada di komplek rumah pemotongan hewan dengan luasan $\pm 36 \text{ m}^2$ dengan bangunan permanen, kondisi bangunan sedang. Penilaian dilaksanakan pada tanggal 09 Pebruari 2019. Berdasarkan laporan penilaian dari Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin Nomor : LAP-0072/2/1/WKN.12/KNL.03/09.01/2019 tanggal 14 Maret 2019 telah diperoleh nilai sewa sebesar Rp. 1.830.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) selama 6 (enam) bulan.
2. Sebagian tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Obyek penilaian terdiri dari dua bidang untuk dimanfaatkan sebagai Kantor Bank Kalsel dan Booth ATM. Tanah dan bangunan untuk Kantor Bank Kalsel berada di bagian tengah komplek Kantor Bupati dan melayani pegawai dan SKPD namun tertutup pagar keliling Kantor Bupati. Tanah dan bangunan untuk Booth ATM berada di depan Kantor Kas Daerah Komplek Kantor Bupati. Penilaian dilaksanakan pada tanggal 09 Pebruari 2019. Berdasarkan laporan penilaian dari Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin Nomor : LAP-0070/2/1/WKN.12/KNL.03/09.01/2019 tanggal 14 Maret 2019 telah diperoleh nilai sewa :
 1. Bangunan Kantor Bank Kalsel sebesar Rp. 95.625.000,- per 3 tahun.
 2. Sebagian Tanah untuk bangunan Booth ATM sebesar Rp. 47.025.000,- per 3 tahun.
3. Sebagian Tanah dan Bangunan Gudang. Obyek penilaian berupa sebagian tanah dan bangunan gudang yang berlokasi di Jalan Raya Telkom Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari. Penilaian dilaksanakan

pada tanggal 09 Pebruari 2019. Berdasarkan laporan penilaian dari Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin Nomor : LAP-0071/2/1/WKN.12/KNL.03/09.01/2019 tanggal 14 Maret 2019 telah diperoleh nilai sewa :

- 1 (satu) unit bangunan gudang pupuk seluas \pm 909,84 m² sebesar Rp. 87.025.000,-.
- 1 (satu) unit bangunan gudang pupuk seluas \pm 595 m² sebesar Rp. 60.405.000,-.

4. Sebagian Tanah dan Bangunan Rumah Dinas. Obyek penilaian berupa sebagian tanah dan bangunan rumah dinas yang berlokasi di Jalan A. Syairani Kecamatan Pelayhari yang berada di Komplek Balai Latihan Kerja yang terdiri dari 5 (lima) bidang yang dimanfaatkan sebagai rumah dinas dengan luas tanah dan bangunan adalah 36 m² dengan rincian : sebanyak 1 (satu) unit dengan bangunan permanen dan kondisi bangunan baik serta sebanyak 4 (empat) unit seluas 45 m² dengan bangunan permanen dan kondisi bangunan sedang. Penilaian dilaksanakan pada tanggal 09 Pebruari 2019. Berdasarkan laporan penilaian dari Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin Nomor : LAP-0073/2/1/WKN.12/KNL.03/09.01/2019 tanggal 14 Maret 2019 telah diperoleh nilai sewa yaitu :

- Rumah dinas Nomor 50.10.03/004 dengan luas 45 m² sebesar Rp. 2.175.000,- per 6 bulan.
- Rumah dinas Nomor 50.10.03/008 dengan luas 45 m² sebesar Rp. 1.830.000,- per 6 bulan.
- Rumah dinas Nomor 50.10.03/009 dengan luas 45 m² sebesar Rp. 1.830.000,- per 6 bulan.
- Rumah dinas Nomor 50.10.03/013 dengan luas 45 m² sebesar Rp. 1.830.000,- per 6 bulan.
- Rumah dinas Nomor 50.10.03/014 dengan luas 36 m² sebesar Rp. 1.830.000,- per 6 bulan.

5. Obyek penilaian berupa peralatan dan mesin yang akan disewakan pada

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Laut, yang umumnya disewakan kepada masyarakat umum yang memerlukan. Penilaian dilaksanakan pada tanggal 09 Pebruari 2019. Berdasarkan laporan penilaian dari Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin Nomor : LAP-0074/2/2/WKN.12/KNL.03/09.01/2019 tanggal 14 Maret 2019 telah diperoleh nilai sewa yaitu :

- Dump truck sebesar Rp. 298.000,- per hari.
 - Mobil tangki air sebesar Rp. 333.000,- per hari.
 - Arm roll sebesar Rp. 350.000,- per hari.
 - Kendaraan roda tiga sebesar Rp. 60.000,- per hari.
 - Skylife sebesar Rp. 1.800.000,- per hari.
 - Genset sebesar Rp. 734.000,- per hari.
 - Chainsaw sebesar Rp. 131.000,- per hari.
 - Toilet portable sebesar Rp. 990.000,- per hari.
 - Tempat sampah sebesar Rp. 61.000,- per hari.
 - Lampu sorot sebesar Rp. 83.000,- per hari
6. 1 (satu) unit alat pencacah pupuk organic yang berlokasi di TPA Bakunci Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari. Penilaian dilaksanakan pada tanggal 09 Pebruari 2019. Berdasarkan laporan penilaian dari Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin Nomor : LAP-0075/2/2/WKN.12/KNL.03/09.01/2019 tanggal 14 Maret 2019 telah diperoleh nilai sewa yaitu sebesar Rp. 309.000,- per bulan.

5. Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan BMD.

Kegiatan inventarisasi pemanfaatan BMD dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu :

- Melaksanakan inventarisasi pemanfaatan BMD di Kabupaten Tanah Laut secara on desk terhadap 41 (empat puluh satu) SKPD.
- Melaksanakan tindak lanjut hasil inventarisasi pemanfaatan BMD SKPD (monitoring ke pihak yang memanfaatkan BMD).

6. Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah di 2 (dua) Kecamatan.

Sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan informasi kepada Aparat Desa dan Kecamatan mengenai pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah dilaksanakan di 2 (dua) Kecamatan, yaitu :

1. pada tanggal 24 Oktober 2019 di laksanakan di Kecamatan Bati-Bati, bertempat di Aula Kecamatan. Dihadiri oleh peserta dari Aparat Desa di Kecamatan Bati-Bati sebanyak 14 Desa (Desa Bentok Darat, Benua Raya, Ujung, Ujung Baru, Pandahan, Nusa Indah, Padang, Sambangan, Bentok Kampung, Bati-Bati, Kait-Kait, Kait-Kait Baru, Liang Anggang dan Banyu Irang) dan diwakili oleh 2 (dua) orang dari setiap Desa serta aparat di Kecamatan. Total peserta yang hadir adalah sebanyak 40 orang. Kepada Peserta diberikan materi terkait pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah dengan Narasumber yaitu :
 - a. dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanah Laut yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset dengan judul materi : Sosialisasi Pemanfaatan Dan Penggunaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - b. dari Kejaksaan Negeri Tanah laut yang disampaikan oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dengan judul materi : Peranan Kejaksaan RI dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
2. pada tanggal 30 Oktober 2019 di laksanakan di Kecamatan Tambang Ulang, bertempat di Aula Kecamatan. Dihadiri oleh peserta dari Aparat

Desa di Kecamatan Tambang Ulang sebanyak 9 Desa (Desa Bingkulu, Gunung Raja, Kayu Abang, Martadah, Martadah Baru, Pulau Sari, Sungai Jelai, Sungai Pinang dan Tambang Ulang) dan diwakili oleh 2 (dua) orang dari setiap Desa serta aparat di Kecamatan. Total peserta yang hadir adalah sebanyak 40 orang. Kepada Peserta diberikan materi terkait pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah dengan Narasumber yaitu :

- a. dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanah Laut yang disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Penggunaan dengan judul materi : Sosialisasi Pemanfaatan Dan Penggunaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. dari Kejaksaan Negeri Tanah laut yang disampaikan oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dengan judul materi : Peranan Kejaksaan RI dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kendala dan Permasalahan

Pada dasarnya semua output kinerja sudah tercapai sesuai target yang direncanakan. Namun ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan 100% dikarenakan adanya keterkaitan dengan pihak lainnya.

Kegiatan dimaksud adalah :

1. Penilaian pemanfaatan BMD oleh Tim Penilai dari KPKNL Banjarmasin. Kab. Tanah Laut telah mengajukan permohonan penilaian 2 obyek yang diajukan permohonannya oleh pihak ketiga, yaitu permohonan dari PT. Telkom Indonesia untuk penempatan Optical Distribution Cabinet (ODC) di tanah milik Pemerintah Kab. Tanah Laut dan penempatan BTS Mini CME di Kantor Kecamatan Jorong dari PT. Telkomsel Banjarmasin.

Dari pihak KPKNL Banjarmasin tidak bisa melakukan penilaian terhadap permohonan tersebut di atas dikarenakan padatnya jadwal Tim Penilai khususnya dalam kegiatan Revaluasi BMN yang harus secepatnya

diselesaikan. Dan dengan adanya pergantian Pimpinan mereka lebih diarahkan untuk memprioritaskan kegiatan Revaluasi dimaksud. Karena nya honor Tim Penilai tidak bisa direalisasikan 100%.

2. Honor Narasumber diperuntukkan ketika BPKAD melibatkan Tim dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut untuk penyelesaian masalah pengamanan dan sengketa BMD milik Pemerintah Kab. Tanah Laut dengan masyarakat di wilayah tertentu. Dan sampai bulan Desember 2019 kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan 100%.
3. Pemanfaatan BMD memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan PAD serta meningkatkan fasilitas publik. Namun faktanya banyak asset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang belum mampu menghasilkan keuntungan bagi daerah, dengan pengertian bahwa pemanfaatan asset belum optimal serta rendahnya fungsi manfaat asset.

Rencana Aksi :

1. Melakukan inventarisasi pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah lanjutan untuk lebih mengoptimalkan keakuratan data terkait pemanfaatan dan penggunaan BMD di Kab. Tanah Laut.
2. Melakukan sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan BMD kepada semua SKPD yang ada di lingkup Pemerintah Kab. Tanah Laut.
3. Melakukan pembenahan administrasi pemanfaatan dan penggunaan BMD agar sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kab. Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Pembahasan dan Penyusunan Peraturan tentang penilaian BMD yang dimanfaatkan.
5. Mendorong pemanfaatan dan penggunaan BMD yang dapat menghasilkan keuntungan bagi daerah atau yang mendatangkan PAD.

FOTO – FOTO KEGIATAN

1. Rekonsiliasi Pemanfaatan dan Penggunaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2019



2. Foto Kegiatan Monitoring Pemanfaatan dan Monitoring Penggunaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2019



Monitoring terhadap pemanfaatan tanah milik Pemkab di lingkungan RSUD H. Boejasin Pelaihari untuk penempatan Booth ATM



Monitoring terhadap Pemanfaatan tanah milik Pemkab di Kantor Kecamatan Kurau untuk penempatan Booth ATM Bank BRI



Monitoring gedung dan bangunan yang rencananya akan dijadikan UPPD Kantor Samsat Pelaihari di Kec. Kintap



Asset yang dipinjamkaikan kepada LANAL Banjarmasin di Kec. Kintap



Monitoring asset yang dipinjamkaikan kepada UPPD Samsat Pelaihari



Monitoring pemanfaatan rumah dinas di Kelurahan Sarang Halang yang di sewa oleh PTT Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan



Monitoring pemanfaatan asset berupa
Alsintan yang berada di Distanhorbun Kab.
Tanah Laut yang dipinjampakaikan kepada
Baltes



Monitoring pemanfaatan rumah dinas milik
Pemkab Tanah Laut

Monitoring pemanfaatan tanah milik Pemkab
Tanah Laut di Desa Panggung Kec. Pelaihari



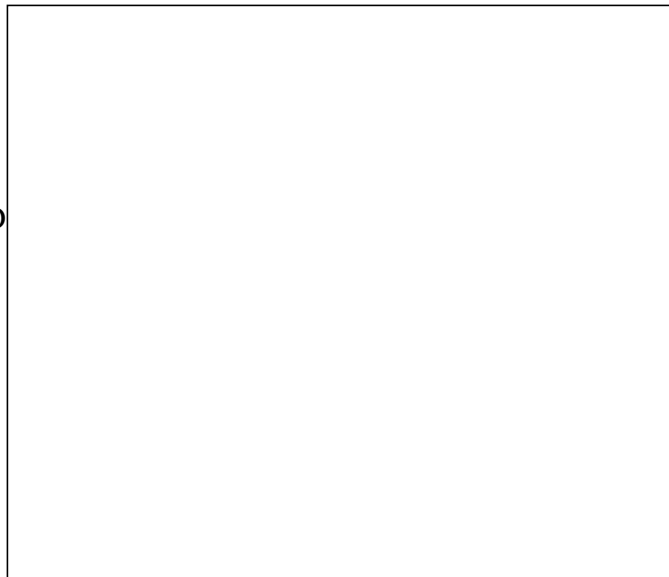
Monitoring pemanfaatan rumah dinas milik
Pemkab Tanah Laut

3. FOTO PENILAIAN BMD





ID





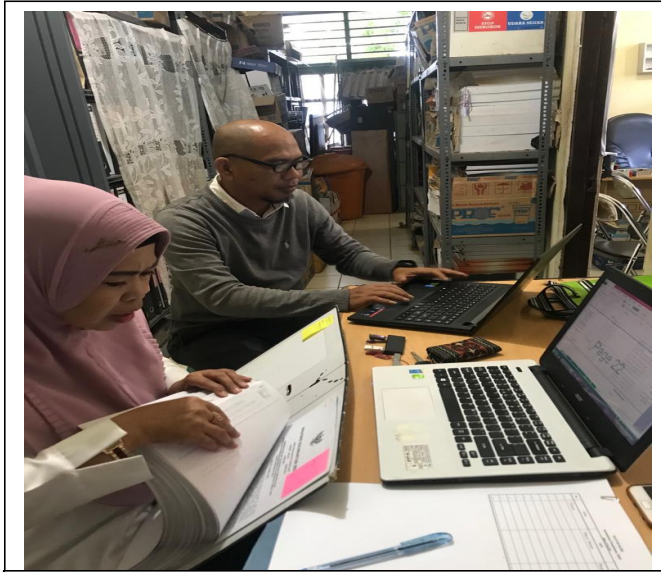
5. INVENTARISASI PEMANFAATAN BMD



4. FOTO KEGIATAN INVENTARISASI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

1. FOTO INVENTARISASI PEMANFAATAN BMD SECARA ON DESK





2. FOTO INVENTARISASI PEMANFAATAN BMD (MONITORING LANGSUNG KE LOKASI/LAPANGAN)



5. FOTO SOSIALISASI PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BMDTK. KECAMATAN

a. KECAMATAN BATI – BATI PADA TANGGAL 24 OKTOBER 2019



b. KECAMATAN TAMBANG ULANG PADA TANGGAL 30 OKTOBER 2019



LAKIP BPKAD TAHUN 2019

Sasaran strategis nomor 9 adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penatausahaan Aset dengan tabel pencapaian sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9
Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi	
9	Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan	11	Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	%	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja							100.00			100.00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase BMD yang dicatat dengan akurat sesuai ketentuan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 9 Kepala Bidang Penatausahaan Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Inventarisasi dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2019 dengan penjelasan dibawah ini.

Kasubbid Inventarisasi

I. Program dan Kegiatan sesuai DPA Tahun 2019

Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
Kegiatan : Penyusunan Tabulasi Data Aset Teta

1. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019							
Program /Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2019 (RP.)	Realisasi			
				Fisik		Keuangan	
				Kinerja	%	Rp.	%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah							
Kegiatan Penyusunan Tabulasi Data Aset Tetap	Terlaksananya Penyusunan Tabulasi Data Aset Tetap dan Pelaksanaan Monev BMD, Tindak Lanjut Sensus 2018 dan Penilaian Aset untuk Penyusunan Neraca	21 Dokumen Laporan Aset, 1 Dokumen Tindak Lanjut Sensus, 14 Dokumen Penilaian (84 Buku Laporan Aset, 6 Buku Laporan Tindak Lanjut Sensus dan 42 Buku Laporan Penilaian)	486,851,850	21 Dokumen Laporan Aset, 1 Dokumen Tindak Lanjut Sensus, (84 Buku Laporan Aset, 6 Buku Laporan Tindak Lanjut Sensus)	93.89	433,187,400	88.98

II. Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2019

2. Perjanjian Kinerja Target dan Realisasi Tahun Anggaran 2019				
Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Melaksanakan Updating Data BMD pada KIB SKPD sesuai ketentuan	1 Jumlah Dokumen KIB SKPD yang terupdate	21 Dokumen	21 Dokumen	100%
Melaksanakan Rekonsiliasi/verifikasi Belanja Modal SKPD sesuai ketentuan	2 Jumlah Belanja Modal SKPD yang telah direkonsiliasi/Verifikasi dan menyampaikan laporan sesuai	40 SKPD	40 SKPD	100%
Melaksanakan Penilaian BMD SKPD Guna Pencatatan dalam Neraca sesuai ketentuan	3 Jumlah BMD SKPD yang sudah dinilai dan dicatat dalam neraca	14 Persil BMD	0	0%
Melaksanakan Sensus BMD dan Tindaklanjut Hasil Sensus BMD sesuai ketentuan	4 Jumlah BMD SKPD yang telah disensus dan	34 SKPD	34 SKPD	100%
Melaksanakan Monitoring Belanja Modal SKPD sesuai ketentuan	5 Jumlah Belanja Modal SKPD yang telah termonitoring	40 SKPD	40 SKPD	100%
Melaksanakan Sosialisasi Inventarisasi BMD SKPD sesuai ketentuan	6 Jumlah SKPD yang telah tersosialisasi dan menerapkan	40 SKPD	40 SKPD	100%
Melaksanakan FGD/Pembinaan SKPD dalam rangka Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	7 Jumlah SKPD yang mengikuti FGD/Pembinaan dan menerapkan	40 SKPD	40 SKPD	100%

III. Analisa Pencapaian Kegiatan Penyusunan Tabulasi Data Asset Tetap .

Realisasi pelaksanaan kegiatan tabulasi data asset tetap sesuai dengan target kinerja fisik adalah 93,89 % pelaksanaan kegiatan dalam bentuk 21 (dua puluh satu) Dokumen Laporan Aset, 1 (satu) Dokumen Tindak Lanjut Sensus, atau (84 Buku Laporan aset dan 6 buku Laporan tindak lanjut sensus). Ada satu kegiatan yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019.

Adapun kegiatan yang tidak terlaksana adalah kegiatan Penilaian Aset untuk Penyusunan Neraca Aset Daerah, disebabkan kegiatan ini berkaitan dengan Tim Penilai dari KPKNL Banjarmasin. Sehubungan dengan adanya surat balasan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin, Nomor S-1961/WKN.12/KNL03/2019, tanggal 10 Desember 2019 perihal Pemberitahuan Penundaan Pelaksanaan Survei Lapangan dan Penilaian Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Hal ini disebabkan karena KPKNL saat ini sedang menyelesaikan Revaluasi BMN yang harus tuntas di tahun 2019, mengingat keterbatasan personil dan waktu maka kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh KPKNL pada tahun 2020. Dengan demikian kegiatan penilaian di tahun 2019 tidak terlaksana.

Untuk mencapai sasaran strategis yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah dengan kegiatan Tabulasi Data Aset Tetap dengan pagu anggaran APBD Murni sebesar Rp. Rp. 446.852.050,- Namun pada APBD Perubahan terjadi *penyesuaian* anggaran menjadi sebesar **Rp. 486.851.850,-** terealisasi keuangan sebesar **Rp. 433.187.400,-** atau **88,98 %**.

IV. Kendala dan Permasalahan

1. Masih ada aset yang belum menggambarkan nilai aset yang sebenarnya karena gagal dilaksanakan penilaian oleh tim penilai.
2. Tidak adanya SDM yang memiliki sertifikasi Penilai BMD

V. Rencana aksi

1. Menyiapkan data dan penilaian barang milik daerah untuk dilaksanakan awal TA. 2020;
2. Menyiapkan Data SDM aparatur untuk mengikuti Diklat Penilai BMD

LAMPIRAN FOTO-FOTO KEGIATAN SUBBID INVENTARISASI

Foto Dokumentasi Hasil Kegiatan

- 1. Terlaksananya Penyusunan Tabulasi Data Asset Tetap Dan Monev BMD**

7. 10. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 10

Sasaran strategis nomor 10 adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penatausahaan Aset dengan tabel pencapaian sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10
Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi	
10	Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	12	Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	108,80	108,80
			Rata-rata capaian kinerja				100.00			108,80

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Meningkatkan kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan pada tahun 2019 capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 108,80% mengalami peningkatan sebesar 8,80% dari tahun 2018.. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 10 Kepala Bidang Penatausahaan Aset ini telah dilaksanakan oleh Kasubbid Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2019 dengan penjelasan dibawah ini.

Kasubbid Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan

Pencapaian Program dan Kegiatan tahun 2019

Program/Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Realisasi			
			Fisik	(%)	Keuangan	(%)
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah Kegiatan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan	4 Dokumen	132.490.500	4 Dokumen	100	68.533.000	51,72

Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

	KINERJA UTAMA	INDIKATOR UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Melaksanakan lelang umum BMD SKPD sesuai ketentuan	Jumlah BMD SKPD yang telah dilelang sesuai ketentuan	-	-	-
2	Melaksanakan pemindahtanganan BMD SKPD sesuai ketentuan	Jumlah BMD SKPD yang telah dipindahtangankan sesuai ketentuan ketantuan	89 Dokumen BMD	103 Dokumen BMD	115,7%
3	Melaksanakan Pemusnahan BMD SKPD sesuai ketentuan	Jumlah BMD SKPD yang telah dimusnahkan sesuai ketentuan	42 Kegiatan Pemusnahan	45 Dokumen	107,1%
4	Melaksanakan Penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan	Jumlah BMD SKPD yang telah dihapuskan sesuai ketentuan	55 Dokumen BMD	57 Dokumen BMD BMD	103,6%
5	Melaksanakan Sosialisasi Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan	Jumlah SKPD yang telah tersosialisasi dan menerapkan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	-	-	-

6	Melaksanakan Penyusunan Laporan Hasil Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
7	Melaksanakan monitoring dalam rangka Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan	Jumlah SKPD yang termonitoring dalam rangka Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	-	-	-
8	Melaksanakan FGD/Pembinaan SKPD dlm rangka Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	Jumlah SKPD yg mengikuti FGD/Pembinaan dlm rangka Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	-	-	-

Analisa Pencapaian Program dan Kegiatan serta Perjanjian Kinerja tahun 2019 Kasubbid Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan

- a. Untuk realisasi Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah Kegiatan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan dengan target 4 dokumen terealisasi 100% dan pagu anggaran sebesar Rp 132.490.500,- dengan serapan keuangan sebesar Rp 68.533.000,- atau dengan capaian sebesar 51,72%. Capaian kinerja keuangan yang hanya 51,72% dikarenakan belanja penilaian PLTBg sebesar Rp 50.000.000,- tidak dapat terealisasi karena perubahan arah kebijakan pimpinan dimana yang semula penilaian PLTBg direncanakan sebagai Penyertaan Modal kepada BUMD, namun ternyata arah kebijakan berubah menjadi Kerjasama Pemanfaatan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Penghapusan dapat disebabkan karena :

1. Penyerahan barang milik daerah;
2. Pengalihan Status Penggunaan barang milik daerah;
3. Pemindahtanganan atas barang milik daerah;
4. Putusan Pengadilan yang berkuatan hukum tetap;
5. Menjalankan ketentuan perundang-undangan;
6. Pemusnahan dan;
7. Sebab Lain.

Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan kegiatan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan sesuai dengan ketentuan, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Kegiatan pemindahtanganan dalam bentuk hibah keluar sebanyak 108 (seratus delapan) berkas/kegiatan;
- b. Hibah masuk sebanyak 11 (sebelas) berkas;
- c. Kegiatan pemusnahan sebanyak 54 (lima puluh empat) kegiatan;
- d. Kegiatan penghapusan barang milik daerah Kab. Tanah Laut dengan menerbitkan sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Surat Keputusan dengan rincian sebagai berikut :
 - Sebanyak 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Tanah Laut selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD tentang Penghapusan BMD Kab. Tanah Laut dari Daftar Barang Pengelola Barang dan ;
 - 88 (delapan puluh delapan) Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Tanah Laut selaku Pengelola Barang tentang Penghapusan BMD Kab. Tanah Laut dari Daftar Barang Pengguna Barang.

Dari 88 (delapan puluh delapan) Surat Keputusan penghapusan BMD, karena disebabkan :

1. Karena Pemindahtanganan (Hibah keluar) :21SK;
2. Karena Pengalihan Status Penggunaan :1SK;

3. Karena Pemusnahan : 57SK;
4. Karena Sebab Lain : 9SK.

Sedangkan Realisasi perjanjian kinerja Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan aset daerah secara umum mengalami kenaikan dari target awal karena adanya usulan SKPD yang tidak bisa di prediksi.

Pada Pemindahtangan BMD mengalami kenaikan 15,7% dari target awal di karenakan adanya hibah masuk yang tidak bisa di prediksi.

Pada Pemusnahan BMD ada kenaikan 7,1 % dari target awal dikarenakan adanya usul pemusnahan SKPD yang telah dilaksanakan pembongkaran bangunannya, sehingga harus segera di buatkan Berita Acara Pemusnahannya.

Pada Penghapusan BMD mengalami kenaikan 3,6% dari target awal dikarenakan adanya kenaikan Pemusnahan BMD pada beberapa SKPD.

A. Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Adapun permasalahan yang dihadapi ada beberapa sebab :

1. Pembiayaan

Tahun Anggaran 2019 belum tersedianya dana untuk kegiatan penjualan atau lelang sehingga pemindahtanganan dalam bentuk penjualan / lelang tidak ada (nihil), begitu juga dengan kegiatan tukar menukar tidak ada kegiatan (nihil);

2. Kebijakan

Adanya kebijakan dari pimpinan untuk PLTBg yang semula penyertaan modal berubah menjadi pemanfaatan, sehingga anggaran yang tersedia untuk penilaian dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ke BUMD tidak bisa terealisasi, sehingga serapan anggaran di Subbid Pemindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan sangat rendah;

3. Kurangnya Jumlah dan Kualitas SDM aparatur

Dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan jumlah dan kualitas SDM aparatur yang memadai, dimana pada Sub Bidang Pemindahtanganan,

Pemusnahan dan Penghapusan hanya terdapat 1 (satu) Kasubbid dan 1 (satu) staf dari PTT, sehingga sulit untuk pembagian tugas;

4. Ketergantungan dengan pihak lain

Pada kegiatan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan selalu tergantung kepada pemohon, sehingga sulit membuat target yang harus direncanakan, sehingga memerlukan kemampuan memprediksi kegiatan yang akan datang;

5. Belum Adanya Penilai Internal

Belum adanya penilai internal jadi kendala dalam kegiatan penilaian karena harus menganggarkan kembali untuk penilai eksternal seperti KPKNL sebagai penilai pemerintah dan anggaran untuk penilai publik.

Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya :

1. Efisiensi dana yang ada untuk kegiatan semaksimal mungkin, dan menganggarkannya kembali ditahun yang akan datang;
2. Memaksimalkan SDM yang ada serta memanfaatkan SDM subbid lain dalam Bidang Penatausahaan Aset yang longgar dalam kegiataanya dalam bentuk kerjasama dalam Tim;
3. Bekerjasama dengan Bidang lain untuk bisa membuat target dalam kegiatan terutama subbid perencanaan dan kebutuhan barang, dimana RKBUMD yang disampaikan SKPD dapat dijadikan referensi kegiatan;
4. Melaporkan dengan pimpinan dan berupaya untuk bisa dianggarkan untuk pendidikan / pelatihan penilai bmd bagi aparatur.

B. Rencana Aksi

1. Menyiapkan data dan format pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
2. Menyiapkan Data SDM aparatur untuk mengikuti Diklat Penilai BMD;
3. Menyiapkan perangkat lunak untuk lelang on line;

DOKUMENTASI KEGIATAN SUBBID PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BIDANG PENATAUSHAHAN ASET BPKAD KAB. TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2019.

1. KEGIATAN PEMINDAHTANGANAN (HIBAH) :

**HIBAH MOBIL AMBULANCE KEPADA RUKUN KEMATIAN LINGKUNGAN ULU
PELAIHARI KECAMATAN PELAIHARI**



HIBAH MOBIL KEPADA KONI KABUPATEN TANAH LAUT



HIBAH TANAH KEPADA KEMENAG KABUPATEN TANAH LAUT



**HIBAH BONGKARAN POLINDES SUNGAI RASAU KEPADA MAJELIS TA'LIM
DARUL MUJAHIRIN**



HIBAH HASIL BONGKARAN PARKIR DAN POLINDES AMBUNGAN KEPADA PONPES BABUSSALAM JOTONG



HIBAH MOBIL KEPADA BPK PUTRA ULIN JEMBRAN PETIR KURAU



HIBAH TANAH DAN BANGUNAN SD KAYU ABANG 2 KEPADA YAYASAN AHLUL KISA



HIBAH ANTENA VHF/FM KEPADA ORARI LOKAL TANAH LAUT



HIBAH KEPADA PEMDES WIL KEC. PELAIHARI

1. Sepeda Motor



2. Bangunan Gedung Kantor Permanen



3. Bangunan Tempat Kerja Lain-lain



HIBAH KEPADA PEMDES WIL KEC. TAMBANG ULANG

1. Sepeda Motor



HIBAH KEPADA PEMDES WIL KEC. PANYIPATAN

1. Sepeda Motor



2. Bangunan Gedung Kantor Permanen



3. BangunanTempat Kerja Lain-lain



LAKIP BPKAD TAHUN 2019

2. KEGIATAN PEMUSNAHAN

PEMUSNAHAN / PEMBONGKARAN BANGUNAN POLINDES SUNGAI RASAU



PEMUSNAHAN /PEMBONGKARAN DINKES TEMPAT PARKIR DAN POLINDES AMBUNGAN





PEMUSNAHAN /PEMBONGKARAN PAGAR KECAMATAN PELAIHARI



PEMUSNAHAN /PEMBONGKARAN PAGAR KECAMATAN BATU AMPAR





PEMUSNAHAN /PEMBONGKARAN TUGU SELAMAT DATANG





**PEMUSNAHAN DENGAN CARA DIHANCURKAN DAN DI TIMBUN
UNTUK PERALATAN DAN MESIN**



3. PENGHAPUSAN KARENA SEBAB LAIN (TERBAKAR)



7.11 Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 11

Sasaran strategis Nomor 11 ini adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11
Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019(%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi	
11	Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran	13	Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	%	100	100	100	100	100	100
			Rata-rata capaian kinerja				100.00			100.00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatkan kualitas pemenuhan sarpras perkantoran dengan indikator sasaran Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik capaian kerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 11 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2019.

7.12 Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 12

Sasaran strategis Nomor 12 ini adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada table sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12
Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi	
12	Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	14	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	%	100	100	100	100	100	100
			Rata-rata capaian kinerja				100.00			100.00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatkan pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD dengan indikator sasaran Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 12 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2019 dengan penjelasan dibawah ini.

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Pengelolaan administrasi perkantoran merupakan kegiatan rutin pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut, meliputi pelayanan surat masuk dan surat keluar, pelayanan sarana dan prasarana, pelayanan administrasi kepegawaian sebanyak 49 PNS dan 19 PTT dan semua terlayani dengan baik 100%.

Pencapaian Program dan Kegiatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Program/ Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi				
					Fisik		Keuangan		
					Kinerja	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan Paket Pengiriman	18 Paket Pengiriman	450.000	18 paket	100%	450.000	100%	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan Biaya Rek. Telepon, Internet, Air dan Listrik	12 Bulan	318.000.000	12 Bulan	100%	202.387.530	63,64 %	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Badan / Operasional	30 Kend. Dinas Operasional	145.800.000	30 Kend.	100%	91.231.700	62,57 %	
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan / Peralatan Kantor	36 Bhn/Peralatan kebersihan	31.280.200	36 Bahan	85%	18.828.400	60,19 %	
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	54.000.000	12 Bulan	50%	26.083.350	48,30 %	

6	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat tulis Kantor	12 Bulan	51.263.700	12 Bulan	50%	23.548.900	45,94 %
7	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Brg. Cetakan & Penggandaan	12 Bulan	52.189.700	12 Bulan	50%	31.924.400	61,17 %
8	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	13.500.000	12 Bulan	20,00 %	12.248.000	90,71 %
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	9 Jenis	303.064.364	9 Jenis	100%	266.961.400	88,09 %
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Per UU	3 SKH	6.480.000	3 SKH	100%	2.820.000	43,52 %
11	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan untuk Rapat & Tamu Kantor	12 Bulan	80.994.000	12 Bulan	100%	71.506.000	88,29 %
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi & Konsumsi Keluar Daerah	12 Bulan	1.150.171.400	12 Bulan	100%	1.136.349.047	98,80 %

13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100%	89.895.000	89,90 %
14	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Terlaksananya Penyed.JT PTT untuk keperluan adm.perktr	12 Bulan	431.490.000	12 Bulan	100%	426.224.752	98,78 %
15	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penyusunan Adm. Pengelolaan Aset SKPD	5 dokumen	5.400.000	5 dok	100%	5.400.000	100%
16	Penyusunan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian	Terlaksananya Penys.Adm. Pengelolaan Kepegawaian SKPD	2 dokumen	13.074.800	2 dok	68,00 %	8.698.350	66,53 %

No	Program/Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi			
					Fisik		Keuangan	
					Kinerja	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
1	Pemeliharaan rutin / berkala gedung	Terlaksananya Pemlh.Rutin/berkala gdg	750 M2	90.000.000	40 M2	53,33%	79.617.250	88,46%

	kantor	ktr.								
2	Pengadaan Meubeler	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur Kantor	8	Jenis	30.378.733	8	Jenis	100%	29.179.000	96,05%
2	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	2	buah	80.000.000	2	buah	100%	64.000.000	80,00%

No	Program/Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi				
					Fisik		Keuangan		
					Kinerja	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Terlaks.Bimtek Implementasi Peraturan Per UU	11 ASN	55.000.000	8 ASN	75%	21.850.000	39,73%	

Capaian Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1. Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	1. Jumlah Administrasi Perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	4 Jenis Pelayanan	4 Jenis Pelayanan	100%
2. Melaksanakan	2. Jumlah Sarpras dan SDM	48 ASN, 19	51 ASN, 19	100%

pemenuhan dan peningkatan pelayanan sarpras dan kualitas SDM SKPD	SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	PTT, 33 Kend. Dinas Operasional	PTT, 33 Kend. Dinas Operasional	
3. Melaksanakan penyebarluasan informasi pembangunan SKPD	3. Jumlah faslitasi Kegiatan Pameran Pembangunan	2 Event Pameran	2 Event Pameran	100%

Analisis Pencapaian Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan :

Pada tahun 2019 Kasubbag Umum dan Kepegawaian melaksanakan 3 Program dan 20 Kegiatan dengan kegiatan melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran SKPD dengan target 4 jenis pelayanan, melaksanakan pemenuhan dan peningkatan pelayanan sarpras dan kualitas SDM SKPD dengan target 48 ASN, 19 PTT, 33 Kend. Dinas Operasional, selanjutnya melaksanakan penyebarluasan informasi pembangunan SKPD dengan target 2 kali event pameran yaitu pameran anggrek dan pameran pembangunan. Program dan kegiatan tahun 2019 yang menjadi tanggungjawab Kasubbag Umum dan kepegawaian walaupun realisasi ada yang melebihi 50% dan ada beberapa kegiatan terealisasi dibawah 50% , karena disesuaikan dengan kebutuhan dan dalam rangka untuk efisiensi anggaran namun pelayanan perkantoran dan kepegawaian secara keseluruhan telah tercapai 100%.

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja yang telah dilaksanakan

Sedangkan Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kinerja Utama 1) Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD dengan target 4 jenis pelayanan (Surat menyurat, Sarpras perkantoran, kepegawaian dan) tercapai 100%. Kemudian 2). Melaksanakan pemenuhan dan peningkatan pelayanan sarpras dan kualitas SDM SKPD dengan target 48 ASN, 19 PTT, 33 Kend. Dinas Operasional tercapai 100%. Selanjutnya adalah 3). Melaksanakan penyebarluasan informasi pembangunan SKPD dengan target 2 kali event pameran yaitu pameran anggrek dan pameran pembangunan sehingga tercapai 100%.. Sehingga dengan demikian pernyataan

sasaran strategis nomor 15 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut juga telah terpenuhi 100%.

Foto-foto hasil kegiatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian







7.13 Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 13

Sasaran strategis Nomor 13 ini adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada table sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13
Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi	
13	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	15	Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100
			Rata-rata capaian kinerja				100.00			100.00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja SKPD dengan indikator sasaran Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuancapaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 13 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2019 dengan penjelasan dibawah ini.

Kasubbag Perencanaan

Pencapaian Program dan Kegiatan Kasubbag Perencanaan

No	Program/ Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi			
					Fisik		Keuangan	
					Kinerja	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			7.453.800			5.203.800	69,8 1%

1	Penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja)	Tersusunnya Renstra dan Renja SKPD	2 dok	7.453.800	2 dok	100 %	7.453.800	100 %
---	--	------------------------------------	-------	-----------	-------	-------	-----------	-------

Pencapaian Perjanjian Kinerja Kasubbag Perencanaan

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1 Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan SKPD sesuai ketentuan	1. Jumlah dokumen perencanaan SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%

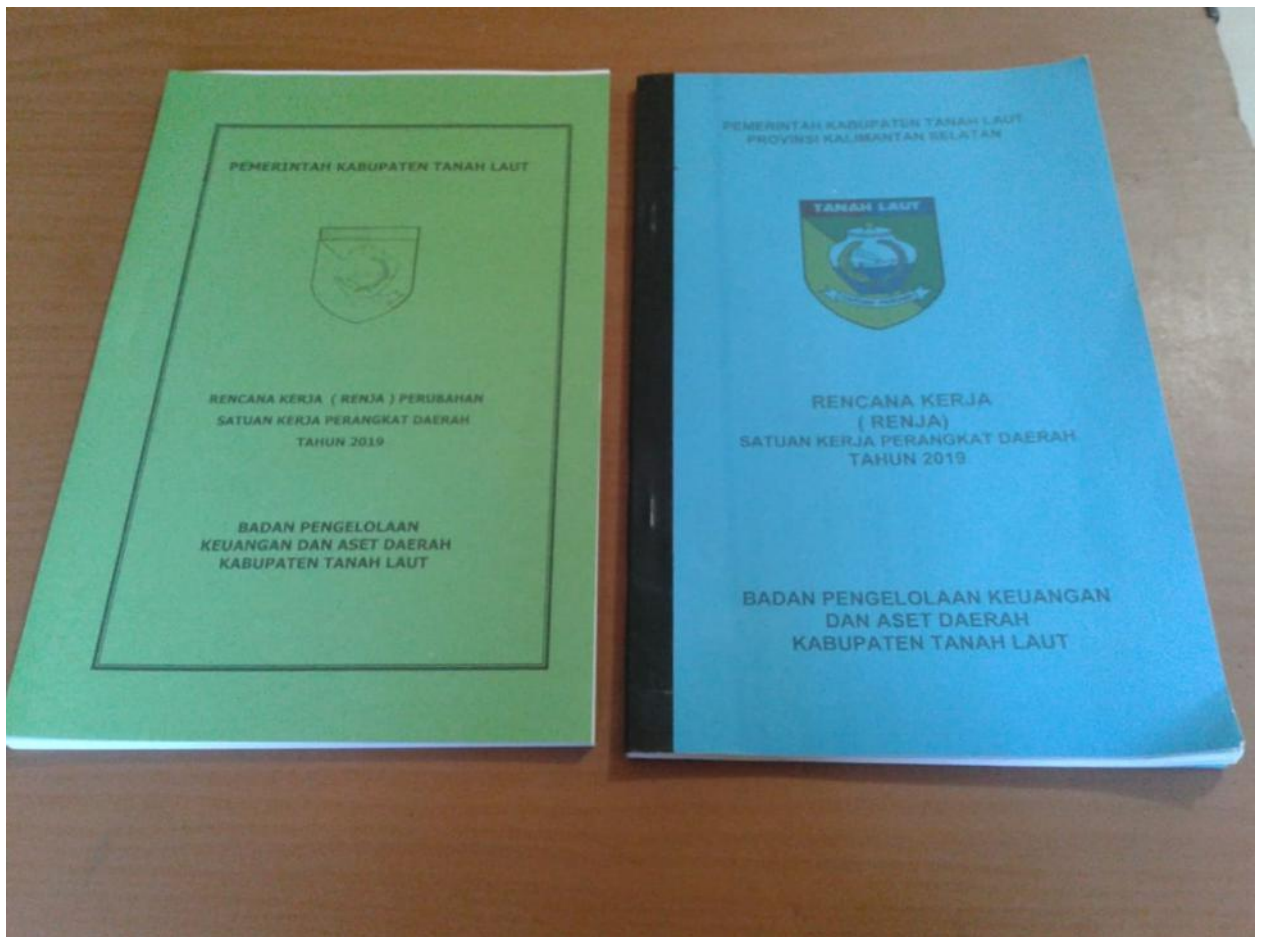
Analisis Pencapaian Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan :

1. Pada tahun 2019 Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) yaitu telah melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Keputusan Kepala BPKAD Kabupaten Tanah laut Nomor 050.13/20/BPKAD tanggal 18 Juli 2019 dan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2019 BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan surat Keputusan Kepala BPKAD Kabupaten Tanah laut Nomor 050.13/21/BPKAD/2019 tanggal 29 Juli 2019. Dengan pagu dana sebesar Rp 7.453.800,- dan realisasi sebesar Rp 7.453.800,- atau capaian sebesar 100%.
2. Penyusunan Renja Tahun 2020 dan Renja Perubahan Tahun 2019 dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

3. Kasubbag Perencanaan dalam menjalankan tugasnya mendapat dukungan penuh baik dari Pimpinan SKPD, atasan langsung dan seluruh Pejabat Struktural /PPTK dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja yang telah dilaksanakan

Sedangkan Perjanjian Kinerja Kasubbag Perencanaan Kinerja Utama Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan SKPD sesuai ketentuan dengan indicator kinerja Jumlah dokumen perencanaan SKPD telah tercapai 100% Sehingga dengan demikian pernyataan sasaran strategis nomor 13 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut juga telah terpenuhi 100%.



7.14 Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 14

Sasaran strategis Nomor 14 ini adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada table sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14
Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi	
14	Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD	16	Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	
			Rata-rata capaian kinerja				100.00		100.00	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatkan kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD dengan indikator sasaran Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuancapaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 14 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Keuangan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2019 dengan penjelasan dibawah ini.

Kasubbag Keuangan

Program dan Kegiatan Tahun 2019 Kasubbag Keuangan

No	Program/Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi				
					Fisik		Keuangan		
					Kinerja	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya penyediaan Biaya Administrasi Keuangan	12 Bln	34.042.948	12 Bln	100%	14.107.500	41,44%	

No	Program/Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi				
					Fisik		Keuangan		
					Kinerja	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan keuangan SKPD	13 dok	5.200.000	13 Dok	100%	2.825.000	54,33 %	

Capaian Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan SKPD (Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Laporan Keuangan Akhir Tahun)	1. Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100%
2. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan SKPD	2. Jumlah dokumen administrasi keuangan SKPD yang akuntabel	75 dokumen	83 dokumen D	110,67%

Analisis Pencapaian Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan :

1. Pada tahun 2019 Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan yaitu telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pelayanan administrasi keuangan atau dalam rangka pelayanan penatausahaan keuangan dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yaitu pelayanan administrasi keuangan GU (BL), BTL LS, Gaji/Tunjangan, IWP, BPJS, JKK dan JKM, dengan target pada Perjanjian Kinerja sebanyak 75 dokumen dan telah terealisasi sebanyak 83 dokumen atau capaian sebesar 110,67%. Dengan pagu anggaran sebesar Rp 34.042.948,- dan realisasi sebesar Rp 14.107.500,- atau capaian sebesar 41,44%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp 19.935.448,- atau sebesar 58,56% adalah belanja ATK, belanja materai dan belanja jasa keuangan yang tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Sedangkan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yaitu telah melaksanakan kegiatan dalam rangka penyusunan 4 (empat) jenis dokumen laporan keuangan (laporan keuangan akhir tahun, laporan bulanan kinerja keuangan, laporan keuangan semesteran prognosis dan laporan keuangan bulanan Bendahara Pengeluaran. Sehingga secara pencapaian dokumen

telah terealisasi 4 dokumen dengan capaian 100%. Dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.825.000,- atau capaian sebesar 54,33%, Sisa pagu anggaran sebesar Rp 2.375.000,-. atau sebesar Rp 45,67% tidak terealisasi karena belanja cetak laporan keuangan tahunan disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Sehingga dengan demikian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang menjadi tanggungjawab Kasubbag Keuangan telah melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi keuangan dengan lancar selama 12 bulan dan dapat menutup buku akhir tahun pada tanggal 30 Desember 2019 serta kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dapat menyelesaikan 4 dokumen laporan keuangan tepat waktu atau dengan capaian kinerja 100%

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan yang telah dilaksanakan

Sedangkan Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan yaitu Kinerja Utama Melaksanakan penyusunan laporan keuangan SKPD (Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Laporan Keuangan Akhir Tahun) dengan indikator kinerja Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD dengan target 4 dokumen telah tercapai 100% Kemudian Kinerja Utama Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan SKPD dengan indikator kinerja Jumlah dokumen administrasi keuangan SKPD yang akuntabel dengan target 75 dokumen terealisasi 83 dokumen atau capaian sebesar 110,67%. Sehingga dengan demikian pernyataan sasaran strategis nomor 14 Sekretaris BPKAD Kab. Tala telah terpenuhi 100%.

Foto-Foto kegiatan Kasubbag Keuangan



7.15 Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 15

Sasaran strategis Nomor 15 ini adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada table sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi	
15	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	17	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	%	64,15	64,74	100,92	66	74,98	113,61
			Rata-rata capaian kinerja				100,92			113,61

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan indikator sasaran Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2018 adalah penilaian LAKIP Tahun 2017 sebesar 100,92 dan tahun 2019 adalah penilaian LAKIP Tahun 2018 adalah sebesar 113,61, mengalami kenaikan sebesar 12,69%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 15 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2019 dengan penjelasan dibawah ini.

Kasubbag Perencanaan

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut nomor 15 ini dilaksanakan dengan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan Kegiatan Penyusunan LKPJ dan LPPD serta LAKIP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Kasubbag Perencanaan.

Pencapaian Program dan Kegiatan Kasubbag Perencanaan

No	Program/Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi				
					Fisik		Keuangan		
					Kinerja	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
1	Penyusunan LKPJ dan LPPD serta LAKIP	Terlaksananya Penyusunan LKPJ dan LAKIP SKPD serta SKM	3 dok	3.520.200,-	3 Dok	100%	3.520.200	100%	

Pencapaian Perjanjian Kinerja Kasubbag Perencanaan

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
2. Melaksanakan penyusunan dokumen pelaporan kinerja SKPD sesuai ketentuan	1. Jumlah dokumen pelaporan kinerja SKPD	3 dokumen	3 dokumen	100%
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan dan kinerja SKPD	2. Jumlah dokumen Laporan Monitoring & Evaluasi perencanaan kinerja SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100%
4. Melaksanakan penyusunan SAKIP SKPD	3. Jumlah dokumen SAKIP SKPD pemeliharaan BMD sesuai ketentuan	8 dokumen	8 dokumen	100%
5. Melaksanakan penyusunan dokumen SKM SKPD	4. Jumlah dokumen SKM SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%

Analisis Pencapaian Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan :

1. Pada tahun 2019 Program *Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan* kegiatan Penyusunan LKPJ dan LPPD serta LAKIP yaitu telah melaksanakan kegiatan penyusunan 3 (tiga) buah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018, Laporan LKPJ Tahun 2019 dan Laporan LPPD Tahun 2019 BPKAD Kabupaten Tanah Laut. Dengan pagu dana sebesar Rp 3.520.200,- dan realisasi sebesar Rp 3.520.200,- atau capaian sebesar 100%.
2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018, Laporan LKPJ Tahun 2019 dan Laporan LPPD Tahun 2019 BPKAD Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan.
3. Pada tahun 2019 melaksanakan Reviu SAKIP Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Nilai 74,98 dari target nilai 66, maka dengan demikian capaian kinerja BPKAD Kab. Tanah Laut mengalami peningkatan kinerja.
4. Kasubbag Perencanaan dalam menjalankan tugasnya mendapat dukungan penuh baik dari Pimpinan SKPD, atasan langsung dan seluruh Pejabat Struktural /PPTK dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

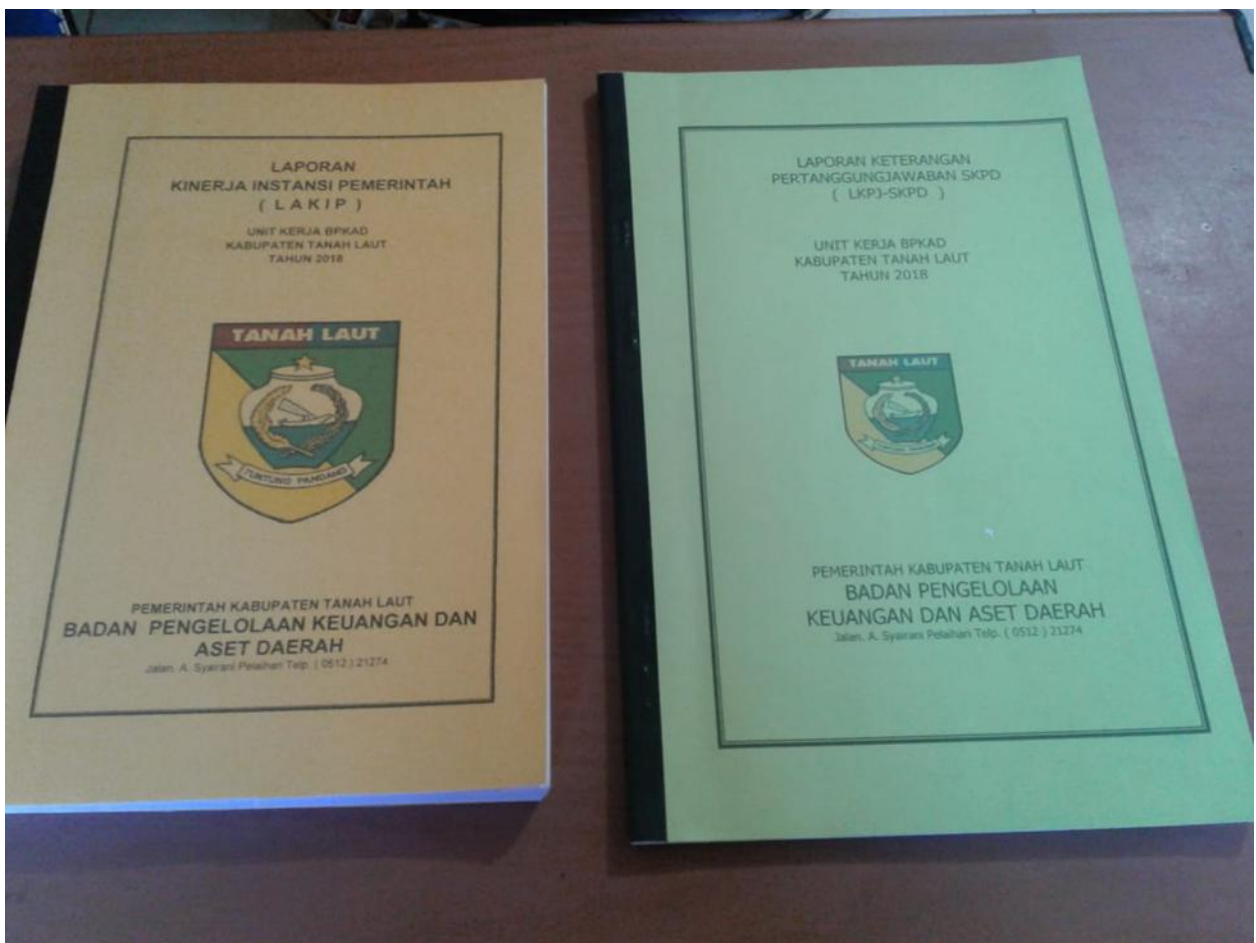
Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja yang telah dilaksanakan

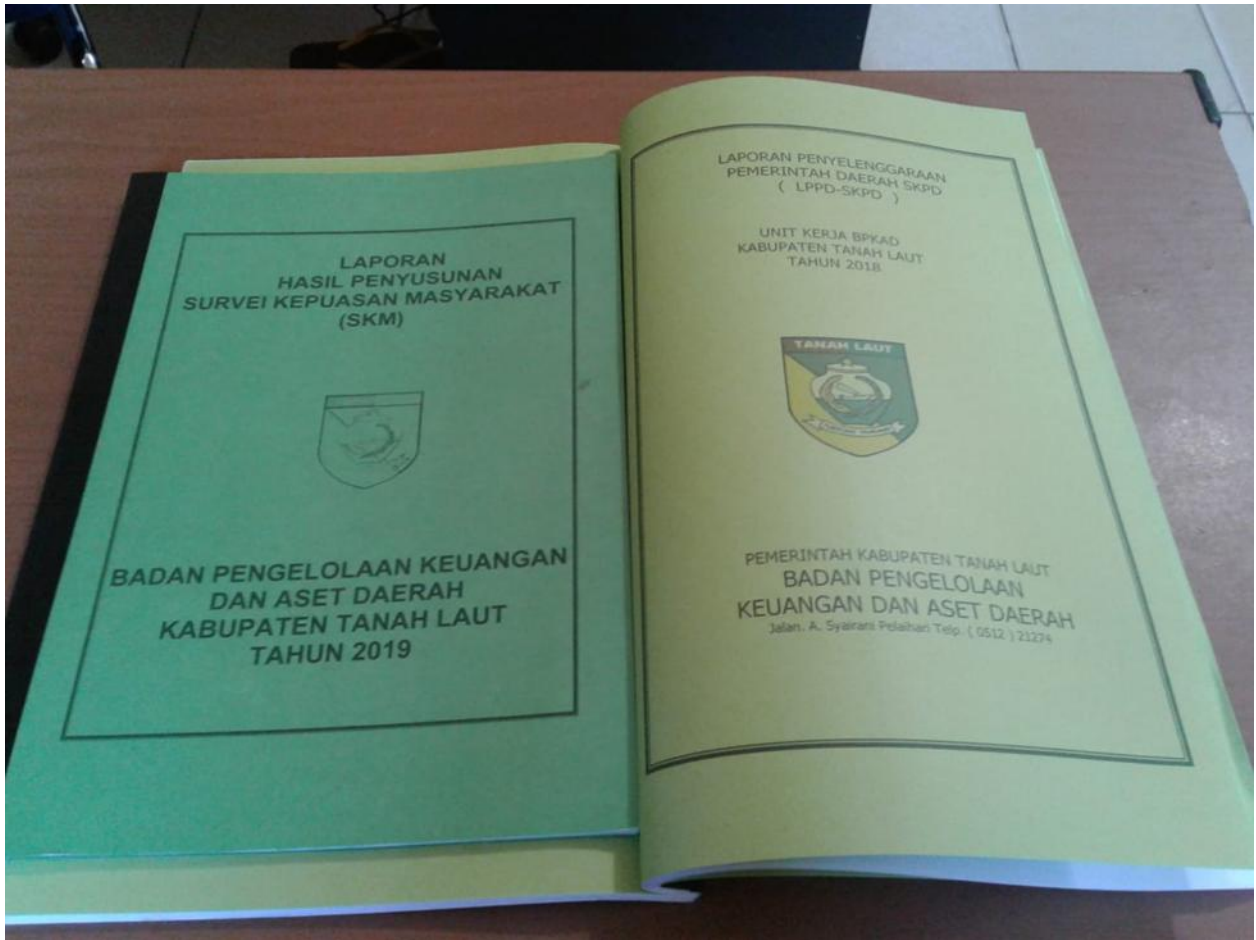
Sedangkan Perjanjian Kinerja Kasubbag Perencanaan Kinerja Utama

- 2) Melaksanakan penyusunan dokumen pelaporan kinerja SKPD sesuai ketentuan dengan indicator kinerja Jumlah dokumen pelaporan kinerja SKPD dengan target 3 dokumen Laporan (LAKIP, LKPJ dan LPPD) telah tercapai 100%.
- 3). Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan dan kinerja SKPD dengan indicator kinerja Jumlah dokumen Laporan Monitoring & Evaluasi perencanaan kinerja SKPD dengan target 4 dokumen (Laporan Monev Tw. I,II, III, IV) telah tercapai 100%.
- 4). Melaksanakan penyusunan

SAKIP SKPD dengan indikator kinerja Jumlah dokumen SAKIP SKPD pemeliharaan BMD sesuai ketentuan dengan target 8 dokumen (Renstra, Renja, Pohon Kinerja, IKU, LAKIP, Perjanjian Kinerja 2018 dan 2019, Rencana Aksi, Matrik Keselarasan). 5). Melaksanakan penyusunan dokumen SKM SKPD dengan indikator kinerja Jumlah dokumen SKM SKPD dengan target 1 dokumen SKM telah tercapai 100%. Sehingga dengan demikian pernyataan sasaran strategis nomor 15 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut juga telah terpenuhi 100%.

Foto-foto Hasil Kegiatan Kasubbag Perencanaan





8. Tabel perbandingan realisasi capaian sasaran strategis tahun 2018 dengan Tahun 2019

Berikut ini disajikan realisasi pencapaian sasaran strategis BPKAD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018 dan 2019 yang dapat dibandingkan realisasi pencapaian sasaran tahun 2019 dengan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya. Selain perbandingan realisasi pencapaian sasaran seperti yang telah dibahas sebelumnya dapat dilihat baik peningkatan maupun penurunan dalam realisasi pencapaian sasaran BPKAD Kabupaten Tanah Laut. Gambaran tentang target dan realisasi pencapaian sasaran strategis BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	SARGIS	IK SARGIS	IKU/ BUKAN IKU	TARGET KINERJA 2018 IKU/ BUKAN IKU	TARGET KINERJA 2019 IKU/ BUKAN IKU	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	NO	PROGRAM			NO	KEGIATAN			TARGET KINERJA OUTPUT 2018	TARGET KINERJA OUTPUT 2019	REALISASI OUTPUT TAHUN 2018	REALISASI FISIK % THN 2018	REALISASI OUTPUT TAHUN 2019	REALISASI FISIK % THN 2019	ANGGARAN TAHUN 2018(RP.)	REALISASI KEUANGAN TAHUN 2018	REALISASI KEU % TAHUN 2018	ANGGARA N TAHUN 2019(RP.)	REALISASI KEUANGA N TAHUN 2019	REALISASI KEU % TAHUN 2019
									URAIAN PROGRA M	SASARAN PROGRA M	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.Opini BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah	1.Opini BPK RI atas laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP																				
2	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	2.Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	2.Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	82	82	87	90																				
3.	Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan		3.Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	1.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1	Penyusunan raperda dan raperbup tentang APBD dan Perubahan APBD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Terlaksananya penyusunan dokumen APBD dan Perubahan APBD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	10 Dokumen	81,91%	1.187.254.900.00	1.071.383.500.00	90,24	517.934.600.00	282.571.560.00	54,56
4.	Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan		4.Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%					2	Peningkatan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Pengelola administrasi penatausahaan keuangan daerah	Terlaksananya proses tindak lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan, Terfasilitasinya penertiban SP2D, Tersusunnya perbup, SK, Dan SE, Bupati, Lap. TPG, TP, DAU Gaji, BPIS, Taperum Terlaksananya pembinaan terhadap bendahara pengeluaran, pengelolaan gaji SKPD	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	100%	170.000.000.00	163.006.300.00	95,89	188.777.100.00	152.507.750.00	80,79

											3	Peningkatan Administrasi Pemerintahan Daerah	Pengelola Dana Hibah, Dana Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, BTL dan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kab. Tala	Terlaksananya administrasi Dana Hibah, Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Penyertaan Modal pemerintah kabupaten tanah laut secara terib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	145.940.000.00	140.577.500.00	96.33	437.735.000.00	235.628.280.00	53.83
5.	Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan	Ya	5.Persentase pelaporan keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%				4	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Laporan keuangan semesteran & Prognosis realisasi anggaran, serta lap keuangan akhir tahun	40 SKPD yg menjadi Entitas akuntansi Pertanggungjawaban, Pelaksanaan APBD TA 2019	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Prognosis	-	1 Dokumen	-	0%	1 Dokumen	100%	0.00	0.00	-	18.870.300.00	17.942.700.00	95.08
											5	Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	SKPD yg menjadi entitas akuntansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terlaksananya penanaman dan dapat mengimplem ntasikan sistem pengelolaan keuangan berbasis Akrual berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah di Seluruh SKPD sebagai Entitas Akuntansi Pemerintah daerah melalui SIMDA Versi 2.7	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	100%	226.650.000.00	224.810.000.00	99.19	219.721.800.00	212.647.100.00	96.78
											6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Perda & Perbup ttg Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dgn SAP	Terlaksananya penyusunnya Lap. Keu Pemdab Kab. Tala yg accountable & dpt diterima oleh publik	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	11 Dokumen	100%	208.693.000.00	193.583.100.00	92.76	215.812.750.00	189.703.900.00	87.90

								2.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	Meningkatnya Pengembangan Pengelola aset Daerah	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	1 1	Perencanaan dan Pengadaan aset daerah	Pengurus Barang se Kabupaten Tanah Laut	Terlaksananya penyusunan RKBMD/RKPB MD TA 2018. , Terlaksananya penyusunan DKBMD/DPB MD dan DKBMD/DPB MD Perubahan TA. 2018. Terlaksananya penyusunan Laporan Stock Opname Tahun 2017	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	100%	192.402.500.00	183.790.600.00	95.52	129.482.700.00	125.623.418.00	97.02
8.	Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	Ya	10.Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%					1 2	Pengelolaan pemanfaatan aset daerah	SKPD se Kabupaten Tanah Laut	Terlaksananya rekonsiliasi pemanfaatan & penggunaan BMD, dan terlaksananya monitoring pemanfaatan & penggunaan BMD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	100%	77.378.300.00	60.029.800.00	77.58	148.423.450.00	115.524.200.00	77.83
9.	Meningkatnya kualitas inventarisasi BMD sesuai ketentuan		11.Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	100%	100%	100%	100%					1 3	Penyusunan tabulasi data aset tetap	Pengelola Barang Pemerintah Kab. Tanah Laut	Terlaksananya Penyusunan Tabulasi Data Aset Tetap. Penghapusan BMD, Penjualan BMD, dan Pelaksanaan Move BMD	22 dokumen	34 dokumen	18 dokumen	81,82%	34 dokumen	100%	318.352.250.00	291.332.000.00	91.51	486.851.850.00	433.187.400.00	88.98
10.	Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan		12.Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	108,80%					1 4	Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset daerah	Pengelola Barang Pemerintah Kab. Tanah Laut	Terlaksananya Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	100%	208.238.000.00	136.195.000.00	65.40	132.490.500.00	67.738.000.00	51.13
11.	Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran	Ya	13.Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	100%	100%	100%	100%	3.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran	Tercapainya pelayanan Administrasi Perkantoran	1 5	Penyediaan jasa surat menyurat	Administrasi Kantor BPKAD	Terlaksananya penyediaan paket pengiriman	18 Paket Pengiriman	20 Paket Pengiriman	4 Paket Pengiriman	20%	20 Paket Pengiriman	100%	500.000.00	160.000.00	32.00	450.000.00	450.000.00	100.00
12.	Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	Ya	14.Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan dipelihara dgn baik	100%	100%	100%	100%					1 6	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor BPKAD	Terlaksananya penyediaan Biaya Rekening Telepon, Internet, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%	318.000.000.00	192.807.235.00	60.63	318.000.000.00	202.387.530.00	63.64

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dari tahun 2018, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan pada masa Renstra SKPD Tahun 2018-2023, yaitu telah dicapai target akuntabel / dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, yaitu terbukti dengan telah diraihnya opini WTP dari auditor BPK RI selama 6 (enam) Tahun berturut-turut, hal ini dikarenakan adanya dukungan dan komitmen dari atasan langsung dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut untuk bersama-sama dalam meningkatkan pelayanan kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Tanah Laut.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Rencana Kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan Pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Rencana Kinerja tahunan yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang sudah ditentukan.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi yang lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Sesuai pilihan prioritas rencana kinerja tahunan BPKAD Kabupaten Tanah Laut ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek apakah Instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur besar pencapaian target – target yang ditetapkan.

Rencana-rencana yang telah ditetapkan selanjutnya diaplikasikan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya dalam bentuk Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-SKPD). Berkaitan dengan

pelaksanaan anggaran tentunya haruslah dipertanggungjawabkan pelaksanaannya, sehingga akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, penatausahaan/pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. REALISASI ANGGARAN

1. RINGKASAN REALISASI APBD BPKAD 2018 DAN 2019

Ringkasan realisasi APBD BPKAD Kabupaten Tanah Laut realisasi Belanjanya pada Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Penggabungan Belanja Tidak Langsung (BTL) BPKAD Kabupaten Tanah Laut sebagai SKPD dan PPKD tahun 2018 dan tahun 2019

Belanja tidak langsung untuk SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bansos, Belanja Tidak Terduga dan Transfer. .Alokasi anggaran belanja tidak langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah sebesar Rp 292.095.573.655,-realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 278.916.414.107,- atau 95,49%,.Alokasi anggaran belanja tidak langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 adalah sebesar Rp 248.403.114.751,-realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 231.641.949.407,- atau 93,26%, sedangkan Belanja tidak langsung untuk SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bansos, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan lainnya serta Belanja Tidak Terduga,dengan penjelasan masing-masing rincian sebagai berikut :

- **Belanja Tidak Langsung BPKAD sebagai SKPD tahun 2019 dan tahun 2018**

Belanja tidak langsung untuk SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 yang terdiri dari Belanja Pegawai. Alokasi anggaran belanja tidak langsung adalah sebesar Rp 18.918.457.671 ,- dengan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 15.913.574.847,- atau 84,11 %. Sedangkan Belanja tidak langsung untuk SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 yang terdiri dari Belanja Pegawai. Alokasi anggaran belanja tidak langsung adalah sebesar Rp 15.767.420.001 ,- dengan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 13.590.017.976,- atau 86,19 %. Sehingga terdapat penurunan realisasi pada tahun 2019 dari sisi belanja BTL dari tahun 2018.

- **Belanja Tidak Langsung BPKAD sebagai PPKD tahun 2019 dan tahun 2018**

Belanja tidak Langsung BPKAD sebagai PPKD Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 terdiri dari Belanja Hibah, Belanja Bansos, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan lainnya serta Belanja Tidak Terduga. Alokasi anggaran belanja tidak langsung PPKD kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp 273.177.115.984- dan realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp 263.002.839.260,- atau 96,28% dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja Hibah anggaran Rp 18.277.500.000,- terealisasi sebesar Rp 16.150.537.750,- atau 88,36%.
- 2) Belanja Bantuan Sosial anggaran Rp 10.023.213.000,- terealisasi sebesar Rp 6.914.163.000,- atau 68,98%.
- 3) Belanja tidak Terduga anggaran sebesar Rp 4.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp 12.992.672,00 atau 0,32%.

- 4) Belanja Transfer anggaran sebesar Rp 240.876.402.984,- terealisasi sebesar Rp 239.925.145.838,00 atau 99,61%.

Belanja tidak Langsung BPKAD sebagai PPKD Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 terdiri dari Belanja Hibah, Belanja Bansos, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan lainnya serta Belanja Tidak Terduga. Alokasi anggaran belanja tidak langsung PPKD kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp 232.635.694.750- dan realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp 218.051.931.431,- atau 93,74% dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja Hibah anggaran Rp 47.390.675.500,- terealisasi sebesar Rp 37.685.800.141,- atau 79,53%.
- 2) Belanja Bantuan Sosial anggaran Rp 4.224.400.000,- terealisasi sebesar Rp 3.706.334.000,- atau 87,74%.
- 3) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/dan Pemerintah Desa anggaran Rp 3.348.893.350,- terealisasi sebesar Rp 3.348.893.350,- atau 100%.
- 4) Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa anggaran Rp 173.421.725.900,- terealisasi sebesar Rp 172.541.089.900,- atau 99,50 %.
- 5) Belanja tidak Terduga anggaran sebesar Rp 4.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp 769.814.040,00 atau 19,25%.

B. Khusus untuk Belanja Langsung (BL) BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 dan tahun 2018

Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Alokasi anggaran belanja langsung BPKAD Tahun 2019 adalah sebesar Rp 6.717.863.645,- dengan realisasi belanja langsung sebesar Rp 5.478.507.961 , -atau 81,55%. Sedangkan Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Alokasi anggaran belanja langsung BPKAD Tahun 2018 adalah sebesar Rp 6.024.920.600,- dengan realisasi belanja

langsung sebesar Rp 5.333.621.230 , -atau 88,53%. Sehingga dengan demikian terdapat penurunan realisasi dari sisi Belanja Langsung pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018.

C. Penggabungan Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 dan tahun 2018

Sedangkan jumlah total Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 alokasi anggaran belanja total adalah sebesar Rp 25.636.321.316,- dengan realisasi belanja total adalah sebesar Rp 21.392.082.808,- atau 83,44 %. Sedangkan jumlah total Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 alokasi anggaran belanja total adalah sebesar Rp 21.792.340.601,- dengan realisasi belanja total adalah sebesar Rp 18.923.639.206,- atau 86,84 %. Sehingga dengan demikian terdapat penurunan realisasi dari sisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018.

2. RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI APBD BPKAD 2019 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2019 pada umumnya sudah tercapai dan sesuai dengan target pencapaian kinerja secara keseluruhan, tidak memaksakan menghabiskan anggaran karena disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dalam suatu kegiatan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak melaksanakan tugas tugas yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang sebagian besar telah ditetapkan dalam SPM oleh masing-masing Kementerian, namun demikian

dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2019 pagu anggaran murni adalah sebesar Rp 5.967.883.845,- setelah perubahan adalah sebesar Rp 6.717.863.645,- dengan realisasi pada akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp 5.478.507.961,-.

Jumlah tingkat capaian kinerja belanja langsung SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sampai akhir Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar 81,55 %.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut untuk saat ini cukup memadai baik dari jumlah dan SDM aparatur maupun sarana dan prasarana lainnya seperti kendaraan dinas/operasional serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang dapat menunjang kelancaran tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Adapun ringkasan anggaran dan realisasi APBD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun anggaran 2019 berdasarkan program dan kegiatan yang terdiri dari 7 Program dan 38 Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.9

RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN PROGRAM DAN

Program	Kegiatan	Alokasi Dana (RP)	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja (%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat	450.000,00	450.000,00	100,00
	2. Penyediaan jasa	318.000.000,00	202.387.530,00	63,64

	komunikasi, sumber daya air dan listrik			
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	145.800.000,00	91.231.700,00	62,57
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	34.042.948,00	14.107.500,00	41,44
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	31.280.200,00	18.828.400,00	60,19
6.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	54.000.000,00	26.083.350,00	48,30
7.	Penyediaan alat tulis kantor	51.263.700,00	23.548.900,00	45,94
8.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	52.189.700,00	31.924.400,00	61,17
9.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.500.000,00	12.248.000,00	90,71
10.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			
11.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	303.064.364,00	266.961.400,00	88,09
12.	Penyediaan makanan dan minuman	6.480.000,00	2.820.000,00	43,52
13.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80.994.000,00	71.506.000,00	88,29
14.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	1.150.171.400,00	1.136.349.047,00	98,80
15.	Peningkatan Manajemen	100.000.000,00	89.895.000,00	89,90

	aset/barang daerah pada SKPD			
	16. Penyusunan administrasi pengelolaan kepegawaian	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
	17. Penyediaan Jasa Penunjang kinerja SKPD	13.074.800,00	8.698.350,00	66,53
		431.490.000,00	426.224.752,00	98,78
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2. Pengadaan Mebeluer 3. Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	90.000.000,00 30.378.733,00 80.000.000,00	79.617.250,00 29.179.000,00 64.000.000,00	88,46 96,05 80,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	55.000.000,00	21.850.000,00	39,73
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan LKPJ dan LPPD serta LAKIP	5.200.000,00 3.520.200,00	2.825.000,00 3.520.200,00	54,33 100
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Perubahan APBD. 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 3. Pengelolaan akuntansi pendapatan dan	517.934.600,00 215.812.750,00 193.680.050,00	282.571.560,00 189.703.900,00 177.643.085,00	54,56 87,90 91,72

	piutang.			
	4. Pengelolaan akuntansi belanja dan beban.	193.680.050,00	207.022.400,00	95,51
	5. Peningkatan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah.	188.777.100,00	152.507.750,00	80,79
	6. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	219.721.800,00	212.647.100,00	96,78
	7. Peningkatan Administari Pembiayaan Daerah.	437.755.000,00	235.628.280,00	53,83
	8. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah			
	9.Penyusunan Lap.Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Lap. Keuangan Semesteran & Prognosis realisasi Anggaran, serta lapkeu akhir tahun	661.489.400,00	542.614.689,00	82,03
	10.Penyusunan Standar Satuan Harga			
		87.061.800,00	81.045.900,00	93,09
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD	7.453.800,00	7.453.800,00	100

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	1. Penyusunan tabulasi data aset tetap.	486.851.850,00	433.7187.400,00	88,98
	2. Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset daerah	132.490.500,00	67.738.000,00	51,13
	3. Perencanaan dan pengadaan aset daerah	129.482.700,00	125.623.418,00	97,02
	4. Pengelolaan pemanfaatan aset daerah	148.423.450,00	115.524.200,00	77,83

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Tanah Laut memiliki jumlah pagu anggaran murni adalah sebesar Rp 5.967.883.845,-setelah perubahan adalah sebesar Rp 6.717.863.645,- dengan realisasi pada akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp 5.478.507.961,-. Jumlah tingkat capaian kinerja belanja langsung SKPDBadan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Tanah Laut sampai akhir Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar 81,55 %.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 yang merupakan tahun pertama Renstra 2018-2023, sehingga dengan demikian tujuan BPKAD yaitu

1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan keuangan secara tertib, akuntabel & transparan.
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan penatausahaan aset daerah secara tertib.
3. Terwujudnya tata kelola administrasi yg tertib, efektif dan efisien sudah tercapai dengan diraihinya predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 6 Tahun berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Laporan LAKIP ini memuat perencanaan dan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditentukan.

Dapat disimpulkan bahwa dari 15 indikator kinerja sasaran strategis yang ditargetkan hampir semuanya dapat dilaksanakan dan tercapai target kinerjanya, pada tahun 2019 dibandingkan pada tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Sasaran Nomor 1 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan indikator sasaran nomor 1 Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2019 sebesar 100%, dan pada Tahun 2018 juga mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar

100%. Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017 untuk yang kelima kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 3 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 5 temuan, bukti surat Nomor : 11.B/LHP/XIX.BJM/05/2018 tanggal 25 Mei 2018. sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Sedangkan pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018 untuk yang keenam kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 8 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 5 temuan, bukti surat Nomor : 12.B/LHP/XIX.BJM/05/2019 tanggal 20 Mei 2018 dan Nomor : 12.C/LHP/XIX.BJM/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Untuk mendukung sasaran nomor 1 dan IKU BPKAD ini dilaksanakan dan menjadi Perjanjian Kinerja, Program dan kegiatan serta tanggungjawab 4 (empat) Bidang di lingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yaitu Bidang Belanja dan Pembiayaan, Bidang Akuntansi, Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset dan Bidang Penatausahaan Aset.

2. Sasaran nomor 2 Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama BPKAD maka sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 selama 6 (enam) tahun dilaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SKPD khususnya terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset daerah terhadap 4 bidang pelayanan yaitu pelayanan penerbitan SP2D, pelayanan Bansos, hibah dan bantuan keuangan lainnya, pelayanan pengelolaan asset daerah dan pelayanan pada bidang Akuntansi. Jumlah responden sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang dari Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survei kepada masyarakat yang menjadi konsumen dari 4 bidang pelayanan tersebut, dengan jumlah responden

adalah 150 (seratus lima puluh) orang. Kegiatan pengumpulan data telah dilaksanakan dalam periode minggu terakhir bulan Mei sampai dengan minggu keempat bulan Juli. Dari hasil survey tersebut didapat nilai indeks dengan hasil 87 dari target 82 pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 didapat nilai indeks dengan hasil 90 dari target 82, sehingga dengan demikian terdapat peningkatan trend kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pencapaian nilai hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut berada dalam mutu pelayanan SANGAT BAIK. Pada tahun 2019 didapat nilai indek dengan hasil 90 dengan demikian target dapat terpenuhi dengan realisasi telah melampaui target yang ditetapkan. Dengan demikian bahwa dengan adanya hasil survey kepuasan masyarakat yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut berada dalam mutu pelayanan sangat baik. Untuk mendukung sasaran nomor 2 dan IKU BPKAD ini dilaksanakan dan menjadi Perjanjian Kinerja, Program dan kegiatan serta tanggungjawab Bagian Sekretariat.

3. Sasaran strategis nomor 3 Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan 100%. Penyampaian penetapan APBD dan APBD Perubahan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa batas waktu penyampaian penetapan APBD dan APBD Perubahan yaitu paling lambat pada tanggal 31 Desember.

Pada tahun 2018 penetapan APBD Tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018 Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017, dan untuk penetapan APBD Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2018 Nomor 5

Tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2018 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

Sedangkan pada tahun 2019 penetapan APBD Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2019 Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018, dan untuk penetapan APBD Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2019 Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2019 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%. Sasaran nomor 3 ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan dan indikator sasaran nomor 3 ini dilaksanakan oleh Kasubbid Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja serta Program Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan Kegiatan Penyusunan raperda dan raperbup tentang APBD dan Perubahan APBD tahun 2019.

4. Sasaran strategis nomor 4 Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan yang merupakan perjanjian kinerja Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100 %. Untuk mendukung sasaran strategis Kepala Bidang Pembiayaan nomor 4 ini Indikator sasaran dilaksanakan oleh Kasubbid Perbendaharaan dan Verifikasi dan Kasubbid Pembiayaan dengan pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2019 dan pencapaian Program dan Kegiatan sesuai DPA Tahun 2019. Penyerapan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.746.912.704.093,00,- dengan realisasi belanja sebesar Rp 1.498.174.259.705,95 ,- atau capaian sebesar 85,76%,, sedangkan pada tahun 2018 pagu anggaran sebesar Rp 1.588.171.203.597,00,- dengan realisasi sebesar Rp 1.350.553.289.307,60 ,- atau capaian sebesar 85,04%, sehingga pada tahun 2019 penyerapan anggaran belanja mengalami kenaikan sebesar 0,72%, hal ini disebabkan adanya kebijakan rasionalisasi/efisiensi keuangan daerah namun secara

kinerja rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini setiap tahunnya melebihi target yang telah ditetapkan.

5. Sasaran strategis nomor 5 Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan adalah perjanjian kinerja Kepala Bidang Akuntansi capaian kerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100 %. Untuk mendukung sasaran strategis Kepala Bidang Akuntansi nomor 5 Indikator sasaran ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) Kasubbid yaitu Kasubbid Pengelolaan Kas, Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban dan Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Piutang dengan pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2019 dan pencapaian Program dan Kegiatan sesuai DPA Tahun 2019.

Pada tahun 2014 Laporan Keuangan SKPD berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual), sehingga capaian kinerja hanya mencapai 50%, karena Laporan Keuangan SKPD belum sepenuhnya berbasis akrual.

Mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos Ekuitas Dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual) dan pada tahun 2015 direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai akuntansi berbasis akrual. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 dibuat berdasarkan Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, adapun yang membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 ini adalah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yaitu BPKAD Kabupaten Tanah Laut. Demikian juga pada tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 Laporan Keuangan SKPD berbasis akrual telah disampaikan oleh seluruh SKPD dan telah di Audit oleh BPK – RI dan telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 (enam) tahun berturut-turut

terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis akrual. Dengan demikian bahwa pelaporan keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berbasis Akrual dapat dijamin terpenuhi 100%.

6. Sasaran strategis nomor 6 Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan, Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan dan Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 6 Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2019.

Pengamanan hukum tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berupa penyertifikatan Tanah Milik Daerah dari target sebesar 45 permohonan sertifikat pada tahun anggaran 2019, realisasi sebanyak 45 permohonan yang sudah dimasukkan ke Kantor Pertanahan Kab. Tanah Laut. Permohonan penyertifikatan tersebut meliputi tanah yang berlokasi di Kecamatan Pelaihari sebanyak 13 persil, Kecamatan Kurau sebanyak 4 persil, Kecamatan Takisung sebanyak 7 persil, Kecamatan Batu Ampar sebanyak 5 persil, Kecamatan Bumi Makmur sebanyak 3 persil, Kecamatan Kintap sebanyak 4 persil, Kecamatan Tambang Ulang sebanyak 2 persil, Kecamatan Bati-Bati sebanyak 1 persil dan Kecamatan Panyipatan sebanyak 6 persil.

Terlaksananya pengamanan Hukum Kendaraan Dinas Bermotor berupa pembuatan BPKB duplikat dari target 3 permohonan BPKB duplikat, realisasi sebanyak 3 permohonan dan BPKB duplikat tersebut sudah terbit pada tanggal 23 Juli 2019. Dan pembuatan BPKB duplikat akan kembali dilanjutkan di Tahun Anggaran 2020.

Terlaksananya rekonsiliasi pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilakukan terhadap 41 SKPD dan dilaksanakan sebanyak 5 kali di Tahun Anggaran 2019.

Terlaksananya Pengamanan Tanah Milik Daerah berupa penelusuran tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tercatat dineraca aset namun belum jelas lokasinya, dari target 50 persil tanah yang belum dijelas lokasinya 40 persil tanah sudah ditemukan lokasinya. Hasil penelusuran tersebut akan dilaporkan dalam bentuk dokumen.

Terlaksananya pemeliharaan atas bangunan dan gedung PPKD berupa rumah dinas milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebanyak 6 unit rumah dinas.

Terlaksananya pemeliharaan atas peralatan dan mesin PPKD berupa kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebanyak 10 buah kendaraan dinas.

Terlaksananya Penguasaan Fisik BMD-PPKD / Pengamanan Fisik atas Tanah Milik Daerah berupa :

Pemasangan Papan Nama Kepemilikan sebanyak 10 buah dengan rincian sebagai berikut : 1 buah di tanah peruntukkan Objek Wisata Air Terjun Bajuin, 1 buah di tanah peruntukkan Objek Wisata Pantai Takisung, 1 buah di tanah peruntukkan SDN Batakan 3 Filial, 1 buah di tanah peruntukkan rencana SMPN 6 Kintap, 1 buah di tanah peruntukkan SDN Sungai Jelai, 1 buah di tanah peruntukkan RSUD Sarang Halang, 1 buah di tanah peruntukkan Poskesdes Ranggung Dalam, 1 buah di tanah peruntukkan Polindes Kuala Tambangan, 1 buah di tanah peruntukkan Poskesdes Ranggung, 1 buah di tanah peruntukkan TK Negeri Pembina Kec Kurau.

Pemasangan Patok Tanda Batas Tanah sebanyak 36 buah dengan rincian sebagai berikut : 4 buah patok di tanah peruntukkan Objek Wisata Air Terjun Bajuin, 4 buah patok di tanah peruntukkan Objek Wisata Pantai Takisung, 5 buah patok di tanah peruntukkan SDN Batakan 3 Filial, 4 buah patok di tanah

peruntukkan rencana SMPN 6 Kintap, 2 buah patok di tanah peruntukkan SDN Sungai Jelai, 8 buah patok di tanah peruntukkan RSUD Sarang Halang, 2 buah patok di tanah peruntukkan Poskesdes Ranggung Dalam, 2 buah patok di tanah peruntukkan Polindes Kuala Tambangan dan 4 buah patok di tanah peruntukkan Poskesdes Ranggung.

Terlaksananya monitoring pengamanan BMD yang tersebar di 11 kecamatan dari target 60 kali realisasi sebanyak 73 kali.

7. Sasaran strategis nomor 7 Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 7 Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Perencanaan Kebutuhan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2019.

Terlaksananya penyusunan RKBMD terdiri dari RKBMD Perubahan Tahun Anggaran 2019 dan RKBMD Tahun Anggaran 2020.

Terlaksananya penyusunan 1 dokumen Standar Satuan Harga yang berisi Satuan Harga Perubahan 2019 dan Standar satuan harga untuk Tahun 2020.

Terlaksananya pembuatan Standar Kebutuhan Barang sebanyak 40 Dokumen yang berasal dari hasil analisa atas Kartu Inventaris Barang seluruh SKPD di Kabupaten Tanah Laut, dokumen tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Anggaran dalam pengadaan barang dan jasa di SKPD.

Terlaksananya rekonsiliasi/ verifikasi Barang Pakai Habis terhadap 40 SKPD setiap Triwulan sehingga dalam Tahun 2019 telah dilaksanakan 4 kali rekonsiliasi dengan seluruh SKPD se Kabupaten Tanah Laut..

Terlaksananya penyusunan Beban Persediaan sebanyak 40 Dokumen berasal dari SKPD se Kabupaten Tanah Laut.

Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan RKBMD, Penyusunan Beban Persediaan dan Standar Satuan Harga dengan Jumlah SKPD yang mengikuti

Sosialisasi Penyusunan RKBMD, Penyusunan Beban Persediaan dan Standar Satuan Harga sesuai ketentuan. Sebanyak 40 SKPD. Melaksanakan Monitoring Barang Pakai Habis dengan Jumlah Barang Pakai Habis SKPD yang telah termonitoring sebanyak 40 SKPD baik di seluruh Kecamatan maupun melakukan monitoring triwulanan dari aplikasi Simda.

8. Sasaran strategis nomor 8 Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 8 Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Pemanfaatan dan Penggunaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2019

Terbentuknya Tim Monitoring Pemanfaatan dan Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/125-KUM/2019 tanggal 7 Januari 2019, salah satu tugasnya adalah melaksanakan monitoring pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah di 11 (sebelas) Kecamatan.

Terlaksananya Penilaian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2019.

Untuk tahun anggaran 2019 terdapat beberapa permohonan dari pihak ketiga untuk memanfaatkan barang milik daerah, baik berupa tanah maupun bangunan milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan telah dilaksanakan penilaian oleh Tim Penilai Pemerintah dari Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin pada tanggal 06 s/d 09 Pebruari 2019.

Hasil Penilaian adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit Rumah Negara Golongan II Type A Permanen yang berlokasi di Jalan Pesantren Al Mubarak Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Bangunan tersebut berada di kompleks rumah pemotongan hewan dengan luasan $\pm 36 \text{ m}^2$ dengan bangunan permanen, kondisi bangunan sedang. Penilaian dilaksanakan pada tanggal 09 Pebruari 2019. Berdasarkan laporan penilaian dari Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin Nomor : LAP-0072/2/1/WKN.12/KNL.03/09.01/2019 tanggal 14 Maret 2019 telah diperoleh nilai sewa sebesar Rp. 1.830.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) selama 6 (enam) bulan.
- b. Sebagian tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Obyek penilaian terdiri dari dua bidang untuk dimanfaatkan sebagai Kantor Bank Kalsel dan Booth ATM. Tanah dan bangunan untuk Kantor Bank Kalsel berada di bagian tengah kompleks Kantor Bupati dan melayani pegawai dan SKPD namun tertutup pagar keliling Kantor Bupati. Tanah dan bangunan untuk Booth ATM berada di depan Kantor Kas Daerah Komplek Kantor Bupati. Penilaian dilaksanakan pada tanggal 09 Pebruari 2019. Berdasarkan laporan penilaian dari Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin Nomor : LAP-0070/2/1/WKN.12/KNL.03/09.01/2019 tanggal 14 Maret 2019 telah diperoleh nilai sewa :
 - c. Bangunan Kantor Bank Kalsel sebesar Rp. 95.625.000,- per 3 tahun.
 - d. Sebagian Tanah untuk bangunan Booth ATM sebesar Rp. 47.025.000,- per 3 tahun.
 - e. Sebagian Tanah dan Bangunan Gudang. Obyek penilaian berupa sebagian tanah dan bangunan gudang yang berlokasi di Jalan Raya Telkom Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari. Penilaian dilaksanakan pada tanggal 09 Pebruari 2019. Berdasarkan laporan penilaian dari Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin Nomor :

LAP-0071/2/1/WKN.12/KNL.03/09.01/2019 tanggal 14 Maret 2019 telah diperoleh nilai sewa :

- 1 (satu) unit bangunan gudang pupuk seluas \pm 909,84 m² sebesar Rp. 87.025.000,-.
- 1 (satu) unit bangunan gudang pupuk seluas \pm 595 m² sebesar Rp. 60.405.000,-.

f. Sebagian Tanah dan Bangunan Rumah Dinas. Obyek penilaian berupa sebagian tanah dan bangunan rumah dinas yang berlokasi di Jalan A. Syairani Kecamatan Pelaihari yang berada di Komplek Balai Latihan Kerja yang terdiri dari 5 (lima) bidang yang dimanfaatkan sebagai rumah dinas dengan luas tanah dan bangunan adalah 36 m² dengan rincian : sebanyak 1 (satu) unit dengan bangunan permanen dan kondisi bangunan baik serta sebanyak 4 (empat) unit seluas 45 m² dengan bangunan permanen dan kondisi bangunan sedang. Penilaian dilaksanakan pada tanggal 09 Pebruari 2019. Berdasarkan laporan penilaian dari Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin Nomor : LAP-0073/2/1/WKN.12/KNL.03/09.01/2019 tanggal 14 Maret 2019 telah diperoleh nilai sewa yaitu :

- Rumah dinas Nomor 50.10.03/004 dengan luas 45 m² sebesar Rp. 2.175.000,- per 6 bulan.
- Rumah dinas Nomor 50.10.03/008 dengan luas 45 m² sebesar Rp. 1.830.000,- per 6 bulan.
- Rumah dinas Nomor 50.10.03/009 dengan luas 45 m² sebesar Rp. 1.830.000,- per 6 bulan.
- Rumah dinas Nomor 50.10.03/013 dengan luas 45 m² sebesar Rp. 1.830.000,- per 6 bulan.
- Rumah dinas Nomor 50.10.03/014 dengan luas 36 m² sebesar Rp. 1.830.000,- per 6 bulan.

g. Obyek penilaian berupa peralatan dan mesin yang akan disewakan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Laut, yang umumnya disewakan kepada masyarakat umum

yang memerlukan. Penilaian dilaksanakan pada tanggal 09 Pebruari 2019. Berdasarkan laporan penilaian dari Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin Nomor : LAP-0074/2/2/WKN.12/KNL.03/09.01/2019 tanggal 14 Maret 2019 telah diperoleh nilai sewa yaitu :

- Dump truck sebesar Rp. 298.000,- per hari.
 - Mobil tangki air sebesar Rp. 333.000,- per hari.
 - Arm roll sebesar Rp. 350.000,- per hari.
 - Kendaraan roda tiga sebesar Rp. 60.000,- per hari.
 - Skylife sebesar Rp. 1.800.000,- per hari.
 - Genset sebesar Rp. 734.000,- per hari.
 - Chainsaw sebesar Rp. 131.000,- per hari.
 - Toilet portable sebesar Rp. 990.000,- per hari.
 - Tempat sampah sebesar Rp. 61.000,- per hari.
 - Lampu sorot sebesar Rp. 83.000,- per hari
- h. 1 (satu) unit alat pencacah pupuk organik yang berlokasi di TPA Bakunci Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari. Penilaian dilaksanakan pada tanggal 09 Pebruari 2019. Berdasarkan laporan penilaian dari Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin Nomor : LAP-0075/2/2/WKN.12/KNL.03/09.01/2019 tanggal 14 Maret 2019 telah diperoleh nilai sewa yaitu sebesar Rp. 309.000,- per bulan.

Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan BMD.

Kegiatan inventarisasi pemanfaatan BMD dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu :

- Melaksanakan inventarisasi pemanfaatan BMD di Kabupaten Tanah Laut secara on desk terhadap 41 (empat puluh satu) SKPD.
- Melaksanakan tindak lanjut hasil inventarisasi pemanfaatan BMD SKPD (monitoring ke pihak yang memanfaatkan BMD).

Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah di 2 (dua) Kecamatan.

Sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan informasi kepada Aparat Desa dan Kecamatan mengenai pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

9. Sasaran strategis nomor 9 Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase BMD yang dicatat dengan akurat sesuai ketentuan adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penatausahaan Aset capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 9 Kepala Bidang Penatausahaan Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Inventarisasi dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2019.

Terlaksananya kegiatan inventarisasi BMD yang dicatat dengan akurat dalam bentuk 21 (dua puluh satu) Dokumen Laporan Aset, 1 (satu) Dokumen Tindak Lanjut Sensus , atau (84 Buku Laporan aset dan 6 buku Laporan tindak lanjut sensus).

10. Sasaran strategis nomor 10 Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penatausahaan Aset capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 10 Kepala Bidang Penatausahaan Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2019.

Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan kegiatan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan sesuai dengan ketentuan, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Kegiatan pemindahtanganan dalam bentuk hibah keluar sebanyak 108 (seratus delapan) berkas/kegiatan;
- b. Hibah masuk sebanyak 11 (sebelas) berkas;
- c. Kegiatan pemusnahan sebanyak 54 (lima puluh empat) kegiatan;
- d. Kegiatan penghapusan barang milik daerah Kab. Tanah Laut dengan menerbitkan sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Surat Keputusan dengan rincian sebagai berikut :
 - Sebanyak 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Tanah Laut selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD tentang Penghapusan BMD Kab. Tanah Laut dari Daftar Barang Pengelola Barang dan ;
 - Sebanyak 88 (delapan puluh delapan) Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Tanah Laut selaku Pengelola Barang tentang Penghapusan BMD Kab. Tanah Laut dari Daftar Barang Pengguna Barang.

Dari 88 (delapan puluh delapan) Surat Keputusan penghapusan BMD, karena disebabkan :

- a. Karena Pemindahtanganan (Hibah keluar) sebanyak 21 SK
- b. Karena Pengalihan Status Penggunaan sebanyak 1 SK
- c. Karena Pemusnahan sebanyak 57 SK
- d. Karena Sebab Lain sebanyak 9 SK.

Sedangkan Realisasi perjanjian kinerja Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan aset daerah secara umum mengalami kenaikan dari target awal karena adanya usulan SKPD yang tidak bisa di prediksi. Pada Pemindahtanganan BMD mengalami kenaikan 15,7% dari target awal di karenakan adanya hibah masuk yang tidak bisa di prediksi.

Pada Pemusnahan BMD ada kenaikan 7,1 % dari target awal dikarenakan adanya usul pemusnahan SKPD yang telah dilaksanakan

pembongkaran bangunannya, sehingga harus segera di buatkan Berita Acara Pemusnahannya.

Pada Penghapusan BMD mengalami kenaikan 3,6% dari target awal dikarenakan adanya kenaikan Pemusnahan BMD pada beberapa SKPD.

11. Sasaran strategis nomor 11 Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran dengan indikator sasaran Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 11 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2019. Sehingga secara pencapaian kinerja telah terealisasi 100% dan telah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Penghargaan Pengurus Barang Terbaik pada tanggal 2 Desember 2019.
12. Sasaran strategis nomor 12 Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD dengan indikator sasaran Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 12 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2019.
13. Sasaran strategis nomor 13 Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD dengan indikator sasaran Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 13 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2019.

Pada tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan penyusunan 2 (dua) dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Keputusan Kepala BPKAD Kabupaten Tanah laut Nomor 050.13/20/BPKAD tanggal 18 Juli 2019 dan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2019 BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan surat Keputusan Kepala BPKAD Kabupaten Tanah laut Nomor 050.13/21/BPKAD/2019 tanggal 29 Juli 2019.

14. Sasaran strategis nomor 14 Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD dengan indikator sasaran Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 14 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Keuangan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2019.

Pada tahun 2019 Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan yaitu telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pelayanan administrasi keuangan atau dalam rangka pelayanan penatausahaan keuangan dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yaitu pelayanan administrasi keuangan GU (BL), BTL LS, Gaji/Tunjangan, IWP, BPJS, JKK dan JKM, dengan target pada Perjanjian Kinerja sebanyak 75 dokumen dan telah terealisasi sebanyak 83 dokumen atau capaian sebesar 110,67%. Sedangkan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD melaksanakan penyusunan 4 (empat) dokumen laporan keuangan (laporan keuangan akhir tahun, laporan bulanan kinerja keuangan, laporan keuangan semesteran prognosis dan laporan keuangan bulanan Bendahara Pengeluaran. Sehingga secara pencapaian dokumen telah terealisasi 100% dan telah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten

Tanah Laut dengan Penghargaan Bendahara Pengeluaran Terbaik Kategori II pada tanggal 2 Desember 2019.

15. Sasaran strategis nomor 15 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan indikator sasaran Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2018 adalah penilaian LAKIP Tahun 2017 sebesar 100,92 dan tahun 2019 adalah penilaian LAKIP Tahun 2018 adalah sebesar 113,61, mengalami kenaikan sebesar 12,69%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 15 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2019. Pada tahun 2019 telah melaksanakan Penyusunan 3 (tiga) dokumen yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018, Laporan LKPJ Tahun 2019 dan Laporan LPPD Tahun 2019 BPKAD Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Selanjutnya juga telah dilaksanakan Reviu SAKIP Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Tanah Laut oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dan telah mendapatkan Nilai 74,98 dari target nilai 66, maka dengan demikian capaian kinerja BPKAD Kab. Tanah Laut mengalami peningkatan kinerja.
16. Setiap triwulan dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dengan dibuatkan Berita Acara sebagai bukti telah dilakukan pengawasan internal dari Atasan Langsung kepada Pejabat Struktural dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut terhadap kinerja Kegiatan_kegiatan di Bidangnyanya masing-masing sebagai bahan acuan pedoman untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Berhasilnya pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentunya sangat ditunjang oleh kualitas sumber daya aparatur, sumber dana serta dukungan dan partisipasi dari pihak-pihak terkait. Selain itu, masih terdapatnya kelemahan-kelemahan seperti terbatasnya tenaga profesional serta pelaksanaan tugas pada BPKAD sangat

tergantung dari input SKPD lainnya sehingga diperlukan kerjasama yang baik dan harmonis dengan SKPD dalam mengelola keuangan dan aset daerah.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi persoalan tersebut diantaranya dengan berupaya secara bertahap terus meningkatkan kualitas kinerja dan disiplin SDM aparatur pada BPKAD serta peningkatan sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas. Serta upaya untuk terus melakukan evaluasi terhadap kinerja baik pada waktu tahun berjalan maupun setelah akhir tahun sebagai pedoman dalam melakukan langkah-langkah perbaikan. Selain itu diperlukan peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta kerjasama dengan institusi lain.

Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan dan pencapaian kinerja SKPD khususnya bagi BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, Januari 2020
Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut,

MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
NIP. 19661227 198703 1 002